

Editor: Arif Munandar

PENGANTAR ILMU PEREKONOMIAN, INVESTASI DAN KEUANGAN



Dr. Hamdan Firmansyah, M.M.Pd, M.H.
Aswanto, S.E., M.E.
Enny Kartini, M.Pd.
Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.
Dr. (Cand) Aditya Wardhana, S.E., M.M., M.Si
Ratih Pratiwi, S.Pd., M.Si., M.M.
Musdalifah, S.Pd., M.Pd
Dr. Diah Santi Hariyani, S.E., M.Si
Madya Ahdiyat, S.E., M.M.
Refni Sukmadewi, S.E., M.M.
Muhammad Ulin Nuha, S.E., M.M.
Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si

BOOK CHAPTER

**PENGANTAR ILMU PEREKONOMIAN,
INVESTASI DAN KEUANGAN**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR ILMU PEREKONOMIAN, INVESTASI DAN KEUANGAN

Dr. Hamdan Firmansyah, M.M.Pd, M.H.

Aswanto, S.E., M.E.

Enny Kartini, M.Pd.

Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

Dr. (Cand) Aditya Wardhana, S.E., M.M., M.Si

Ratih Pratiwi, S.Pd., M.Si., M.M.

Musdalifah, S.Pd., M.Pd

Dr. Diyah Santi Hariyani, S.E., M.Si

Madya Ahdiyat, S.E., M.M.

Refni Sukmadewi, S.E., M.M.

Muhammad Ulin Nuha, S.E., M.M.

Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si

Editor:

Arif Munandar

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

PENGANTAR ILMU PEREKONOMIAN, INVESTASI DAN KEUANGAN

Dr. Hamdan Firmansyah, M.M.Pd, M.H.

Aswanto, S.E., M.E.

Enny Kartini, M.Pd.

Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

Dr. (Cand) Aditya Wardhana, S.E., M.M., M.Si

Ratih Pratiwi, S.Pd., M.Si., M.M.

Musdalifah, S.Pd., M.Pd

Dr. Diah Santi Hariyani, S.E., M.Si

Madya Ahdiyat, S.E., M.M.

Refni Sukmadewi, S.E., M.M.

Muhammad Ulin Nuha, S.E., M.M.

Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si

Editor :

Arif Munandar

Tata Letak :

Mega Restiana Zendrato

Desain Cover :

Syahrul Nugraha

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vi, 257

ISBN :

978-623-362-442-8

Terbit Pada :

Maret 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.penerbit.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai dihadapan pembaca. Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi dan Keuangan.

Sistematika buku book chapter Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi dan Keuangan ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai insiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, Januari 2022

Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1 PENGANTAR ILMU PEREKONOMIAN.....	1
Pengantar Ilmu Perekonomian.....	1
Masalah Ekonomi Klasik.....	3
Masalah Ekonomi Modern.....	4
Tindakan dan Prinsip Ekonomi	5
Karakteristik Ilmu Ekonomi	6
Tujuan Ilmu Ekonomi	7
Manfaat Ilmu Ekonomi.....	8
Kajian Ilmu Ekonomi	9
Jenis Ilmu Ekonomi.....	10
Cabang – Cabang ilmu Ekonomi.....	13
2 SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA	21
Pendahuluan	21
Kriteria Kemajuan Ekonomi	23
Sejarah Perekonomian Indonesia.....	24
Sistem Ekonomi yang Umum di Dunia	39
3 DASAR-DASAR EKONOMI.....	43
Pengertian Ekonomi.....	43
Kebutuhan dan Alat Pemuas Kebutuhan	44
Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi	49
Kegiatan Ekonomi.....	56
Pelaku Ekonomi.....	58

4	ILMU EKONOMI MIKRO DAN MAKRO	67
	Pendahuluan	67
	Ruang Lingkup Ekonomi Mikro	68
	Permintaan, Penawaran, dan Harga Keseimbangan	69
	Perilaku Konsumen dan Produsen	76
	Ruang Lingkup Ekonomi Makro	79
	Masalah Inflasi	79
	Masalah Pengangguran	81
	Masalah Keseimbangan Neraca Pembayaran	82
	Masalah Pertumbuhan Ekonomi	84
5	PENGANTAR ILMU INVESTASI	93
	Pengertian Investasi	93
	Investor Individu dan Investor Kelembagaan	94
	Jenis-Jenis Investasi	95
	Pertimbangan Dalam Berinvestasi	96
	Tujuan Investasi	98
	Kategori Investasi	100
	Sikap Investor Terhadap Risiko	101
	Manajemen Portofolio Investasi	101
6	PRINSIP DAN KONSEP INVESTASI	109
	Investasi	109
	Teori Investasi Dari Berbagai Ahli	111
	Rasio Investasi Keuangan	116
	Prinsip Dasar Investasi	121
	<i>Time Horizon</i> (Horizon Waktu)	124
	Pertimbangan <i>Market Timing</i>	124

	Pasar Saham dan Bursa Efek.....	125
7	DASAR-DASAR INVESTASI	133
	Pengertian Investasi.....	133
	Jenis Investasi.....	134
	Tipe – Tipe Investasi.....	138
	Tujuan Investasi	139
	Proses Investasi	142
	Tipe Investor.....	143
	Resiko Investasi.....	145
8	DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN.....	151
	Pengertian Manajemen Keuangan.....	151
	Tujuan Manajemen Keuangan.....	152
	Fungsi Manajemen Keuangan	154
	Prinsip Mengelola Keuangan	156
	Perencanaan dan Pengendalian Keuangan.....	157
	Teori-Teori Manajemen Keuangan	158
9	MANAJEMEN KEUANGAN.....	173
	Overview Manajemen Keuangan	173
	Tugas Manajer Keuangan.....	176
	Fokus Manajemen Keuangan	178
	Tujuan Manajemen Keuangan.....	178
	Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan	179
	Ruang Lingkup Manajemen Keuangan.....	182
	Perencanaan Keuangan.....	184
	Laporan Keuangan.....	184
	Kebijakan Modal Kerja	185

	Manajemen Kas	186
	Manajemen Piutang Dagang dan Persediaan	187
	Sumber Pendanaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek.....	188
	Pasar Keuangan.....	189
	Manajemen Keuangan Internasional.....	190
10	PELAPORAN DAN LAPORAN KEUANGAN.....	195
	Pengertian Laporan Keuangan.....	195
	Tujuan Pelaporan Keuangan	196
	Pengguna Laporan Keuangan.....	197
	Konsep-Konsep Penyusunan Laporan Keuangan.....	198
	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	202
	Jenis-Jenis Laporan Keuangan	205
11	SISTEM DAN LEMBAGA KEUANGAN.....	215
	Pendahuluan	215
	Stabilitas Sistem Keuangan.....	220
	Bank Sentral dan Bank Umum	223
	Lembaga Keuangan.....	227
	Kesimpulan	234
12	KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH.....	237
	Pengertian Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	237
	Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah	239
	Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah	242

Asas-Asas Pengelolaan	
Keuangan Negara dan Daerah	242
Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	245
Penyusunan APBN	250
Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	252
Pembiayaan Daerah	253
Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	255

PENGANTAR ILMU PEREKONOMIAN

Dr. Hamdan Firmansyah, M.M.Pd, M.H.

Lembaga Pendidikan dan Dakwah Pesantren Cendekia

Pengantar Ilmu Perekonomian

Istilah atau kata ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Xenophone (427 SM), istilah tersebut dikemukakan dalam karyanya yang berjudul *Oikonomikus*. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti keluarga (rumah tangga), dan *nomos* berarti peraturan, aturan atau hukum. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Kata ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga atau negara. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia (Putong, 2013).

Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mampu mengelola sumber daya yang terbatas tapi mampu menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa

yang berguna kepada masyarakat itu sendiri. Menurut McConnell and Brue (2005) definisi dari ekonomi adalah *it is the social science concerned with the efficient use of scarce resources to achieve the maximum satisfaction of economic wants*. Menurut Samuelson (2005), ekonomi adalah suatu studi bagaimana oran-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan meggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Menurut Mankiw (2003), ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang selalu terbatas atau langka.

Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Marx berpendapat ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari mengenai cara manusia dalam bertahan hidup pada suatu kelas sosial, yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana produksi. Hatta menyebutkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat (Dewanty, 2021).

Economics diartikan sebagai ilmu ekonomi merupakan yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi dan

pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan; ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Winarno, Sujana, 2007). Ilmu ekonomi merupakan ilmu atau seni tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi (Budimansyah, 2003). Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, karena pada dasarnya manusia melakukan kegiatan ekonomi sejak manusia ada. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus dilakukan kajian-kajian mendalam mengenai ilmu ekonomi.

Masalah Ekonomi Klasik

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Masalah ekonomi yang dilihat secara sederhana, meliputi (Muzaki, 2019):

1. Produksi; merupakan bagaimana memproduksi kebutuhan (barang atau jasa) yang dibutuhkan oleh semua orang. misalkan di suatu daerah semua masyarakatnya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama, maka produksi terhadap sepeda akan dilakukan sebanyak mungkin.
2. Distribusi; setelah benda tersebut terproduksi maka masalah selanjutnya adalah bagaimana benda tersebut sampai kepada konsumen apakah langsung beli ke pabrik, lewat distributor atau lewat penjual eceran. Untuk sistem produksi klasik biasanya menggunakan sistem distribusi langsung dan lewat

pasar nyata. Yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung dan membawa benda yang diperjualbelikan. Sedangkan pada distribusi modern telah terbentuk berbagai sistem distribusi yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

3. Konsumsi; objek dari pada konsumsi tidak hanya berupa benda tetapi juga berupa jasa. Antara benda dan jasa saling berkaitan satu sama lainnya sehingga untuk memudahkan pemahaman sering disebut produk. Produk yang dikonsumsi idealnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Dengan kata lain bahwa masalah konsumsi menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, antara satu sama lainnya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Hal ini menciptakan pola perekonomian yang terus berputar dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Masalah Ekonomi Modern

Permasalahan ekonomi modern terdiri dari (Muzaki, 2019):

1. *What*; masalah pertama adalah apa yang akan diproduksi, hal ini berkaitan dengan jenis apa yang akan diproduksi dan berapa yang harus diproduksi. Maka dari itu sebelum memproduksi produsen harus mengerti kebutuhan dari pada konsumen dengan cara produksi berorientasi pada pasar. Tanpa berorientasi pada pasar maka produk yang diproduksi akan sulit untuk laku. Di dalam melakukan produksi, produsen tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan tetapi juga untuk menghasilkan keuntungan dan menjaga kesinambungan. Sehingga perlu riset dan perencanaan yang matang dalam menentukan apa yang akan diproduksi.

2. *How*; setelah diketahui jenis dan jumlah produk yang diproduksi maka masalah selanjutnya adalah bagaimana memproduksinya. Apakah dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi atau menggunakan tenaga kerja manusia atau campuran. Tidak semua produk bisa diproduksi dengan menggunakan mesin teknologi tinggi sekalipun. Untuk produk yang berupa jasa adalah bagaimana pelayanan itu dilakukan dan dengan apa pelayanan tersebut dijalankan.
3. *Who*; siapakah pelaku produksi, banyak pihak yang bisa melakukan kegiatan ini. Tidak hanya perusahaan saja, tetapi individu dan pemerintah juga melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan antara lain produksi mobil, motor, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya
4. *For whom*; untuk siapa barang diproduksi ini merupakan tujuan akhir dari pada proses produksi. Suatu benda diproduksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik langsung atau tidak langsung. Konsumen bisa berupa perorangan, kelompok atau pemerintah.

Tindakan dan Prinsip Ekonomi

Mempelajari ilmu ekonomi berarti mempelajari perilaku atau tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi hasil artinya menunjukkan hasil yang maksimum. Kedua, sisi biaya artinya kalau dilihat dari hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai alternatif itu maka dilihat dari biayanya. Kedua aspek itulah yang disebut prinsip ekonomi. Secara ringkas prinsip ekonomi menyatakan bahwa: a) Untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang

dikeluarkan harus sekecil mungkin; b) Dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin. Jadi, prinsip yang pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan pada aspek produktivitas. Efisiensi dan produktivitas memang merupakan dua istilah yang melekat dan menjiwai kegiatan ekonomi (Ahman, Rohmana, 2009).

Karakteristik Ilmu Ekonomi

Menurut Ekowati (2008) Adapun karakteristik ilmu ekonomi sebagai berikut:

1. Ilmu ekonomi berangkat dari fakta atau gejala ekonomi yang nyata. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber-sumber ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya terbatas
2. Ilmu ekonomi mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan fakta secara rasional. Agar manusia mampu membaca dan menjelaskan gejala-gejala ekonomi secara sistematis, maka disusunlah konsep dan teori ekonomi menjadi bangunan ilmu ekonomi. Selain mempunyai persyaratan sistematis, ilmu ekonomi juga memenuhi persyaratan keilmuan yang lain yaitu objektif dan mempunyai tujuan yang jelas.
3. Umumnya, analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah cocok digunakan dalam analisis ekonomi sebab objek dalam ilmu ekonomi adalah permasalahan dasar ekonomi. Permasalahan dasar tersebut yaitu barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang diproduksi. Ketiga permasalahan dasar

tersebut pada intinya berangkat dari adanya kelangkaan sumber-sumber ekonomi.

4. Inti dari ilmu ekonomi adalah memilih alternatif yang terbaik. Untuk mencapai kemakmuran manusia mempunyai banyak pilihan kegiatan. Namun, dari sekian banyak pilihan kegiatan tersebut dapat dianalisis secara ekonomi sehingga dapat ditentukan alternatif pilihan mana yang paling optimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ilmu ekonomi dapat digunakan untuk menentukan alternatif pilihan kegiatan ekonomi yang terbaik.
5. Lahirnya ilmu ekonomi karena adanya kelangkaan sumber pemuas kebutuhan manusia. Apabila sumber ekonomi keberadaannya melimpah (tidak langka), maka ilmu ekonomi tidak diperlukan lagi bagi

Tujuan Ilmu Ekonomi

Tujuan ilmu ekonomi adalah (Ahman, Rohmana, 2009): a) Untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi baik hubungan yang bersifat kausal maupun hubungan yang bersifat fungsional; b. Untuk menguasai peristiwa-peristiwa tersebut dan untuk dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena kelangkaan inilah kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut (Itang, Daenuri, 2017). Dengan keluasan jangkauan kajiannya, ekonomi dapat melihat bagaimana individu ataupun kelompok dalam mengambil keputusan menggunakan sumber daya. Ilmu ekonomi digunakan untuk memastikan keputusan yang

diambil merupakan yang paling rasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu yang terbatas, serta kemampuan untuk mengolahnya.

Manfaat Ilmu Ekonomi

Manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi menurut Mankiw dan pakar ekonomi lainnya adalah (Putong, 2013):

1. Ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Dengan menguasai ilmu ekonomi, pertanyaan mengenai mengapa harga produk tertentu cenderung naik mendekati hari raya, mengapa penjualan barang mewah cenderung meningkat pada saat perekonomian mengalami krisis, mengapa nilai kurs sangat berpengaruh terhadap harga-harga di dalam negeri dan seterusnya.
2. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Tentu saja bagi yang mempelajari ilmu ekonomi dan kemudian mampu menguasainya dengan baik, relatif akan lebih mudah membaca fenomena ekonomi yang terjadi sehubungan dengan kejadian-kejadian dalam perekonomian, kemudian relatif dapat memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian.
3. Dengan menguasai ilmu ekonomi maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Bagi yang tidak mengetahui dan menguasai ilmu ekonomi umumnya terkadang terlalu aprori, maksudnya adalah hanya memiliki pengetahuan sebelum bertemu dengan pengalaman tapi sudah memiliki asumsi dan akhirnya mengambil kesimpulan. Apriori terhadap suatu

kebijakan pembangunan ekonomi atau bahkan terlalu optimis dan cenderung menyalahkan.

4. Bila dapat memahami dan mahir dalam perekonomian lalu paham dengan potensi serta keterbatasannya maka akan sangat paham bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang baik dimana setiap pilihan menentukan tujuan dan setiap tujuan menentukan masa deapn dan masa depan harus dialami dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya.

Kajian Ilmu Ekonomi

Menurut Stonier dan Hague (1984), kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Ilmu ekonomi deskriptif; memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Melalui ilmu ekonomi deskriptif, bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, data atau fakta yang diperoleh harus disusun secara sistematis. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif yaitu gambaran mengenai krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia.
2. Ilmu ekonomi terapan; berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain.
3. Ilmu ekonomi teori; berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab-akibat, serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan

pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua jenis, yaitu teori ekonomi makro dan mikro (Dewanty, 2021).

Jenis Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi terbagi dalam 2 bagian besar yaitu ilmu ekonomi mikro (*microeconomics*) dan ilmu ekonomi makro (*macroeconomics*). Perbedaan 2 jenis ilmu ekonomi itu terletak pada pembahasan yang dilakukan oleh masing-masing ilmu ekonomi. Pada ilmu ekonomi mikro lebih membahas mengenai teori harga yang di dalamnya terdapat perusahaan dan industri, teori produksi, teori biaya, teori penerimaan, keuntungan dan manfaat, teori pasar, teori upah dan faktor produksi. Kemudian pada ilmu ekonomi makro lebih membahas mengenai teori pendapatan nasional yang di dalamnya terdapat pendapatan nasional agregat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran, kesempatan kerja dan keseluruhan/total investasi (Putong, 2013).

Micros, artinya kecil. Teori ekonomi mikro membahas perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Teori ekonomi mikro sering mendapat perhatian lebih besar daripada teori ekonomi makro. Ekonomi mikro membicarakan tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beraneka ragam. Teori ini juga akan mempelajari ekonomi secara khusus maksudnya membahas tentang aktivitas ekonomi dari suatu satuan ekonomi dari keseluruhan seperti konsumen, pemilik faktor-faktor produksi, tenaga kerja, perusahaan, industri dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku

individu dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi. Individu dimaksud seperti konsumen, pemilik sumber-sumber daya dan perusahaan dalam perekonomian pasar bebas (Aisyah, Hiola, 2017).

Adapun ruang lingkup dari ekonomi mikro adalah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari masing-masing unit ekonomi seperti (Khusaini, 2013): a) Interaksi di pasar barang; pasar diartikan sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) atau pertemuan antara penjual dan pembeli suatu barang dengan jumlah tertentu sehingga tercipta suatu harga. Misalnya pasar beras, pasar mobil, pasar elektronik. b) Perilaku penjual dan pembeli; baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki sifat yang rasional, yaitu dimana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal (*maximum profit*) sedangkan pembeli menginginkan kepuasan maksimal (*maximal utility*). c) Interaksi di pasar faktor produksi; dari sisi pembeli (konsumen) memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual (produsen) memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor-faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan (Suswanti, 2019).

Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah makroekonomi yang penting (*major macroeconomic issues*) dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari (Dornbusch and Fischer, 1986). Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan dalam mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Tujuan

dari ilmu ekonomi makro itu sendiri adalah untuk memahami peristiwa ataupun fenomena ekonomi serta untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Disini dapat diperoleh gambaran bahwa ilmu ekonomi makro bukanlah merupakan alat atau doktrin perekonomian, melainkan metode yang berguna untuk membantu mengembangkan pemikiran mengenai bagaimana cara bekerja dan memperbaiki kondisi perekonomian (Putong, 2013).

Makro Ekonomi menurut Nanga (2001), merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku dari perekonomian atau tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan (*aggregate*), termasuk di dalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian atau kegiatan ekonomi agregat tersebut. Menurut Mankiw (2006), makroekonomi adalah sebuah studi tentang perekonomian secara menyeluruh, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pertumbuhan pendapatan, kemiskinan, inflasi, kestabilan harga, resesi, depresi, pengangguran dan lainnya. Hubungan yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif (keseluruhan). Diantara variabel-variabel yang dimaksud antara lain adalah tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional (pemerintah maupun swasta), tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga-harga umum, neraca pembayaran (ekspor dan impor) dan lainnya (Putong, 2013).

Makroekonomi sangat penting bagi para pembuat kebijakan (*policymakers*), karena beberapa alasan sebagai berikut: a) Makroekonomi dapat membantu para pembuat kebijakan (*policy makers*) untuk menentukan apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu memecahkan resesi yang dihadapi suatu perekonomian b) Makroekonomi dapat pula membantu para pembuat

kebijakan melalui berbagai pilihan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. c) Makroekonomi dapat membantu para pembuat kebijakan untuk mempertahankan agar inflasi tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil tanpa menyebabkan perekonomian mengalami ketidakstabilan dalam jangka pendek d) Makroekonomi juga dapat menjelaskan bagaimana perubahan dalam suatu kebijakan itu mempengaruhi jenis-jenis barang yang dihasilkan dalam perekonomian (Amstrong, Taylor, 1993).

Cabang – Cabang ilmu Ekonomi

Feryanto (2019), menjelaskan beberapa cabang ilmu ekonomi, yaitu:

1. Ekonomi moneter; merupakan salah satu dari cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mengkaji mengenai fungsi, sifat dan juga pengaruh dari uang terhadap perekonomian. Contoh dalam kehidupan masyarakat: perbankan, inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat, tingkat suku bunga atau lembaga lembaga keuangan lainnya.
2. Ekonomi publik; merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji, membahas dan menelaah mengenai masalah ekonomi dari khalayak ramai. Intinya ilmu ekonomi ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Contoh dalam kehidupan masyarakat: kebijakan subsidi, pajak, pendidikan, utang pemerintah, APBN, APBD, retribusi dan sebagainya.
3. Ekonomi regional; merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang fokus dan mengkaji mengenai industri ekonomi yang terjadi di antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Atau bisa juga diartikan ilmu ekonomi yang membahas interaksi ekonomi antarwilayah dan proses pengembangan suatu

wilayah. Contoh dalam kehidupan masyarakat: demografi, transportasi dan juga infrastruktur.

4. Ekonomi internasional; merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mengkaji mengenai kegiatan perekonomian yang terjadi di antara suatu negara dengan negara lainnya. Singkatnya membahas tentang kegiatan perekonomian antarbangsa atau antarnegara. Contoh dalam kehidupan masyarakat: ekspor dan impor, transaksi perdagangan antarnegara, aliran investasi antarnegara, dan neraca pembayaran.
5. Ekonomi Industri; merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan diri membahas mengenai interaksi dari berbagai perusahaan di dalam sebuah industri. Termasuk juga di dalamnya membahas mengenai struktur pasar dan persaingan usaha. Contoh dalam kehidupan masyarakat: dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan atau kartel
6. Ekonomi SDM (sumber daya manusia); merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan faktor sumber daya manusia. Intinya ekonomi ini membahas faktor produksi tenaga kerja. Contoh dalam kehidupan masyarakat: produktivitas pekerja, jumlah upah minimum regional (UMR), masalah pengangguran, upah minimum dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja.
7. Ekonomi SDA (sumber daya alam); merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas dan mengkaji mengenai analisis masalah dan juga alokasi dari SDA yang optimal berdasarkan ekonomi. Contoh dalam kehidupan masyarakat: eksternalitas positif dan negatif.

8. Ekonomi Syariah; Merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menerapkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Intinya ekonomi ini bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Contoh dalam kehidupan masyarakat: pokok bahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian dan zakat (Widowati, 2017).

Daftar Pustaka

- Ahman, Eeng; Rohmana, Yana (2009) *Ilmu Ekonomi dalam PIPS*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Aisyah; Hiola, Siti Khadijah Yahya (2017) *Ekonomi Mikro: Aplikasi dalam Bidang Agribisnis*. Makassar: CV. Inti Mediatama
- Armstrong, Harvey; Taylor, Jim (1993) *Regional Economics and Policy*. Second Edition. New York: Harvester Wheatsheaf
- Budimansyah, Dasim (2003) *Model Pembelajaran Berbasis Porto Folio Ekonomi*. Bandung: PT Genesindo
- Departemen Pendidikan Nasional (2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewanty, Fitri (2021) *Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Pembagian Ilmunya*. Retrieved [https://pahamify.com/blog/konsep-dasar-ilmu-ekonomi/#:~:text=Kata%20ekonomi%20berasal%20dari%20bahasa,dan%20%E2%80%9Cn omos%E2%80%9D%20berarti%20aturan.&text=Ilmu%20ekonomi%20juga%20sering%20diartikan,manusi a%20dalam%20memenuhi%20kebutuhan%20hidupn ya](https://pahamify.com/blog/konsep-dasar-ilmu-ekonomi/#:~:text=Kata%20ekonomi%20berasal%20dari%20bahasa,dan%20%E2%80%9Cn omos%E2%80%9D%20berarti%20aturan.&text=Ilmu%20ekonomi%20juga%20sering%20diartikan,manusi a%20dalam%20memenuhi%20kebutuhan%20hidupn ya.).
- Dornbusch and Fischer (1986) *Makroekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga
- Ekowati, Endang; Zainuri (2008) *Silabus Ekonomi*. Retrieved <https://ekowati52.wordpress.com/2008/08/12/silabus-ekonomi/#respond>
- Feryanto, Agung (2019) *Mengenal Ilmu Ekonomi*. Klaten: Cempaka putih
- Itang; Daenuri, Adib (2017) *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam*. TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol. 18 No. 1
- Khusaini, Muhammad (2013) *Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori*. Malang: UB Press

- Mankiw, N. Gregory (2003) *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- _____ (2006) *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- McConnell CR, Brue SL (2005) *Economics: Principles, Problem, and Policies*. United States (US): McGraw-Hill
- Muzaki, Hasan (2019) *Pengantar Ekonomi*. Cilacap: Ihya Media
- Nanga, M (2005) *Makroekonomi: Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Putong, Iskandar (2013) *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Samuelson, Paul A; Nordhaus, William D (2005) *Economics*. Eighteenth Ed. New York: McGraw Hill Irwin
- Stonier, Alfred W; Hague, Douglass C (1984) *Teori Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suswanti, Nur Aini Indah (2019) *Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Asosiasi Pengrajin Industri Konveksi (APIK) di Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Widowati (2017) *Cabang-Cabang Ilmu Ekonomi Beserta Penjelasan*. Retrieved <https://harmoni-ekonomi.blogspot.com/2017/11/cabang-cabang-ilmu-ekonomi-beserta.html>
- Winarno, Sigit; Ismaya, Sujana (2007) *Kamus Besar Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Grafika

Profil Penulis



Dr. Hamdan Firmansyah, M.M.Pd, M.H.

Lahir di Sukabumi tanggal 02 Agustus 1981 dari pasangan Ibu Suaebah seorang pendidik dan Bapak Fajar Hidayat seorang jurnalis. Penulis menikahi wanita yang lahir dari pasangan Ibu Emi Ratnawati dan Bapak Mardjuki bernama Putri Ema Swandayani, S.Kep dan Alhamdulillah baru dikaruniai lima orang anak: Hizqil Hilqiya, Yusya Alyasa, Asmatuha Fariha Yaumia, Muhammad Arasya Muntaha dan Muhammad Irsyad Rasyid. Sekarang penulis bersama keluarga merintis Lembaga Pendidikan dan Dakwah Pesantren Cendekia di Kota Sukabumi.

Pendidikan yang ditempuh adalah Madrasah Ibtidaiyah (1993), Madrasah Diniyah Awwaliyah (1994), Taman Pendidikan Al-Quran (1995), Sekolah Menengah Pertama (1996) di kota Sukabumi, Pada pertengahan tahun 1996 Masuk Pondok Modern Gontor kemudian ditempatkan di Kuliyatu-l-Mu'alimin Al-Islamiyah Pondok Modern Arrisalah (1999/2000) di Ponorogo, penulis melanjutkan ke Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Gontor Jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Islam tamat tahun 2004, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo Jurusan Mu'amalat (Hukum Ekonomi Syariah) tamat tahun 2004 dan Program Akta IV Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di tempat yang sama. Pada tahun 2005-2006 mendapat beasiswa dari Zakariyya Islamic University Lenasia South Africa untuk Program Studi Islam. Pada tahun 2006, penulis melanjutkan studi di Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta hingga selesai tahun 2007. Kemudian melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan berhasil meraih predikat Cum Laude. Dan saat ini telah menyelesaikan Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di almamater yang sama yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan meraih predikat Cum Laude. Pengalaman Penulis selain aktif sebagai peneliti sekaligus penulis baik berupa buku maupun berupa jurnal nasional dan internasional juga sebagai nara sumber pada seminar dan loka karya, tutor pada pelatihan dan sebagai tenaga edukatif dimulai sejak tahun 1998 sampai sekarang yaitu menjadi Guru TPA, RA/TK, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, KMI, dan Dosen perguruan tinggi dari Program

Diploma, Sarjana hingga Pascasarjana. Penulis pernah mendapat kehormatan menjadi Guru Agama Masyarakat Indonesia atas permintaan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Guru Agama Masyarakat Malaysia atas permintaan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Republik Afrika Selatan.

Email Penulis: abihilqi@gmail.com

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Aswanto, S.E., M.E.

Universitas Islam Riau

Pendahuluan

Secara umum, Negara bisa dijelaskan sebagai bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara memiliki dua pengertian. Pertama negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Maka adapun Unsur-unsur terbentuk nya suatu Negara bisa di jelaskan sebagai berikut :

1. Rakyat/penduduk.

Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk suatu negara, tanpa masyarakat maka mustahil negara bisa terbentuk. Leacock mengatakan bahwa

Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

2. Wilayah

Wilayah merupakan unsur yang kedua. Karena dengan ada wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia mustahil untuk membentuk negara. Bangsa Yahudi misalnya, mereka tidak mendiami suatu tempat secara permanen sehingga mereka tidak memiliki tanah yang jelas untuk didiami. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.

3. Pemerintahan

Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintahan. Definisi pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan serta melaksanakan kepemimpinan & koordinasi pemerintahan serta pembangunan

masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga dimana mereka ditempatkan.

Negara yang sekarang kita sebut Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) tentunya telah mencatat sejarah perekonomian yang telah dilakukan selama ini. Boediono menyimpulkan bahwa hakikat proses pembangunan suatu Negara adalah hasil intraksi proses ekonomi dan politik yang saling mempengaruhi secara timbal balik.

Dalam konteks sejarah, satu peristiwa yang terjadi tidak berdiri sendiri dalam arti peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lain sebelumnya. Ada hubungan sebab akibat, ada hubungan saling mempengaruhi antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan itu, bagaimana akibat pengaruh hubungan itu, kita perlu memahami beberapa peralatan analisis ekonomi.

Kriteria Kemajuan Ekonomi

1. Bagi negara-negara maju/ industri :

- a. Tingkat pendapatan per kapita
- b. Distribusi pendapatan nasional
- c. Tingkat inflasi
- d. Tingkat pengangguran

Sejauh yang merupakan obyek perhatian adalah ekonomi Negara-negara yang masih berkembang maka perlu diperhatikan beberapa aspek lagi (B.S. Mulana, 1983).

2. Bagi negara-negara sedang berkembang :

- a. Kriteria yang bersifat struktural:
 - 1) Tingkat pendapatan per kapita
 - 2) Distribusi pendapatan nasional

- 3) Peranan sektor industri/ manufaktur dan jasa
 - 4) Keterpaduan antar industri, antar sektor ekonomi, dan antar daerah
- b. Kriteria yang bersifat tahunan :
- 1) Tingkat inflasi
 - 2) Tingkat pengangguran

Sejarah Perekonomian Indonesia

Sejarah memberikan pelajaran bagi mereka yang mau belajar darinya, begitu juga dari sejarah perekonomian Indonesia mestinya mampu memberikan pelajaran untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakatnya. Maka di dalam perkembangan perekonomian Indonesia ada beberapa periode penting yang harus kita ketahui.

1. Masa Pemerintahan Orde Lama (1945-1967)

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, dan baru keluar dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia masih sangat membutuhkan sumberdaya besar untuk memulai pembangunannya. Namun hal ini tidaklah mudah, karena Indonesia berada di tengah-tengah pertarungan Global antara negara-negara pemenang PD II.

Banyak kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil mempengaruhi kondisi perekonomian :

- a. Tekanan dari Belanda masih ada
- b. Pemberontakan di daerah-daerah marak

Buruknya kondisi infrastruktur ekonomi, fisik, dan non fisik sepeninggalan Jepang.

Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut, Indonesia adalah negara yang

baru saja merdeka. Ibaratnya, sebagai negara yang baru merdeka maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :

a. Masa Kemerdekaan (1945-1950)

Setelah Proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Namun, karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering berganti, kondisi ekonomi Indonesia menjadi lemah.

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Bulan Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya negara berada dalam kondisi krisis keuangan. Kondisi tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada masa itu.

Kondisi perekonomian pada masa itu lebih banyak berfokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dasar. Namun hal ini pun juga tidak bisa berjalan dengan baik, akibat situasi politik yang tidak stabil. Beberapa kebijakan sebenarnya telah di disain dengan baik, namun ketika diimplementasikan tidak jalan. Tentu saja

tidak bisa memperbaiki kondisi perekonomian pada masa itu.

b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini, paham liberaslisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya cabinet. Hal ini kemudian membuat pada masa ini perekomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Kebijakan ini sebenarnya belum tepat benar, karena pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun akibat pengaruh eksternal, masa kebijakan ini tetap berjalan. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pada masa itu pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian. Anehnya pemerintah juga sudah mengetahui dampaknya, maka pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

c. Masa Demokrasi Terpimpin. (1959-1967)

Demokrasi terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi si pemimpin. Akhirnya demokrasi terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesiamenjalankan sistem domokrasi terpimpin. Konsekuensi dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi

Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme, dimana dalam sistem ini negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta memastikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

Faktor penyebab buruknya perekonomian Indonesia (Orde Lama):

- a. Periode orde lama Indonesia pernah mengalami sistem politik demokrasi dan demokrasi terpimpin.
 - b. Sistem politik demokrasi saat itu menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional akibat dari terlalu banyak konflik partai politik, begitu juga sistem politik demokrasi terpimpin yang umur kabinetnya hanya 1 tahun saja yang tidak memberi kesempatan atau waktu bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan masalah sosial dan ekonomi.
 - c. Selain kondisi politik dalam negeri, buruknya perekonomian pada masa orde lama yaitu keterbatasan faktor produksi (orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja, tenaga pendidikan/keterampilan yang tinggi, dana, teknologi, dan kemampuan pemerintah untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik)
2. Masa Pemerintahan Orde Baru

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Suharto. Pada masa ini dikenal dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Namun proses perjalanan Orde Baru juga penuh dengan dinamika. Order baru mengawali

rezimnya dengan menekankan pada otoritas stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Berkaca pada masa sebelumnya, dimana ketika sistem ekonomi liberal diterapkan ternyata berdampak pada kegagalan pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non pribumi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi Pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.

Pentingnya aspek pemerataan, tampaknya disadari betul dalam masa itu, sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya. Kedelapan jalur tersebut adalah :

- a. Kebutuhan pokok
- b. Pendidikan dan kesehatan
- c. Pembagian pendapatan
- d. Kesempatan kerja
- e. Kesempatan berusaha
- f. Partisipasi wanita dan generasi muda
- g. Penyebaran pembangunan
- h. Peradilan.

Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru :

- a. Perhatian pemerintah ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air.
- b. Pemerintah menjalin kembali hubungan baik dengan berbagai pihak dan menjalin pengaruh

ideologi komunis dan juga kembali menjadi bagian dari PBB dan lembaga lainnya seperti IMF dan Bank Dunia

- c. Dilakukan penyusunan REPELITA secara bertahap. Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industriisasi dalam skala besar.
- d. Repelita 1 bertujuan untuk membuat Indonesia menjadi swasembada, terutama dalam kebutuhan beras. Pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian.
- e. Paradigma pembangunan era orde baru diwadahi dalam konsep “Trilogi Pembangunan” yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan.
- f. Repelita IV orientasi kebijakan mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan

Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Hal ini terbukti, ketika dunia dilanda krisis global pada tahun 1998, Indonesia merasakan dampak yang luar biasa. Harga-harga meningkat secara drastis dan sulit dikendalikan, rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional, dan banyak perusahaan berskala besar bangkrut. Titik keterpurukan Orde Baru, akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Perkembangan ekonomi masa pemerintahan Orde Baru lebih baik dari pemerintahan Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Kemauan Politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi.
- b. Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat. Sumber daya manusia yang lebih baik.
- c. SDM di masa ORBA memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
- d. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, PMA dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.
- e. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Selain terjadi oil boom (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat), juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era ORBA khususnya setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik daripada semasa ORLA

Sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru, Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda yaitu dari ekonomi

tertutup yang berorientasi sosialis pada rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada rezim Soeharto.

3. Masa Reformasi 1998 sampai sekarang

Masa Reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dan yang semua sentralistis, menjadi desentralistis. Kebijakan dengan Otonomi daerah, yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004.

a. Masa Presiden BJ. Habibie (21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999)

Habibie adalah Wakil Presiden ketika Soeharto terpilih menjadi Presiden. Namun ketika Soeharto lengser konstitusi Habibie yang menggantikannya. Habibie inilah boleh dikatakan sebagai awal Orde Reformasi, meski masih sebagai bagian dari Soeharto. Perdebatan tentang siapa sebenarnya yang mengawali reformasi masih ada hingga sekarang. Namun jika kita mengaca pada perjalanan sejarah awal bergulirnya reformasi, Nampak bahwa reformasi yang dimaksud adalah lengsernya Soeharto dari kursi presiden. Nah ketika Soeharto telah benar-benar turun, maka tentu saja penggantinya layak disebut sebagai pemimpin baru yang reformis. Habibie mewarisi kondisi kekacauan pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Order Baru, sehingga menimbulkan

maraknya kerusakan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara lain untuk program pemulihan ekonomi.

- b. Masa Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 s/d 23 Juli 2001)

Perekonomian kala itu buruh perhatian serius dalam penangannya, salah satunya sektor moneter. Menyadari berapa beratnya mengelola sektor moneter, maka untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi Nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indrawati. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
- 2) Hubungan pemerintahan dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang

- baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
- 3) Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal Indonesia
 - 4) Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri
- c. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 s/d 20 Oktober 2004)

Pemerintah Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Hal itu ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, dan indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan. Pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1%, karena pada saat itu pemerintah membuat kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan

negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual kepada perusahaan asing.

Saat awal pemerintahan Megawati sempat terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat dunia terhadap ekonomi Indonesia.

- 1) Pemerintahan Mega mewarisi masalah ekonomi yang masih cukup berat : suku bunga SBI 17%, saldo negatif neraca pembayaran dan defisit APBN yang semakin besar.
- 2) Pertumbuhan ekonomi pada masanya relatif rendah, karena kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN) maupun PMA.
- 3) Pertumbuhan output juga relatif rendah, tingkat inflasi (2002) mencapai di atas 10% akibat kenaikan BBM, listrik dan telepon

Secara umum, pada masa pemerintahan Gotong Royong ada kesuksesan yang terjadi terutama dalam hal peningkatan jumlah cadangan devisa (karena ekspor cenderung meningkat), inflasi dapat distabilkan di bawah 10%, dan IHSG mengalami perbaikan.

- d. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 s/d 2014)

Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan sebutan SBY, merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Periode pertama dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil

Presiden Jusuf Kalla, sedangkan pada periode kedua dilantik pada 20 Oktober 2009 dengan Wakil Presiden Boediono. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, banjir, dan tanah longsong. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Terdapat dua kebijakan yang dianggap kontroversial, yaitu : 1) Kebijakan mengurangi subsidi BBM, 2) Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan mengurangi subsidi BBM, dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor Pendidikan dan kesehatan, sertabidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara kebijakan BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Perkembangan dalam sektor utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dollar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Dengan sudah tidak berada dalam “cengkeraman” IMF, maka Indonesia akan lebih leluasa dalam menentukan kebijakannya. Masa ini juga ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%, angka

mendekati target 6,6%. Namun, tingkat inflasi mencapai 8,7% yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005, dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 2005. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Masih ada kebijakan-kebijakan lain dalam bidang ekonomi, seperti: pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB, pembelian kembali saham BUMN, pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, pemberian bibit unggul pada petani. Era SBY meninggalkan beberapa masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya, karena tidak (atau barangkali belum) muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.

e. Masa Presiden Jokowi dodo

Pemerintahan Indonesia memiliki tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas, pemerintahan Jokowi dengan semboyannya “Kerja Kerja Kerja” segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya. Berbeda dengan pendahulunya yang memperbesar alokasi subsidi, Jokowi memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik: Mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial.

Dalam masa pemerintahan, stabilitas kondisi perekonomian menjadi salah satu kunci pembangunan manusia unggul. Untuk itu, pemerintah menjaga dan mendorong perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing nasional melalui terobosan-terobosan di berbagai bidang. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, khususnya di tahun 2018, gejolak perekonomian yang dihadapi dunia juga tentunya berdampak pada kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Beberapa kondisi ekonomi yang memburuk setahun belakang di antaranya, memanasnya perang dagang China dengan Amerika Serikat, gejolak harga minyak seiring

memanasnya kondisi geopolitik Timur Tengah, hingga ancaman sanksi ekonomi baru AS atas Iran. Kemudian pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral AS dengan menaikkan Fed Funds Rate secara bertahap.

Pemerintahan periode kedua Joko Widodo (Jokowi) membawa misi melanjutkan perbaikan ekonomi Indonesia. Salah satu target adalah mengeluarkan negeri ini dari jebakan pendapatan kelas menengah, sebagaimana dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2020. Dengan begitu, mimpi masuk deretan lima besar negara ekonomi dunia dan kemiskinan nol persen pada 2045 bisa terwujud.

Dirangkum dalam 3 pilar yaitu politik, ekonomi dan budaya.

- 1) Di bidang politik, pemerintah disebutkan telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 disebut sebagai capaian dalam politik luar negeri.
- 2) Di bidang ekonomi, disebutkan soal naiknya skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Selain itu, rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang ditargetkan pemerintah juga disebut sebagai sebuah keberhasilan.

- 3) Sementara di bidang sosial, pemerintah disebutkan telah memastikan hak rakyat atas tanah melalui program redistribusi dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Sementara yang paling populer, pemerintah sukses membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 18,9 juta siswa, Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,7 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

Sistem Ekonomi yang Umum di Dunia

1. Sistem ekonomi Kapitalis

Adalah suatu sistem dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual.

Asas-asas yang menjadi ciri sistem ekonomi kapitalis:

- a. Hak milik pribadi
- b. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih
- c. Motif kepentingan diri sendiri
- d. Persaingan
- e. Harga ditentukan mekanisme pasar
- f. Peranan terbatas pemerintah

2. Sistem ekonomi Sosialis

Adalah kebalikan dari kapitalis, dimana pasar justru dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar, menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien: oleh karena itu pemerintah atau negara turut aktif bermain dalam perekonomian.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis/ Sistem Pasar Sosial:

- a. Ada kebebasan individu sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha.
 - b. Prinsip-prinsip pemerataan sosial menjadi tekad warga negara
 - c. Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi
 - d. Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan
 - e. Kebijaksanaan strktural
 - f. Konformitas pasar dan persaingan
3. Sistem ekonomi Campuran

Adalah sistem ekonomi yang mengandung beberapa elemen dari sistem kapitalis dan ekonomi sosialis, dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walaupun dalam kadar berbeda-beda

Daftar Pustaka

- Basuki Pujoalwanto, (2014). *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Jogjakarta, Graha Ilmu.
- Boediono, (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Mizan Media Utama (MMU). Jakarta
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/perkembangan-sistem-perekonomian-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-1uHvfKOoch4/full>
- Jhingan, (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Subandi, (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung
- Sundari Eka Kusuma, (2017). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.

Profil Penulis**Aswanto, S.E., M.E.**

Penulis lahir di Muara Ngamu, Provinsi Riau pada 13 Juli 1992. Riwayat Pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau jurusan Ilmu Ekonomi dan melanjutkan S-2 Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Riau. Penulis saat ini bekerja sebagai Bendahara

Asrama Al-munawwarah Kampus Universitas Islam Riau sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Aktivitas dan amanah lainnya sebagai pengurus masjid kampus Universitas Islam Riau, Menjadi Pementor kegiatan Baca Al-quran (BBQ) Universitas Islam Riau dan aktif di luar sebagai organisasi kemanusiaan (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina). Penulis ikut tergerak untuk menyumbangkan tulisan ini, hal ini di karnakan untuk menambah wawasan dan pengalaman di dalam penulisan buku.

Email Penulis: aswan.study@gmail.com

DASAR-DASAR EKONOMI

Enny Kartini, M.Pd.

IKIP PGRI Kalimantan Timur

Pengertian Ekonomi

Setiap makhluk hidup yang bernama manusia pasti berusaha untuk mempertahankan dirinya untuk dapat terus hidup dengan berbagai macam cara sesuai dengan pemahaman dan prinsip hidup yang dimilikinya. Salah satu usaha yang dilakukan manusia untuk dapat bertahan hidup adalah melakukan kegiatan ekonomi, karena dengan melakukan kegiatan ekonomi kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* yang artinya rumah tangga dan *nomos* artinya mengatur, maka ekonomi mempunyai arti aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Dalam kenyataannya, ekonomi tidak hanya mengatur urusan rumah tangga suatu keluarga saja tetapi bisa juga mengatur urusan rumah tangga sebuah negara (Fauzia dan Riyadi, 2014:2)

Ekonomi merupakan kegiatan dasar yang dilakukan manusia yang menjadi perwujudan dari naluri untuk tetap bertahan hidup dan bertahan sekuat mungkin dengan melakukan berbagai hal yang ia mampu untuk dapat memenuhi dan melayani kebutuhan hidupnya semaksimal mungkin (Pantas, 2021:11). Ekonomi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kemakmuran hidup.

Mempelajari ilmu ekonomi sangat penting karena memberikan manfaat:

1. Bagi individu mampu mengambil keputusan dari berbagai alternatif pilihan
2. Bagi perusahaan mampu mengambil keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan
3. Bagi Negara mampu menyusun kebijakan atas permasalahan perekonomian

Ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi suatu daerah atau wilayah
2. Teori ilmu ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang pembahasannya sesuai dengan besarnya lingkup permasalahan ekonomi yang terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro
3. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang mengaplikasikan teori-teori dalam ekonomo untuk memecahkan masalah ekonomi, misalnya ilmu manajemen, ilmu akuntansi.

Kebutuhan dan Alat Pemuas Kebutuhan

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya. Adapaun pembagian jenis kebutuhan adalah sebagai berikut;

1. Kebutuhan berdasarkan intensitas kepentingannya
 - a. Kebutuhan primer. Kata primer berasal dari Bahasa Latin *Primus* yang artinya pertama jadi

kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia pertama kali karena apabila tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kematian. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan.

- b. Kebutuhan sekunder. Kata sekunder berasal dari Bahasa Latin *secundus* yang artinya kedua sehingga kebutuhan sekunder artinya adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan utama terpenuhi. Contoh untuk kebutuhan sekunder berbeda-beda bagi setiap orang, misalnya mobil menjadi barang sekunder bagi orang yang berpenghasilan tinggi akan tetapi menjadi barang mewah bagi orang yang berpenghasilan rendah.
- c. Kebutuhan tersier. Kata tersier berasal dari Bahasa Latin *tertius* yang artinya ketiga, jadi arti dari kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang akan terpenuhi jika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi dengan baik. Contoh dari kebutuhan tersier ini juga sesuai dengan kondisi dari seseorang, ada kalanya sebuah barang menjadi barang tersier bagi seseorang tetapi menjadi barang sekunder bagi yang lain. Kebutuhan tersier ini lebih mengarah kepada barang-barang yang sangat mewah seperti kapal pesiar, rumah mewah, berlian atau barang-barang yang mempunyai brand terkenal.

2. Kebutuhan berdasarkan sifatnya

- a. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan fisik seperti menjaga penampilan dan menjaga kesehatan. Misalnya kebutuhan akan olah raga, kebutuhan makan

makanan yang sehat dan bergizi, dan istirahat yang cukup.

- b. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Misalnya kebutuhan melakukan kegiatan ibadah, bersosialisasi, rekreasi dan hiburan.
3. Kebutuhan berdasarkan waktu
 - a. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang pemenuhannya harus dilakukan pada waktu sekarang dan tidak dapat ditunda. Misalnya obat bagi orang yang sedang sakit, makanan bagi orang yang lapar, minuman bagi orang yang kehausan
 - b. Kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di waktu yang lain atau dapat ditunda karena sebagai kebutuhan yang tidak mendesak. Misalnya menabung yang dapat dilakukan ketika kondisi keuangan berlebih.
 4. Kebutuhan berdasarkan subyeknya
 - a. Kebutuhan individu. Kebutuhan ini adalah kebutuhan perseorangan yang bentuk kebutuhannya berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya buku tulis dibutuhkan oleh anak-anak sekolah untuk menulis sedangkan seorang petani lebih membutuhkan cangkul dan traktor dibandingkan dengan buku tulis.
 - b. Kebutuhan umum (kolektif). Kebutuhan ini adalah kebutuhan dalam sebuah masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya, rumah sakit, jembatan, jalan raya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan alat pemuas kebutuhan yang diperoleh melalui kegiatan ekonomi. Alat pemuas kebutuhan manusia dapat berupa barang dan jasa. **Barang adalah setiap benda yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang dapat dilihat diraba (berwujud)**, contohnya banyak yang dapat ditemui misalnya makanan, pakaian, rumah, meja, uang dan banyak lagi yang lainnya sedangkan **jasa adalah sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dilihat diraba tetapi dapat dirasakan manfaatnya**, contohnya adalah misalkan motor kita rusak maka kita perlu jasa montir/mekanik, ketika kita sakit kita membutuhkan jasa dokter, ketika kita sedang belajar atau membutuhkan pendidikan kita memerlukan jasa guru dan sebagainya.

Adapun barang sebagai alat pemuas kebutuhan manusia memiliki jenis-jenis (Septiana, 2016) sebagai berikut:

1. Barang menurut cara mendapatkannya
 - a. Barang bebas. Barang bebas adalah barang yang dapat memuaskan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan (tidak memerlukan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut). Contohnya adalah Udara, air laut, padang pasir.
 - b. Barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang dapat memuaskan kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang atau tenaga. Contohnya obat bagi orang sakit dapat diminum ketika obat tersebut sudah dibeli di apotik, atau pakaian yang dibutuhkan tidak didapat dengan begitu saja tetapi kita harus

mengeluarkan uang untuk membeli pakaian tersebut agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian.

2. Barang menurut kegunaannya (*utility*)

- a. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang sudah jadi dan dapat langsung dipakai oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah buku tulis, pakaian, lemari dan sebagainya
- b. Barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang lain. Contohnya adalah mesin, komputer, peralatan dapur dan sebagainya.

3. Barang menurut proses produksinya

- a. Barang mentah (bahan baku). Barang mentah adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat suatu barang pemuas kebutuhan manusia. Contohnya adalah tepung sebagai bahan bakunya roti, biji gandum sebagai bahan dasarnya tepung gandum.
- b. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah suatu barang hasil pengolahan barang mentah tetapi belum sebagai barang jadi sehingga masih harus diproses lebih lanjut. Contohnya adalah misalnya ada kapas, benang dan kain, maka apabila kita ingin menghasilkan sebuah kain, yang menjadi barang setengah jadi adalah benang karena dari kapas yang dipintal menghasilkan benang yang harus diproses dengan ditenun untuk menghasilkan barang jadi berupa kain.

- c. Barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil proses produksi mulai dari pengolahan bahan baku dan barang setengah jadi menjadi barang akhir yang siap dipakai oleh konsumen yang membutuhkan. Contohnya adalah sepatu, pakaian, mobil dan sebagainya.
4. Barang menurut hubungannya dengan barang lain
- a. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang dapat berfungsi jika pemakaiannya digunakan bersamaan dengan barang yang lain atau sering disebut sebagai barang yang saling melengkapi (barang pelengkap). Contohnya adalah kaos kaki dan sepatu, pasta gigi dan gosok gigi, gas dan kompor gas dan sebagainya
 - b. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang fungsinya dapat saling menggantikan dengan barang yang lain. Barang ini dapat berupa barang yang sama bentuknya tetapi berbeda merek misalnya minyak goreng bimoli dan minyak goreng sanco, atau barang yang berbeda bentuknya tetapi fungsinya sama misalnya beras dengan singkong yang sama-sama memiliki kandungan karbohidrat yang bisa mengenyangkan jadi jika beras tidak ada maka singkong dapat menggantikan fungsi beras.

Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi

Banyak literatur yang menjelaskan bahwa masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kelangkaan yang disebabkan karena kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas, akan tetapi apabila dilihat dari kebutuhan manusia itu sendiri pada dasarnya tidak ada perubahan mulai zaman Nabi Adam, AS sampai di zaman modern

sekarang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, yang membedakannya adalah alat pemuas kebutuhannya yang mengalami perubahan karena perkembangan zaman, misalnya pada zaman dulu alat transportasi menggunakan tenaga kuda sekarang sudah ada alat transportasi seperti motor dan mobil, zaman dulu ketika orang membuat sebuah laporan dengan menggunakan mesin ketik tapi sekarang sudah ada komputer dan laptop yang lebih memudahkan dalam menghasilkan sebuah laporan.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi masalah ekonomi manusia sebagai seorang individu adalah bukan kebutuhan yang tidak terbatas tapi yang tidak terbatas itu adalah keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang mengalami perkembangan terus menerus dan untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan. Sehingga manusia harus dihadapkan pada masalah kemampuan untuk melakukan pemilihan (*problem of choice*) terhadap berbagai alat pemuas kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien agar mencapai kemakmuran hidup (Parera, 2020)

Pembahasan masalah ekonomi dari sisi yang dihadapi dalam setiap perekonomian adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga kemakmuran masyarakat terwujud. Menurut Rianto dan Amalia (2010), Oleh sebab itu, sebuah perekonomian harus mampu memecahkan/menjawab 4 pertanyaan dasar agar masalah ekonomi yang dihadapi bisa teratasi yaitu:

1. Apa (*What*)

Merupakan pertanyaan mengenai barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sebuah perekonomian dan juga berapa jumlah yang harus diproduksi sehingga dalam perekonomian tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya saja tetapi juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Kesalahan dalam menjawab pertanyaan ini akan berakibat pada kerugian karena barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam sebuah perekonomian. Kekurangan dan kelebihan jumlah produksi juga akan menyebabkan kerugian karena kegiatan produksi harus mengeluarkan sumber daya yang dimiliki.

2. Bagaimana (*How*)

Merupakan pertanyaan tentang bagaimana caranya proses produksi akan dilakukan? Maksud dari pertanyaan ini adalah mengenai pengambilan keputusan pilihan kombinasi penggunaan sumber daya apa saja yang dimiliki sebuah perekonomian, penggunaan teknologi seperti apa dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut yang diharapkan jangan sampai menimbulkan peningkatan pengangguran karena pemilihan produksi yang padat modal dibandingkan padat karya sehingga harus benar-benar dipertimbangkan keseimbangan penggunaan teknologi dalam kegiatan produksi.

3. Siapa yang memproduksi (*Who*)

Merupakan pertanyaan tentang siapa yang akan melakukan kegiatan produksi apakah dikelola oleh pemerintah ataukah dikelola oleh pihak swasta. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan ini oleh

sebuah perekonomian sangat penting karena ada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola sepenuhnya oleh pemerintah yang tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta karena tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh swasta adalah mendapatkan keuntungan sehingga harga yang ditetapkan harus mendatangkan keuntungan, sehingga barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut akan menjadi mahal yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang rendah.

4. Untuk siapa (*For Whom*)

Merupakan pertanyaan mengenai untuk siapakah barang dan jasa tersebut dihasilkan serta bagaimana cara pendistribusian produk yang dihasilkan tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini penting untuk menentukan tujuan konsumen yang akan menggunakan barang hasil produksi, apakah hanya untuk masyarakat yang ada dalam perekonomian tersebut atau ditujukan juga untuk masyarakat diluar dari perekonomian. Atau penentuan apakah barang yang dihasilkan tersebut untuk masyarakat umum atau untuk segmen masyarakat tertentu.

Sebuah perekonomian dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi adalah sebuah system yang terdiri dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bersinergi dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi dalam sebuah perekonomian. Adapun sistem ekonomi yang selama ini ada dan diterapkan dalam perekonomian (Mukhlis dan Suardi, 2020) terdiri dari:

1. Sistem ekonomi kapitalis

Merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk

melaksanakan kegiatan perekonomian seperti kegiatan produksi barang, distribusi, konsumsi dan lain sebagainya. Adapun ciri dari sistem ekonomi kapitalis adalah:

- a. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing
- b. Campur tangan pemerintah dibatasi
- c. Setiap produsen bebas menentukan jenis dan jumlah produksi barang
- d. Produksi dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya
- e. Harga barang dibentuk oleh pasar bebas

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ketika dihadapkan pada pemecahan masalah ekonomi sebuah perekonomian yang menganut sistem ekonomi kapitalis maka sepenuhnya diserahkan kepada individu dalam perekonomian artinya mengenai apa, berapa jumlah, bagaimana barang diproduksi serta diperuntukan bagi siapa barang tersebut diproduksi sepenuhnya diserahkan kepada individu-individu dalam perekonomian yang memiliki modal yang besar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin.

2. Sistem ekonomi sosialis

Merupakan sistem perekonomian dengan didominasi oleh campurtangan pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi, serta hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti tanah, air, listrik, telekomunikasi, gas dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis adalah :

- a. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara
- b. Seluruh kegiatan ekonomi milik negara, sehingga tidak ada yang namanya perusahaan swasta
- c. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang yang diproduksi ditentukan oleh pemerintah
- d. Harga-harga dan penyaluran barang ditentukan oleh pemerintah
- e. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ketika perekonomian yang menganut sistem ekonomi sosialis memecahkan masalah ekonomi semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat baik dalam menentukan jenis dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya serta kepada siapa barang tersebut akan disalurkan.

3. Sistem ekonomi islam

Merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma dan qiyas dimana sistem ini merupakan bagian dari keseluruhan dari ajaran islam yang komprehensif. Karakteristik sistem ekonomi islam:

- a. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat dan bukan merupakan kepemilikan terhadap barang yang digunakan untuk hajat hidup orang banyak
- b. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing

- c. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia
- d. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih
- e. Melarang praktik penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga
- f. Melarang praktik asosiasi (mal-bisnis)

Berdasarkan penjelasan sistem ekonomi islam di atas, maka ketika sebuah perekonomian memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi dengan sistem ekonomi islam adalah dengan melihat kepada konsep kepemilikan dalam islam (Huda dan Nasution, 2018) yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, dimana kepemilikan individu diakui sepanjang bukan menguasai barang dan jasa yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak jadi individu diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi barang-barang keperluan sehari-hari misalnya produksi sabun, kursi, rumah, pakaian dan sebagainya sepanjang bukan barang-barang public seperti air, hutan, energi dimana hal tersebut dipandang sebagai kepemilikan umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Ada juga kepemilikan negara yaitu harta yang dimiliki oleh negara berupa harta rampasan perang, infaq, zakat dan sedekah yang disimpan dalam baitul mal dan dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan masyarakat.

Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehingga tercapai kemakmuran. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut terdiri dari:

1. Produksi

Produksi adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau kegiatan yang menciptakan sesuatu mempunyai nilai guna atau manfaat. Produksi mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang menyebabkan suatu barang yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersedia. Contoh kegiatan produksi ini adalah mengolah kayu menjadi kursi dan lemari, mengolah pisang menjadi jajanan pisang goreng juga dapat dikatakan sebagai kegiatan produksi sederhana yang sering kita jumpai disekitar kita. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen

Kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan input yang dapat diproses, input tersebut dinamakan faktor-faktor produksi. Pengertian dari faktor-faktor produksi adalah sumber daya ekonomi yang diperlukan sebagai input dalam proses produksi yang menghasilkan output berupa barang dan jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Ada 4 faktor-faktor produksi yaitu:

a. Sumber daya alam

Sumber daya alam adalah bahan baku yang telah disediakan di alam sebagai bahan mentah yang akan dimasukkan dalam proses produksi menjadi barang jadi yang diperlukan manusia untuk

memenuhi kebutuhannya. Contoh sumber daya alam diantaranya adalah tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, bahan tambang.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang berperan dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah karyawan pabrik.

c. Modal

Modal adalah uang yang tersedia untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Modal disini juga bisa diartikan sebagai barang modal yaitu peralatan yang digunakan untuk dapat menghasilkan barang jadi atau bisa juga dikatakan sebagai teknologi, misalnya adalah mesin di pabrik.

d. Kewirausahaan

Keahlian wirausawan merupakan faktor produksi yang berperan sebagai orang yang mempunyai keahlian mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal sehingga tercipta proses produksi yang berjalan lancar dibawah pengaturannya.

2. Konsumsi

Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan memakai barang hasil produksi dan atau sebagai kegiatan menghabiskan nilai guna dari suatu barang dan atau sebagai kegiatan menggunakan nilai manfaat yang ada dalam suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Peran konsumsi dalam kegiatan ekonomi

adalah sebagai kegiatan yang memanfaatkan hasil barang dari kegiatan produksi, apabila tidak ada kegiatan konsumsi maka barang hasil produksi akan menimbun dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang telah memproduksinya. Sehingga biasanya sebelum melakukan kegiatan produksi ada baiknya produsen terlebih dahulu untuk survei pasar terlebih dahulu agar diketahui apakah ada konsumen yang berminat terhadap barang yang dihasilkannya. Contoh kegiatan konsumsi adalah memakai pakaian yang dibeli di pasar, memakan pisang goreng yang dibeli di warung jajanan dan sebagainya.

3. Distribusi

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi kepada konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Peran dari kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi sangat penting karena konsumen tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya jika barang yang merupakan kebutuhan hidupnya tidak sampai ke tangannya atau tidak tersedia dipasar, dan bagi produsen sangat diperlukan dalam menyalurkan hasil barang yang telah diproduksinya agar dapat laku terjual sehingga dapat mengalirkan pendapatan bagi produsen. Contoh kegiatan distribusi adalah mengangkut hasil kebun ke pasar, gojek yang mengantarkan pesanan makanan yang dipesan pelanggan.

Pelaku Ekonomi

Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi baik berupa kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi dalam sebuah perekonomian (Dyana, 2019). Adapun pelaku ekonomi

yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam negeri (rumah tangga konsumen/RTK)

Rumah tangga konsumen adalah masyarakat dalam negeri yang terdiri dari individu-individu yang memakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang membelinya dipasar barang dengan uang dari penghasilan yang diperoleh dari penyediaan faktor-faktor produksi

2. Perusahaan (Rumah Tangga Produsen/RTP)

Rumah tangga produsen adalah perusahaan yang merupakan unit ekonomi yang dibentuk oleh wirausahawan dengan menggabungkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal dengan tujuan untuk memperoleh laba. Kegiatan RTP adalah sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang memberikan manfaat dan kepuasan pada masyarakat
- b. Menetapkan harga produk yang dijual sesuaidengan kualitasnya
- c. Meminimalkan biaya produksi yang akan membuat harga terjangkau sehingga sebagian masyarakat mampu membeli
- d. Membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah

3. Pemerintah

Rumah tangga pemerintah adalah pengatur dan penentu kebijakan pemerintahan suatu negara atau wilayah tertentu. Kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola kekayaan alam suatu negara
- b. Membangun perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak
- c. Membangun sarana dan prasarana transportasi
- d. Membangun rumah sakit
- e. Membangun sekolah

Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menyalurkan energy listrik melalui PLN
- b. Menyediakan jasa transportasi darat melalui PT. KAI, Perum Damri dan sebagainya
- c. Menyediakan jasa transportasi udara melalui PT. Garuda Indonesia
- d. Menyediakan jasa telepon melalui PT. Telkom Indonesia

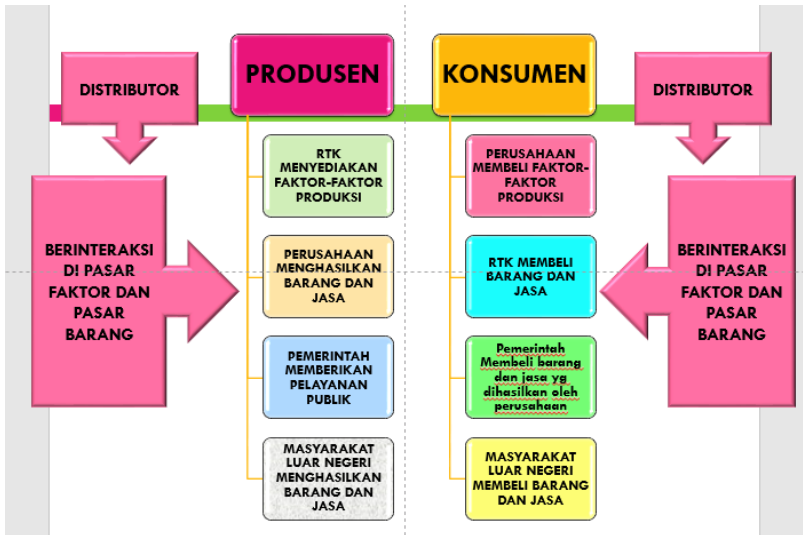
Kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan belanja negara untuk kepentingan negara
- b. Membayar gaji pegawai pemerintah dan tenaga ahli.

4. Masyarakat luar negeri

Masyarakat luar negeri adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang melakukan transaksi dalam sebuah perekonomian dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Dengan adanya kegiatan ekspor menyebabkan adanya aliran uang masuk ke dalam negeri yang akan menambah devisa negara, semakin tinggi kegiatan ekspor maka semakin besar cadangan

devisa sebuah negara yang akan memperkuat nilai kurs valuta asing sebuah negara.



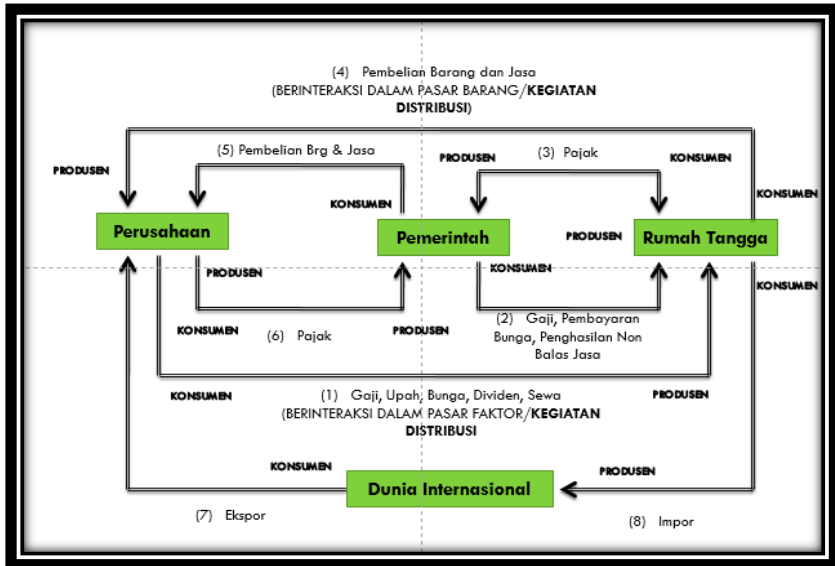
Gambar 3.1

Peran 4 Pelaku Ekonomi Dalam Kegiatan Ekonomi

Berdasarkan gambar 3.1 di atas dapat dilihat peran dari masing-masing 4 pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang saling berinteraksi pada 2 pasar yaitu:

1. Pasar faktor yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang diperlukan perusahaan dalam melakukan proses produksi. Ketika berinteraksi di pasar faktor 4 pelaku ekonomi masing-masing mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. Rumah Tangga Konsumen (masyarakat dalam negeri) berperan sebagai produsen yang menyediakan dan menawarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan *skill* kewirausahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses produksi
 - b. Perusahaan berperan sebagai konsumen yang melakukan permintaan terhadap faktor-faktor produksi yang ditawarkan oleh RTK

- c. Pemerintah berperan sebagai produsen yang menyediakan kebutuhan hajat hidup orang banyak dalam sebuah perekonomian dalam bentuk pelayanan publik
 - d. Masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen ketika terjadi kegiatan impor yaitu sebuah perekonomian membeli barang yang dihasilkan oleh masyarakat luar negeri
2. Pasar Barang yaitu pasar yang menyediakan barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi oleh perusahaan yang diperlukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika berinteraksi di pasar barang 4 pelaku ekonomi masing-masing mempunyai peran sebagai berikut:
- a. RTK berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - b. Perusahaan berperan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen RTK masyarakat dalam negeri, pemerintah maupun masyarakat luar negeri
 - c. Pemerintah berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam melayani masyarakat
 - d. Masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam negeri yaitu adanya kegiatan ekspor bagi sebuah perekonomian.



Gambar 3.2
Siklus Aliran Pendapatan dan Kegiatan Ekonomi
oleh 4 Pelaku Ekonomi

Berdasarkan gambar3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa setiap interaksi yang terjadi baik di pasar faktor maupun di pasar barang akan menimbulkan aliran pendapatan dan pengeluaran bagi 4 pelaku ekonomi, berikut ini penjelasannya sesuai dengan urutan angka dalam gambar:

1. Aliran 1 merupakan aliran pendapatan bagi RTK yang telah menerima balas jasa dari perusahaan berupa gaji dan upah untuk penyediaan tenaga kerja, balas jasa berupa bunga dan dividen karena sudah menyediakan modal, balas jasa berupa sewa karena sudah menyediakan sumber daya alam berupa tanah dan keuntungan karena sudah menyediakan keahlian wirausahawan.
2. Aliran 2 merupakan aliran pendapatan bagi RTK berupa gaji karena bekerja sebagai aparatur negara, pembayaran bunga karena RTK membeli surat berharga yang dijual pemerintah, penghasilan non

balas jasa berupa pensiun dan beasiswa yang semuanya dibayarkan oleh pemerintah kepada RTK

3. Aliran 3 dan 6 merupakan aliran pendapatan bagi pemerintah karena RTK dan perusahaan membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara
4. Aliran 4 dan 5 merupakan pendapatan bagi perusahaan karena RTK dan pemerintah membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Aliran 7 merupakan pendapatan bagi perusahaan karena telah menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri melalui kegiatan ekspor.
6. Aliran 8 merupakan pendapatan bagi masyarakat luar negeri karena menjual barang atau jasa kepada masyarakat dalam negeri RTK melalui kegiatan impor.

Daftar Pustaka

- Dyana, S. 2019. Cara Cepat Menguasai Ekonomi SMA/MA. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Fauzia, I. Y dan Riyadi, A. K. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Kencana: Prenadamedia Group. Jakarta
- Huda, N dan Nasution, M.E. 2018. Ekonomi Makro Islam. Kencana: Prenadamedia Group. Jakarta
- Mukhlis dan Suardi, D. 2020. Pengantar Ekonomi Islam. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Pantas, P. E, 2021. Dasar-Dasar Mikroekonomi Islam. UAD PRESS. Yogyakarta
- Parera, A. 2020. Pengantar Ilmu Ekonomi. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Rianto, M. N dan Amalia, E. 2010. Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Kencana: Prenadamedia Group. Jakarta
- Septiana, A. 2016. Pengantar Ilmu Ekonomi Dasar-Dasar Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Duta Media Publishing. Jawa Timur

Profil Penulis**Enny Kartini, M.Pd.**

Lahir pada tanggal 21 April 1981 di Banjarmasin. Gelar Sarjana Pendidikan (S1) yang diperoleh dari Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) unlam Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Ekonomi pada tahun 2003. Gelar Magister Pendidikan (S2) diperoleh dari Universitas Lambung Mangkurat Jurusan Manajemen Pendidikan pada tahun 2010. Menjadi tenaga pengajar pada IKIP PGRI Kalimantan Timur pada Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi sejak tahun 2005 sampai sekarang. Matakuliah yang pernah diampu adalah Dasar-Dasar Akuntansi, Akuntansi Koperasi, Manajemen Keuangan, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro dan Makro, Manajemen Sumber Daya. Penulis sering mengadakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan kemampuan menyusun laporan keuangan berdasarkan proses akuntansi.

Email: ennykartini@ikipgrikaltim.ac.id

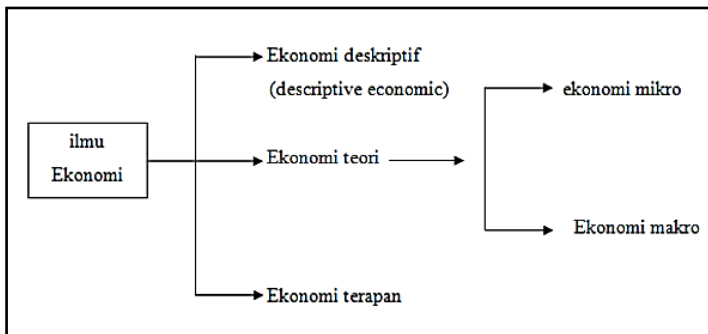
ILMU EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Pendahuluan

Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang sudah familiar bagi masyarakat. Setiap hari kita pasti melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi baik itu sebagai produsen, konsumen, atau bahkan distributor. Secara definisi ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Namun akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana pembagian ilmu ekonomi itu sendiri. Pada gambar 4.1 kita akan melihat bagaimana pembagian dari ilmu ekonomi.



Gambar 4.1. Pembagian Ilmu Ekonomi (Priyono, 2016)

Ilmu ekonomi sejatinya terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, ada yang dikatakan sebagai ekonomi deskriptif yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang secara nyata menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Bagian kedua yaitu ekonomi teori, dimana dalam ekonomi teori menjelaskan bagaimana keterkaitan antara variable ekonomi baik dalam sudut pandang ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan, yaitu bagian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan yang perlu diterapkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang ada.

Ruang Lingkup Ekonomi Mikro

Dalam ilmu ekonomi mikro dipelajari aktivitas-aktivitas dari individu, baik itu individu orang, individu perusahaan, individu rumah tangga, dan juga individu industry (Nuraini, 2016). Aktivitas yang dimaksud dalam ekonomi mikro yaitu:

1. Mempelajari tentang perilaku orang dalam perannya sebagai konsumen, produsen, serta pemilik sumber-sumber ekonomi.
2. Mempelajari tentang arus barang/jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen.
3. Mempelajari tentang proses terbentuknya harga suatu barang/jasa.
4. Mempelajari bagaimana produsen menentukan jumlah produksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal.
5. Mempelajari bagaimana konsumen dapat mencapai kepuasan maksimum dengan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas untuk barang/jasa yang dibutuhkan.

Permintaan, Penawaran, dan Harga Keseimbangan

Pada konteks ekonomi mikro, proses pembentukan harga pasar atau biasa disebut sebagai harga keseimbangan sangat terkait dengan permintaan dan penawaran barang/jasa. Permintaan (*demand*) merupakan sejumlah barang/jasa yang diminta oleh konsumen ke produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Dengan begitu kita dapat membaca bahwa harga barang (P) merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan permintaan suatu barang (Q). Keterkaitan antara harga dan permintaan ini dijelaskan dalam *law of demand* (Hukum Permintaan) yang berbunyi jika harga suatu barang/jasa turun maka permintaan barang/jasa tersebut akan bertambah, sebaliknya jika harga barang naik maka permintaan barang/jasa tersebut akan berkurang dengan asumsi *ceteris paribus*.

Jika ditinjau dari aspek daya beli maka permintaan seseorang terhadap barang/jasa terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Permintaan Efektif, yaitu permintaan individu terhadap suatu barang/jasa yang disertai dengan adanya daya beli atau kemampuan membayar.
2. Permintaan Potensial, yaitu permintaan terhadap suatu barang/jasa yang diikuti dengan daya beli/kemampuan membayar tetapi belum melakukan pembelian.
3. Permintaan Absolut, yaitu permintaan terhadap suatu barang/jasa yang tidak disertai dengan daya beli/kemampuan membayar.

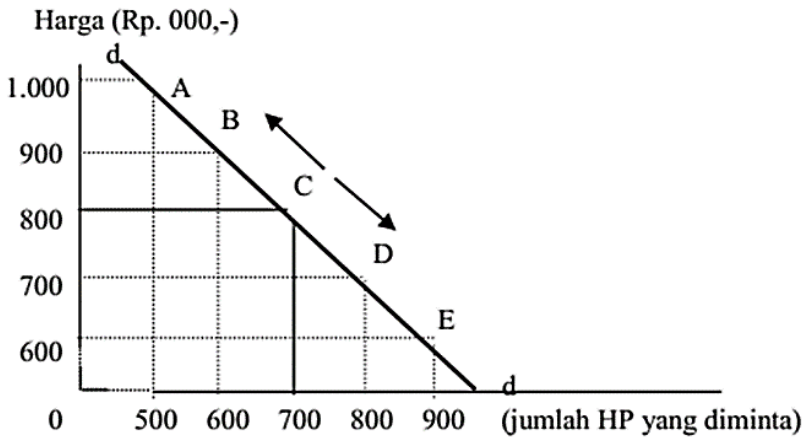
Pada hukum permintaan telah disebutkan bahwa naik atau turunnya harga barang dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya permintaan konsumen terhadap suatu barang/jasa dengan asumsi *ceteris paribus* atau faktor lain yang berpengaruh terhadap

permintaan selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Faktor-faktor lain yang dimaksud adalah faktor harga barang lain yang terkait baik itu sifatnya barang substitusi atau komplementer, faktor pendapatan konsumen, faktor selera, faktor jumlah penduduk, dan faktor ekspektasi harga dimasa depan (Kurniawan, 2015). Selanjutnya mari kita lihat bagaimana bentuk kurva permintaan. Kurva permintaan sendiri merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan kuantitas barang pada berbagai tingkat harga. Namun sebelum melihat kurva permintaan mari kita lihat dulu daftar permintaan pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1: Daftar Permintaan HP Pada Berbagai Tingkat Harga (Hanani, 2011)

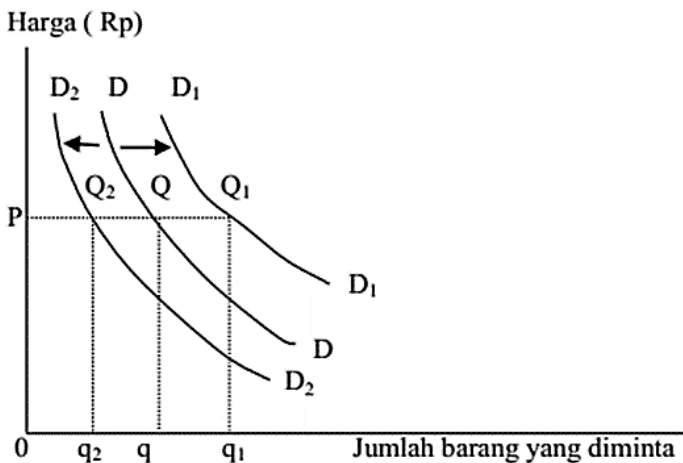
Kondisi	Harga (Rupiah)	Jumlah (Unit)
A	1.000.000	500
B	900.000	600
C	800.000	700
D	700.000	800
E	600.000	900

Terlihat pada tabel 4.1 saat harga HP Rp.1.000.000 maka kuantitas HP yang dibeli juga hanya 500 unit. Pada saat harga HP tersebut turun menjadi Rp.800.000 kuantitas HP yang diminta bertambah menjadi 700 unit. Kemudian kuantitas HP yang diminta kembali bertambah jumlahnya saat harga HP turun menjadi Rp.600.000. Kondisi yang terjadi pada tabel 2.1 ini membuktikan apa yang disebutkan oleh hokum permintaan bahwa ketika harga barang turun maka kuantitas barang yang diminta bertambah, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya berdasarkan data yang ada pada tabel 4.1 kita lihat bentuk kurva permintaannya pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Kurva Permintaan HP (Hanani, 2011)

Kurva permintaan memiliki arah pergerakan dari kiri atas menuju kanan bawah. Pada kurva permintaan pergerakan harga dan kuantitas barang berbanding terbalik karena pada saat harga barang turun kuantitas barang bertambah dan sebaliknya sehingga kurva permintaan dikatakan ber-slope negatif. Kurva permintaan dapat mengalami pergeseran posisi seperti yang tampak pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Pergeseran Kurva Permintaan (Hanani, 2011)

Pergeseran kurva dapat terjadi ketika adanya perubahan pada salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Pergeseran kurva kearah kanan (D ke D1) menandakan adanya perubahan positif pada faktor yang mempengaruhi permintaan. Sedangkan arah pergeseran kearah kiri (D ke D2) menandakan adanya perubahan negatif pada faktor yang mempengaruhi permintaan.

Setelah membahas mengenai permintaan maka selanjutnya akan dibahas tentang penawaran. Transaksi pasar dapat terwujud jika adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Penawaran (*supply*) merupakan sejumlah barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jika pada permintaan kita melihat dari sisi konsumen maka pada penawaran kita melihat dari sudut pandang produsen sebagai penyedia barang/jasa. Seperti halnya pada permintaan, dalam penawaran pun terdapat hukum penawaran yang berlaku. Bunyi hukum penawaran yaitu jika harga suatu barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan produsen bertambah, sebaliknya saat harga barang turun maka jumlah yang ditawarkan berkurang dengan asumsi *ceteris paribus*. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penawaran selain harga barang itu sendiri yaitu:

1. Harga barang yang terkait (barang substitusi dan barang komplementer)
2. Biaya Produksi
3. Teknologi
4. Pajak
5. Tujuan produksi

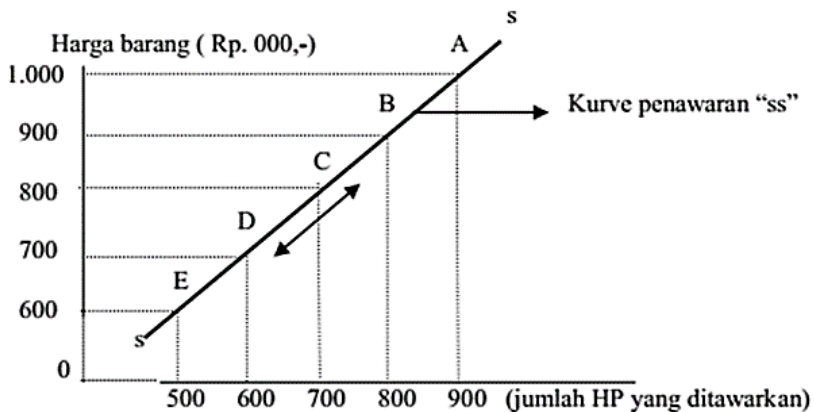
Daftar penawaran merupakan tabel yang berisi tentang data penawaran suatu barang pada berbagai tingkatan harga. Daftar penawaran inilah yang kemudian akan kita

jadikan acuan dalam membuat kurva penawaran suatu barang.

Tabel 4.2: Daftar Penawaran HP Pada Berbagai Tingkat Harga (Hanani, 2011)

Kondisi	Harga (Rupiah)	Jumlah (Unit)
A	1.000.000	900
B	900.000	800
C	800.000	700
D	700.000	600
E	600.000	500

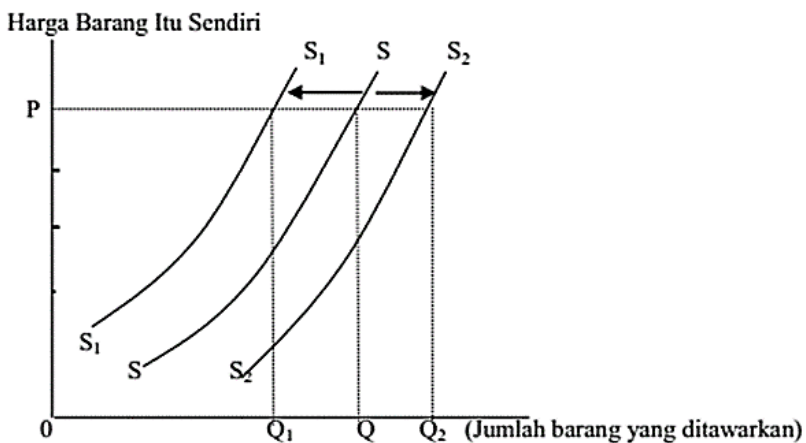
Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat pada saat harga barang Rp.600.000 jumlah unit HP yang ditawarkan hanya sebanyak 500 unit. Kemudian pada saat harga barang mengalami kenaikan menjadi Rp.800.000 jumlah yang ditawarkan juga ikut bertambah menjadi 700 unit. Begitu pun seterusnya ketika kenaikan harga terus terjadi maka akan diikuti dengan bertambahnya unit yang ditawarkan. Kurva penawaran dari data pada daftar penawaran ditabel 4.2 dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini.



Gambar 4.4 Kurva Penawaran Barang (Hanani, 2011)

Berbeda dengan kurva permintaan, pada kurva penawaran arah pergerakannya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Pada kurva penawaran pergerakan antara harga dan kuantitas searah dimana ketika harga naik maka kuantitas yang ditawarkan bertambah begitupun sebaliknya sehingga pada kurva penawaran slopenya bersifat positif. Pergeseran kurva penawaran dapat terjadi ketika adanya perubahan pada faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga barang itu sendiri yang membuat kurva dapat bergeser seperti pada gambar 4.5 tentang pergeseran kurva penawaran.

Pergeseran kurva penawaran kearah kanan (S ke S_2) merupakan akibat dari adanya perubahan positif pada faktor yang mempengaruhi penawaran. Sebaliknya pada posisi kurva penawaran bergeser kearah kiri (S ke S_1) menandakan adanya perubahan negatif pada faktor yang mempengaruhi penawaran. Sehingga dapat diketahui bahwa baik kurva permintaan maupun kurva penawaran dapat mengalami pergeseran pada saat harga barang tetap.

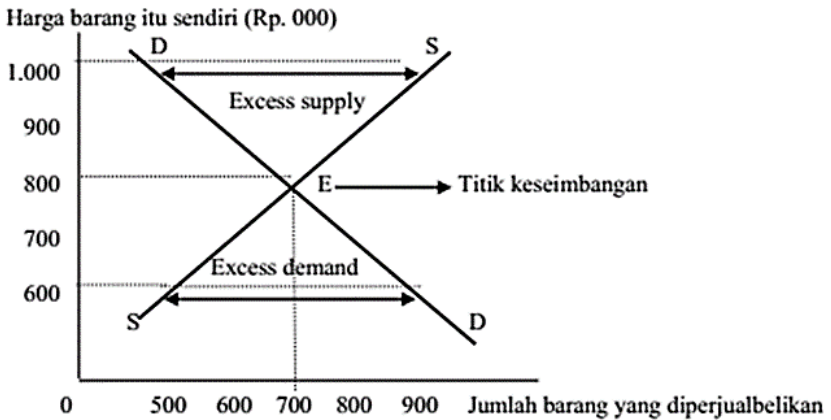


Gambar 4.5 Pergeseran Kurva Penawaran (Hanani, 2011)

Permintaan dan penawaran merupakan faktor penting untuk terbentuknya harga pasar atau harga

keseimbangan. Harga keseimbangan merupakan suatu harga yang disepakati oleh produsen dan konsumen dimana jumlah permintaan (Q_d) dan jumlah penawaran (Q_s) sama banyaknya (Khusaini, 2013). Dalam hal menentukan harga keseimbangan (*equilibrium*) terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode tabel, metode kurva, serta metode matematis.

Metode tabel merupakan salah satu metode untuk menentukan harga keseimbangan dengan cara menggabungkan tabel daftar permintaan dan penawaran. Metode kurva dalam menentukan dan melihat harga keseimbangan dapat dilakukan dengan menggabungkan antara kurva permintaan dan kurva penawaran sehingga akan terlihat adanya titik potong antar kedua kurva tersebut. Titik potong itulah yang disebut sebagai titik dimana jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama banyaknya pada satu harga tertentu. Dengan menggunakan metode ini juga kita dapat melihat kapan terjadinya kelebihan permintaan (*excess demand*) dan kelebihan penawaran (*excess supply*). Pada gambar 4.6 dapat kita lihat dengan mudah pada jumlah Q_d dan Q_s berapa harga keseimbangan tercipta. Metode terakhir yang dapat digunakan yaitu metode matematis yakni dengan menggunakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kemudian akan dicari nilai harga keseimbangannya. Selanjutnya nilai dari harga yang sudah ditemukan dimasukkan kembali kedalam fungsi permintaan dan penawaran untuk mencari pada jumlah Q_d dan Q_s berapa harga keseimbangan itu tercipta.



Gambar 4.6 Kurva Harga Keseimbangan (Hanani, 2011)

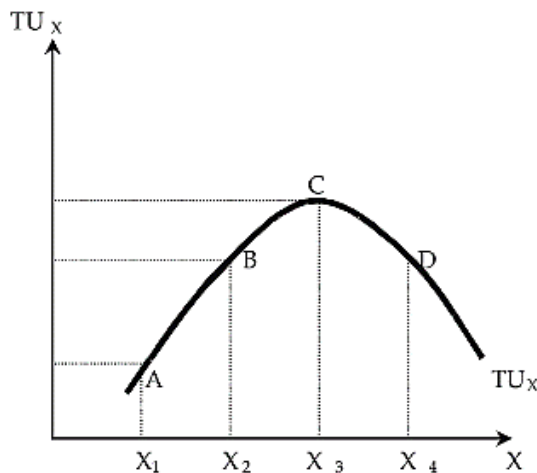
Perilaku Konsumen dan Produsen

Perilaku seorang manusia atau dalam hal ini konsumen sangat kompleks sehingga untuk dapat memahaminya diperlukan abstraksi yang kuat (Kennedy, 2017). Teori perilaku konsumen merupakan penjelasan tentang bagaimana upaya konsumen dalam mengalokasikan pendapatan antara barang/jasa yang berbeda dalam memaksimalkan kesejahteraan. Menurut Pindyck (2009) setidaknya ada 3 cara dalam memahami perilaku konsumen yaitu:

1. Preferensi konsumen.
2. Keterbatasan anggaran.
3. Pilihan-pilihan konsumen.

Dalam teori perilaku konsumen ada yang dikenal dengan pendekatan kepuasan marginal (*marginal utility*). Suatu barang akan bernilai bagi seseorang ketika orang tersebut merasakan manfaat dari barang tersebut (Nuraini, 2016). Kepuasan marginal berarti tambahan ataupun pengurangan kepuasan yang disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan konsumsi satu unit barang. Sedangkan yang dimaksud dengan kepuasan

total (*total utility*) yaitu kepuasan yang dirasakan oleh konsumen setelah mengonsumsi barang-barang dalam suatu periode. Pada perilaku konsumen ada teori yang mengatakan bahwa ketika seseorang menambah konsumsinya terhadap barang atau jasa secara terus menerus akan membuat tambahan *utility* yang diperoleh akan semakin sedikit (*law of diminishing marginal benefit*). Hubungan antara kuantitas barang yang dikonsumsi dengan *total utility* secara grafis dapat dilihat pada gambar 4.7.

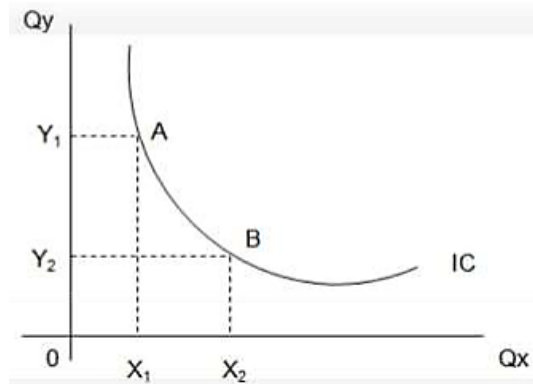


Gambar 4.7.

Kurva Kepuasan Total (*Total Utility*) (Nuraini, 2016)

Seperti yang tampak pada gambar 4.7 di atas terlihat pada saat konsumen menambah konsumsinya terhadap barang X dari X₁ ke X₂ maka konsumen memperoleh tambahan kepuasan (*utility*). Begitu juga saat konsumen menambah lagi konsumsinya dari X₂ ke X₃, konsumen masih memperoleh tambahan kepuasan. Namun pada saat konsumen menambah lagi konsumsi terhadap barang X sebanyak X₄ maka akan menurunkan utilitas konsumen terhadap barang X. Sehingga kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen terdapat pada titik C saat kuantitas barang X yang dikonsumsi sebanyak X₃.

Dalam teori ordinal, nilai kegunaan itu tidak dapat dihitung tetapi dapat dibandingkan (Rahardja, 2006). Pada teori ordinal ini digunakan kurva indiferensi atau biasa disebut *indifference curve*. Kurva tersebut menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi atas dua jenis barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang sebanding/sama.



Gambar 4.8 Indifference Curve (Kennedy, 2017)

Teori perilaku produsen merupakan teori tentang bagaimana tingkah laku para produsen dalam menghasilkan suatu produk dan berusaha untuk memperoleh efisiensi dalam kegiatannya (Kennedy, 2017). Dalam analisis teori produksi ada yang dikenal dengan produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Dalam teori jangka pendek perusahaan mempunyai input tetap dan menentukan seberapa banyak input variable yang dipergunakan (Kennedy, 2017). Saat proses produksi, produsen harus menentukan 2 jenis keputusan yaitu:

1. Berapa output yang mesti diproduksi.
2. Berapa banyak dan dalam kombinasi yang seperti apa faktor-faktor produksi dipergunakan (Kennedy, 2017).

Ruang Lingkup Ekonomi Makro

Dalam ekonomi mikro pembahasannya terkait analisa kegiatan dan permasalahan ekonomi pada level ekonomi individual. Sedangkan dalam ekonomi makro yang dianalisis yaitu variable total seperti pendapatan nasional, investasi, tabungan, konsumsi, pengangguran, inflasi, dll. Buku berjudul *The general theory of employment, interest and money* yang ditulis oleh JM Keynes menandai lahirnya teori ekonomi makro. Pada umumnya tugas pengendalian pada ekonomi makro yaitu mengusahakan agar perekonomian bisa tumbuh secara seimbang (Priyono, 2016). Secara umum terdapat 4 persoalan pokok dalam ekonomi makro yaitu masalah inflasi, pengangguran, masalah keseimbangan neraca pembayaran, dan masalah pertumbuhan ekonomi.

Masalah Inflasi

Secara definisi, inflasi adalah suatu kondisi dimana harga mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus (Curatman, 2010). Tingkat inflasi menjadi indikator ketidakstabilan kegiatan ekonomi dan dengan tingginya tingkat inflasi pemerintah dinilai tidak berhasil membuat pasar uang dan pasar barang stabil (Nainggolan et al, 2021). Inflasi bisa menjadi sesuatu yang tidak terlalu berbahaya jika kondisi tersebut diiringi tersedianya komoditi yang dibutuhkan secara cukup dan disertai naiknya daya beli masyarakat lebih tinggi dari tingkat inflasi (Putong, 2015). Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan sumber, penyebab, serta tingkat keparahannya. Jika dilihat dari sumbernya inflasi terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi jenis ini terjadi akibat kuantitas suatu barang/jasa mengalami penurunan sedangkan permintaan terhadap barang/jasa tersebut tetap.

2. Inflasi dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi ini terjadi dari perdagangan luar negeri dimana ada harga barang yang mengalami kenaikan diluar negeri.

Kemudian jenis-jenis inflasi jika dilihat dari penyebab terjadinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis inflasi yaitu:

1. *Demand pull inflation*. Inflasi yang terjadi karena jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah penawaran dari produsen.
2. *Cost pull inflation*. Inflasi ini terjadi akibat naiknya biasa produksi sehingga membuat harga barang yang ditawarkan naik.
3. *Bottle neck inflation*. Inflasi yang terjadi dari campuran faktor penawaran dan permintaan.

Selanjutnya inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dapat dikategorikan menjadi 4 tingkat. Tingkatan inflasi yang dimaksud yaitu:

1. Inflasi ringan. Inflasi ini dapat dikatakan belum terlalu mengganggu perekonomian negara. Tingkat inflasi ringan ini berada di bawah 10%.
2. Inflasi sedang. Inflasi pada tingkat sedang ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Tingkat inflasinya berkisar antara 10%-30% dalam setahun.
3. Inflasi berat. Pada tingkat inflasi ini kondisi perekonomian suatu negara dapat terganggu. Pada kondisi ini masyarakat akan enggan untuk menabung yang dikarenakan tingkat suku Bunga jauh dibawah tingkat inflasi. Tingkat inflasi pada kategori ini berkisar antara 30%-100% pertahun.
4. Inflasi sangat berat (*Hyper Inflation*). Pada tingkat ini inflasi sulit untuk dikendalikan dan dapat merusak perekonomian suatu negara sekalipun kebijakan

fiskal dan moneter diterapkan. Inflasi ini dikisaran >100%.

Masalah Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi kajian dalam ekonomi makro. Pengangguran merupakan orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Pada dasarnya pengangguran terjadi karena adanya gap antara lapangan kerja yang tersedia dan jumlah orang yang mencari kerja. Berdasarkan sebab terjadinya, pengangguran terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

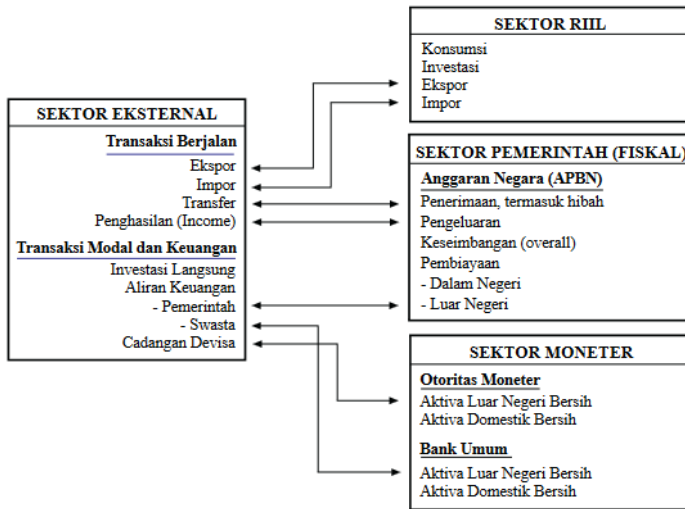
1. *Pengangguran Friksional*, Pengangguran ini bersifat sementara yang dikarenakan oleh informasi, waktu, dan kondisi geografis. Pengangguran ini terjadi karena para *job seeker* (Percari kerja) belum memenuhi syarat yang diminta oleh pembuka lowongan kerja.
2. *Pengangguran Struktural*, Pengangguran ini terjadi akibat dari adanya perubahan pada struktur ekonomi dalam jangka panjang.
3. *Pengangguran Konjungtural*, Pengangguran jenis ini disebabkan oleh turun naiknya siklus ekonomi.
4. *Pengangguran Siklikal*, Pengangguran jenis ini disebabkan oleh jumlah permintaan tenaga kerja lebih sedikit daripada penawaran tenaga kerja.
5. *Pengangguran Musiman*, Pengangguran jenis ini merupakan dampak dari fluktuasi ekonomi jangka pendek.
6. *Pengangguran Siklus*, Pengangguran yang disebabkan oleh lesunya kegiatan ekonomi akibat adanya resesi.

7. *Pengangguran Teknologi*, Pengangguran yang terjadi akibat digantinya tenaga manusia menjadi tenaga mesin.

Masalah Keseimbangan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran merupakan neraca yang berisi catatan mengenai transaksi antara negara yang satu dan negara lainnya dalam satu periode (Putong, 2015). Dalam neraca pembayaran berisi tentang bagaimana kondisi ekspor dan impor suatu negara. Apabila aktivitas impor suatu negara lebih besar maka akan membuat cadangan devisa terkuras dan berdampak pada melemahnya nilai tukar mata uang lokal. Kemudian pada kondisi aktivitas ekspor suatu negara lebih besar maka posisi mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang asing. Sehingga agar perekonomian dapat stabil sebisa mungkin neraca pembayaran ini harus seimbang. Cadangan devisa dapat ditingkatkan dengan 3 cara (Curatman, 2010) yaitu:

1. Melakukan aktivitas ekspor.
2. Mengundang investor asing untuk berinvestasi di suatu negara.
3. Pinjaman luar negeri.



Gambar 4.9.
Keterkaitan Neraca Pembayaran Dengan Perkembangan Sektor Riil, Fiskal dan Moneter (Sugiyono, 2002)

Dalam buku yang ditulis Sugiyono (2002) Suatu negara yang melakukan perdagangan luar negeri tentunya akan melakukan penyusunan neraca pembayaran yang memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran sector eksternal dalam perekonomian negara
2. Untuk mengetahui bagaimana aliran sumberdaya antara negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana perdagangan suatu negara dan struktur ekonomi.
4. Untuk mengetahui bagaimana utang luar negeri sebuah negara.
5. Untuk mengetahui bagaimana kondisi cadangan devisa negara.
6. Sebagai sumber informasi dan data dalam penyusunan *foreign exchange budget*.

7. Sebagai sumber data penyusunan statistik *national account*.

Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya barang dan jasa yang dihasilkan. Masalah pertumbuhan ekonomi ini merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Peningkatan pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) yang terjadi mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi (Curatman, 2010).

Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam terkait konsep pertumbuhan ekonomi. Teori yang dimaksud antara lain teori klasik, teori neo klasik, dan teori historis.

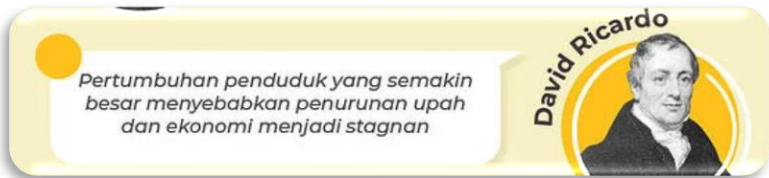
1. Teori Klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas R. Malthus)

Teori adam smith berpandangan bahwa pertambahan penduduk merupakan tumpuan dari pertumbuhan ekonomi karena pertambahan penduduk maka akan terjadi pertambahan output.



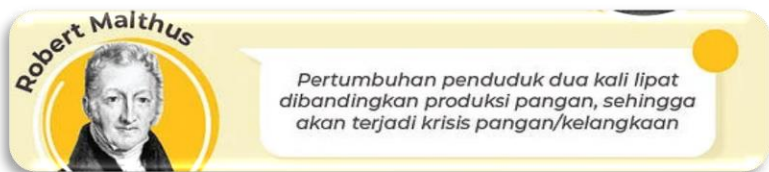
Sumber: ruangguru.com

Sedangkan teori david ricardo berpendapat bahwa pertambahan penduduk yang cepat akan membuat banyaknya tenaga kerja dikemudian hari dan dengan banyaknya tenaga kerja akan mendorong turunnya tingkat upah.



Sumber: ruangguru.com

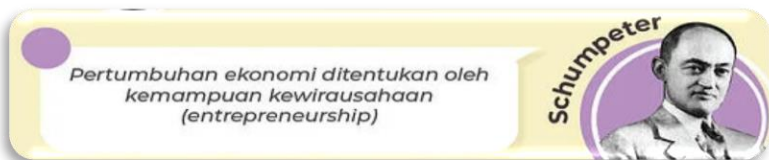
Teori dari malthus mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya krisis pangan.



Sumber: ruangguru.com

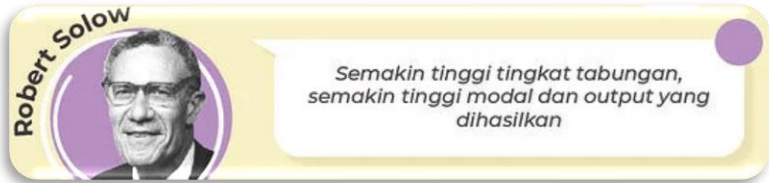
2. Teori Neo Klasik (Joseph Schumpeter, Robert M. Solow, Harrord Domar)

Menurut teori Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu negara akan terjadi jika para pengusaha yang ada didalamnya mampu berinovasi dan menghadirkan kombinasi baru atas investasi dan produksinya.

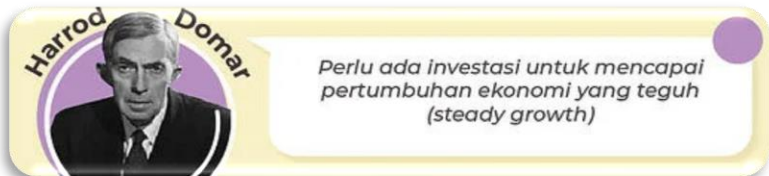


Sumber: ruangguru.com

Kemudian dalam teori solow berpendapat bahwa manusia, modal, teknologi modern dan output merupakan rangkaian faktor menuju pertumbuhan ekonomi.



Selanjutnya menurut teori harrod domar bahwa pemanfaatan modal harus dilakukan dengan efektif karena pembentukan modal sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

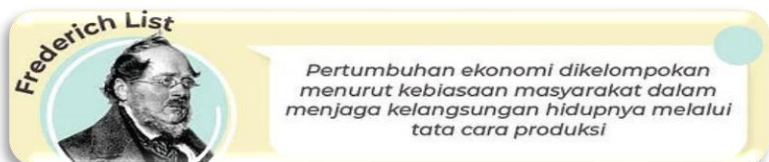


Sumber: ruangguru.com

3. Teori Histori (Frederich List, Warner Sombart, Walt Whitman Rostow, Bruno Hildebrand, Karl Bucher)

Pertumbuhan ekonomi menurut frederich list dikelompokkan berdasarkan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Pengelompokan tersebut yaitu:

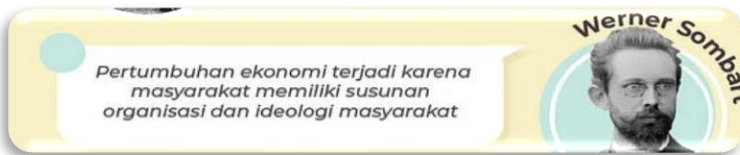
- a. Berburu dan mengembara.
- b. Beternak dan bertani.
- c. Bertani dan kerajinan.
- d. Kerajinan, industri, hingga perdagangan.



Sumber: ruangguru.com

Menurut Warner Sombart, susunan organisasi dan ideologi masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Menurut werner ada tiga zaman yang terjadi yaitu:

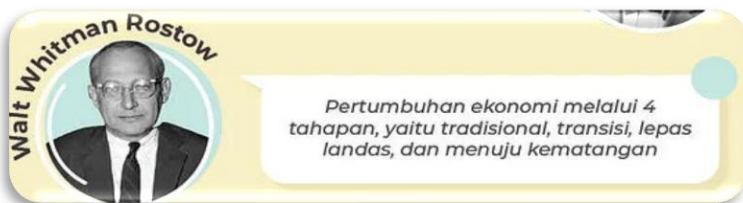
- a. Zaman perekonomian tertutup.
- b. Zaman kerajinan dan pertukaran.
- c. Zaman kapitalis.



Sumber: ruangguru.com

Selanjutnya menurut rostow, pertumbuhan ekonomi sebuah negara mengalami beberapa tahap yaitu:

- a. Tradisional.
- b. Transisi.
- c. Lepas landas.
- d. Menuju kematangan.
- e. Konsumsi tinggi.

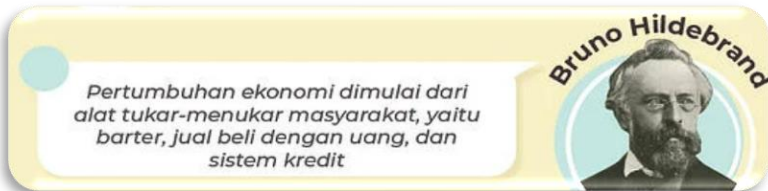


Sumber: ruangguru.com

Berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya, Bruno Hildebrand mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari perkembangan alat tukar yang

digunakan oleh masyarakat. Perkembangan alat tukar terbagi menjadi tiga tahap perkembangan yaitu:

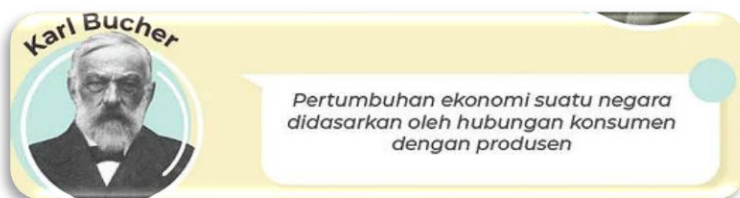
- a. Masa Barter (Tukar menukar barang).
- b. Masa Jual beli (Menggunakan uang).
- c. Masa tukar menukar dengan kredit.



Sumber: ruangguru.com

Teori selanjutnya dari Karl Bucher mengatakan bahwa dasar pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah hubungan produsen dan konsumen. Tahapan dalam teori ini terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. Rumah tangga tertutup.
- b. Rumah tangga kota.
- c. Rumah tangga kemasyarakatan.
- d. Rumah tangga dunia.



Sumber: ruangguru.com

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonominya (Todaro, 2005). Pertumbuhan ekonomi negara dapat dilihat

dari dua acara yakni *Gross National Product* (GNP) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan menggunakan rumus:

$$PE = \frac{GNP \text{ th sekarang} - GNP \text{ th yg lalu}}{GNP \text{ th yg lalu}} \times 100\%$$

Gross National Product (GDP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai produk barang/jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun baik itu penduduk negara tersebut yang ada didalam negeri maupun penduduk negara tersebut yang berkegiatan diluar negeri. Sedangkan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai produk barang/jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam satu negara per tahun termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang ada diwilayah negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Curatman, A. (2010). *Teori Ekonomi Makro*. Deepublish.
- Hanani, N., Asmara, R. dan Fahriyah, F. (2011). *Ekonomi Mikro*. Program Studi Agribisnis Universitas Brawijaya
- Kennedy, P. S. J. (2017). *Modul Ekonomi Mikro*. Program Studi Manajemen Universitas Kristen Indonesia.
- Khusaini, M. (2013). *Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori*. Universitas Brawijaya Press.
- Kurniawan, P., & Budhi, M. K. S. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Penerbit Andi.
- Nainggolan, L. E., Jingga, F., Hasibuan, F. A. P., Nasution, F. C., Angela, F., Sihombing, F., ... & Damanik, E. M. M. (2021). *Ekonomi Makro*. Yayasan Kita Menulis.
- Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. UMMPress.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2009). *Mikroökonomie*. Pearson Deutschland GmbH.
- Priyono, P., & Chandra, T. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Putong, I. (2015). *EKONOMI MAKRO: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Untuk Mahasiswa*. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong.
- Rahardja, P. & Manurung, M. (2006). *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2005). *Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga, Edisi 8*. Jakarta: Erlangga.

Sumber Internet:

<https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-pertumbuhan-ekonomi-dan-teori-teori-pendukungnya>

Profil Penulis



Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

Semasa di sekolah menengah atas penulis mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Penulis kemudian melanjutkan studi pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo pada tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Ekonomi pada Universitas Halu Oleo tahun 2016.

Penulis memiliki ketertarikan terhadap ekonomi kerakyatan. Beberapa tulisan penulis terkait ekonomi telah di muat di media online dan juga artikel ilmiah telah termuat di jurnal nasional. Selain meneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku terkait dengan bidang yang ditekuni baik berupa monograf maupun book chapter. Penulis berharap dapat terus berkarya melalui tulisan sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap penyebaran ilmu pengetahuan.

Email Penulis: muhammadsyaifuul@gmail.com.

PENGANTAR ILMU INVESTASI

Dr. (Cand) Aditya Wardhana, S.E., M.M., M.Si

Universitas Telkom

Pengertian Investasi

Investasi pada dasarnya merupakan upaya menghasilkan dana dari aset yang dimiliki. Hasil investasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti menambah penghasilan yang sudah ada, menabung untuk masa pensiun, atau memenuhi kewajiban tertentu tertentu seperti pembayaran kembali pinjaman, pembayaran biaya hidup, atau pembelian aset lainnya. Memahami investasi merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan upaya memilih instrumen investasi yang tepat guna memenuhi tujuan keuangan penanam modal atau investor (Hasanudin, Nurwulandari, dan Safitri, 2021; Abdullaevich, 2020; Purwohandoko, 2019; Mulyana, Hidayat, Puspitasari, 2019; Mike, 2006; Suherman, 2005).

Investasi dapat menghasilkan pendapatan bagi investor dalam dua cara. Pertama, jika investor berinvestasi dalam aset yang dapat dijual, maka investor dapat memperoleh penghasilan melalui keuntungan. Kedua, jika investasi dilakukan dalam rencana yang menghasilkan pengembalian, maka investor akan memperoleh penghasilan melalui akumulasi keuntungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa investasi adalah semua upaya yang terakit dengan bagaimana memasukkan nilai uang

investor ke dalam aset atau objek yang menjadi lebih berharga atau meningkat nilainya di masa depan dibandingkan dengan nilai awalnya atau yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan investor seiring dengan berjalannya waktu. Secara finansial, definisi investasi adalah aset yang diperoleh dengan tujuan memungkinkannya untuk terapresiasi nilainya dari waktu ke waktu (Hasanudin, Nurwulandari, dan Safitri, 2021; Abdullaevich, 2020; Purwohandoko, 2019; Mulyana, Hidayat, Puspitasari, 2019; Halim, 2015; Suherman, 2005).

Dalam investasi dikenal adanya risiko yaitu besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diperoleh dimana semakin besar penyimpangan berarti semakin besar risikonya (Abdullaevich, 2020; Mulyana, Hidayat, Puspitasari, 2019; Mulyati dan Murni, 2018). Hubungan antara tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah (Mulyana, Hidayat, Puspitasari, 2019; Mukherjee, 2010). Artinya, semakin besar tingkat pengembalian yang diharapkan maka semakin besar tingkat risiko yang ditanggung oleh investor (Hasanudin, Nurwulandari, dan Safitri, 2021; Fabozzi, 2000).

Investor Individu dan Investor Kelembagaan

Investor merupakan pihak yang berinvestasi yang dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu investor individu dan investor kelembagaan. Investor individual merupakan individu yang melakukan investasi, sedangkan investor kelembagaan berupa lembaga seperti korporasi, lembaga pemerintahan, koperasi, perusahaan asuransi, bank, lembaga simpan-pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Karakteristik atau ciri yang membedakan antara investor individu dengan

investor kelembagaan (Purwohandoko, 2019; Mulyana, Hidayat, Puspitasari, 2019; Suteja dan Gunardi, 2016; Mike, 2006; Suherman, 2005) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Investor individu memiliki ciri atau karakteristik yaitu: memahami risiko sebagai kehilangan uang, dilakukan secara personal, tujuan berinvestasi didasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut ketika menginvestasikan dananya, memiliki kebebasan dalam melakukan investasi, selalu mempertimbangkan beban pajak.
2. Investor kelembagaan memiliki ciri atau karakteristik yaitu: selalu mengedepankan pendekatan kuantitatif dan memahami risiko sebagai bentuk penyimpangan dari kondisi yang diharapkan, mempertimbangkan setiap karakter dari berbagai instrument investasi yang mampu memberikan keuntungan lebih dalam portofolio investasinya, tujuan berinvestasinya lebih detail dengan memeperhitungkan total aset dan kewajibannya, selalu mempertimbangkan berbagai hukum dan aturan yang berlaku termasuk isi dalam kontrak perjanjian, tidak menjadi pertimbangan utama ketika akan berinvestasi pada instrumen dana pensiun.

Jenis-Jenis Investasi

Dalam melakukan investasi, investor harus memahami tujuan investasi dan mengidentifikasi di mana harus berinvestasi (Mulyana, Hidayat, Puspitasari, 2019; Suteja dan Gunardi, 2016; Halim, 2015). Berikut ini adalah berbagai jenis investasi di Indonesia:

1. Saham. Investasi ini termasuk saham kepemilikan perusahaan di mana pun dan membantu investor untuk mendapatkan dividen sebagai imbalannya.

2. Obligasi. Investasi ini berarti meminjamkan uang investor ke lembaga atau pemerintah, di mana investor menerima bunga tetap secara berkala dan juga nilai nominal pada saat jatuh tempo.
3. Reksa Dana. Dalam investasi ini, dana dikumpulkan dari investor yang berbeda dan dimasukkan ke dalam obligasi atau saham perusahaan, yang dikelola oleh manajer investasi. Dalam memahami apa arti investasi dan tujuan investasi bagi investor, investor dapat memilih dana ekuitas atau dana utang yang tergantung pada kapasitas risiko yang dimiliki oleh investor.
4. *Unit Linked Insurance Plans* (ULIP) merupakan jenis investasi yang memberikan manfaat investasi dan asuransi jiwa. Sebagian dari uang yang diinvestasikan ke ULIP dialokasikan untuk investasi, yang berarti dalam rencana ini sebagian dari premi investor akan diinvestasikan dalam dana yang berbeda dan membantu investor mendapatkan pengembalian terkait pasar.

Pertimbangan Dalam Berinvestasi

Setelah investor mengetahui pengertian investasi dalam menciptakan kekayaan, maka hal berikutnya adalah memahami pertimbangan investor dalam memutuskan untuk berinvestasi (Purwohandoko, 2019; Suteja dan Gunardi, 2016; Situmorang, Andreas, dan Natariasari, 2014; Mike, 2006), yaitu

1. Analisis kebutuhan keuangan investor. Langkah awal adalah melakukan analisis situasi keuangan yang dimiliki oleh investor terkait dengan risiko yang dapat ditoleransi oleh investor, tujuan investor melakukan investasi, dan faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti ukuran keluarga, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, dan tujuan hidup. Investor

bahkan dapat meminta bantuan dari seorang profesional konsultan keuangan yang dapat membantu investor dalam mengklarifikasi keraguan tentang investasi dan mengidentifikasi pilihan investasi yang sesuai.

2. Diversifikasi investasi. Membangun portofolio keuangan yang terdiversifikasi sesuai dengan tujuan investor berinvestasi dengan menempatkan dana investor di instrumen investasi yang berbeda untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara risiko dan pengembalian.
3. Prioritaskan instrumen investasi yang menawarkan keamanan kepada investor. Seperti polis asuransi jiwa dengan *Unit Linked Insurance Plan* dan instrumen sejenis lainnya. Investor dapat mempertimbangkan tujuan investasi untuk menghasilkan pengembalian yang sesuai dari investasi yang dilakukannya.
4. Jangka waktu yang investor miliki sebelum mengubah investasi menjadi dana tunai. Jangka waktu menjadi elemen penting yang menentukan tujuan investasi investor tergantung pada kebutuhan investor sehingga investor dapat memilih dana jangka pendek atau jangka panjang.
5. Penilaian ulang berkala mengingat dana dipengaruhi oleh kekuatan pasar, maka sangat penting bagi investor untuk memantaunya secara berkala dan mempertimbangkan penyesuaian kembali jika portofolio investor tidak menghasilkan pengembalian yang baik.
6. Pilih berbagai rencana investasi yang ditawarkan yang menguntungkan investor tergantung pada tujuan investasi, waktu pengembalian investasi, keuntungan yang diperoleh, risiko yang dihadapi investor, besaran

dana yang diinvestasikan, kredibilitas lembaga investasi, dan lain sebagainya.

Tujuan Investasi

Sebelum investor memutuskan untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya pada salah satu dari banyak instrumen investasi yang tersedia di Indonesia, maka merupakan hal yang penting untuk memahami tujuan investasi. Abdullaevich (2020), Mulyana, Hidayat, Puspitasari (2019), Purwohandoko (2019), Tandelilin (2017), Halim (2015). menyatakan tujuan melakukan investasi dapat bervariasi dari satu investor ke investor lainnya, dimana tujuan menginvestasikan dana sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Agar dana tetap aman. Pelestarian modal merupakan salah satu tujuan utama investasi. Berbagai instrumen investasi membantu dalam menjaga kelestarian dana investor yang diperoleh dengan susah payah agar tidak terkikis oleh waktu. Dengan memarkirkan dana investor pada salah satu atau beberapa instrumen atau skema investasi, maka investor dapat memastikan kelestarian dananya dalam jangka panjang. Deposito, obligasi pemerintah, saham, emas, tanah, valuta asing, dan instrument investasi lainnya bahkan rekening tabungan dapat membantu menjaga keamanan dana investor walaupun tingkat pengembalian investasinya dapat bervariasi.
2. Untuk membantu pertumbuhan dana. Salah satu tujuan umum lainnya dari menginvestasikan dana adalah untuk memastikan bahwa dana itu bertumbuh atau berapresiasi menjadi dana yang cukup besar seringi perjalanan waktu. Apresiasi modal umumnya merupakan tujuan jangka panjang yang membantu investor mengamankan masa depan finansial mereka.

Untuk membuat dana yang dimiliki investor memperoleh pertumbuhan menjadi kekayaan, maka investor perlu mempertimbangkan berbagai instrument investasi yang menawarkan pengembalian yang signifikan atas jumlah dana awal yang diinvestasikan. Beberapa instrumen investasi terbaik untuk mencapai pertumbuhan yaitu *real estate*, reksa dana, komoditas emas, dan ekuitas. Risiko yang terkait dengan pilihan instrumen ini mungkin tinggi, tetapi pengembaliannya juga umumnya signifikan.

3. Untuk mendapatkan aliran pendapatan yang stabil. Investasi juga dapat membantu investor memperoleh sumber pendapatan primer maupun sekunder yang tetap. Contoh instrumen investasi tersebut termasuk deposito tetap yang membayar bunga reguler atau saham perusahaan yang membayar dividen investor secara konsisten dari waktu ke waktu.
4. Meminimalkan beban pajak. Selain pertumbuhan atau pelestarian modal, investor juga memiliki tujuan lain yang menarik untuk berinvestasi. Motivasi ini datang dalam bentuk manfaat pajak yang ditawarkan oleh pemerintah yang memiliki dampak terhadap pengurangan penghasilan kena pajak bagi investor sehingga menurunkan kewajiban pajak bagi investor.
5. Menabung untuk pensiun. Menabung untuk masa pensiun adalah suatu keharusan. Sangat penting untuk memiliki dana pensiun yang dapat investor gunakan kembali di tahun-tahun emas investor, karena investor mungkin tidak dapat terus bekerja selamanya. Dengan menginvestasikan uang yang Anda peroleh selama tahun-tahun kerja investor dalam opsi investasi yang tepat, investor dapat membiarkan dana investor tumbuh cukup untuk menopang investor setelah investor pensiun.

6. Untuk memenuhi tujuan keuangan. Berinvestasi juga dapat membantu investor mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka. Beberapa pilihan instrumen investasi memberikan periode penguncian yang singkat dan likuiditas yang tinggi. Investasi ini merupakan instrumen yang ideal untuk memarkir dana investor jika investor ingin berinvestasi dalam target pengembalian investasi dalam jangka pendek. Pilihan instrumen investasi lainnya dapat memberikan periode penguncian yang lebih lama yang sangat sesuai dalam berinvestasi untuk tujuan jangka panjang.

Kategori Investasi

Kategori investasi menurut Sandri, Samsiah, Bakaruddin, Rahmayanti, dan Ardi (2019), Halim (2015), Hadi (2013), Umar (2000) dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Investasi Kepemilikan. Investasi kepemilikan menunjukkan aset yang dibeli dan dimiliki oleh investor. Contoh jenis investasi ini antara lain saham, properti *real estate*, dan emas batangan. Mendanai bisnis juga merupakan jenis investasi kepemilikan.
2. Investasi Pinjaman. Ketika investor berinvestasi dalam instrumen pinjaman, investor pada dasarnya berperilaku seperti bank. Obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan bahkan rekening tabungan adalah contoh investasi pinjaman. Dana yang investor parkir di rekening tabungan pada dasarnya adalah pinjaman yang investor berikan kepada bank. Dana ini digunakan oleh bank untuk mendanai pinjaman yang diberikannya kepada nasabahnya.
3. Setara Kas merupakan investasi yang sangat likuid dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Instrumen pasar uang merupakan contoh yang sangat baik dari setara kas. Setara kas umumnya

menawarkan pengembalian yang rendah, namun risiko yang terkait dengannya juga rendah.

Sikap Investor Terhadap Risiko

Sandri, Samsiah, Bakaruddin, Rahmayanti, dan Ardi (2019), Sharpe, Alexander dan Bailey (1993) membedakan tiga jenis sikap investor terhadap risiko, yaitu:

1. Menghindari risiko (*risk averse*) yaitu investor yang cenderung menghindari instrument investasi yang cenderung berisiko dan cenderung memilih instrument investasi yang kurang mengandung risiko.
2. Suka menghadapi risiko (*risk seeker*). Investor yang cenderung memilih investasi yang mengandung risiko.
3. Acuh terhadap risiko (*risk neutral*). Investor yang tidak terlalu peduli pada jenis investasi mana yang akan diambil.

Dengan adanya beberapa jenis sikap investor dalam menghadapi risiko, maka pengambilan sebuah keputusan investasi yang dilakukan oleh investor akan sangat dipengaruhi oleh sikap yang dimilikinya dalam menghadapi risiko. Apabila seorang investor memiliki sikap menghindari risiko, maka investor tersebut akan memilih investasi yang berisiko rendah. Demikian sebaliknya, apabila seorang investor memiliki sikap suka menghadapi risiko, maka investor tersebut akan memilih investasi yang berisiko tinggi.

Manajemen Portofolio Investasi

Portofolio investasi merupakan sekumpulan instrumen investasi yang dibentuk untuk memenuhi tujuan investasi. Tujuan dari portofolio investasi akan sangat tergantung pada masing-masing investor. Untuk membentuk suatu portofolio investasi, maka sebagai tahapan-tahapan yang harus dilakukan menurut

Mulyana, Hidayat, Puspitasari (2019), Hartono (2014), Haugen (2001), Umar (2000) adalah sebagai berikut ini:

1. Memilih instrumen investasi yang diinginkan dengan melakukan berbagai analisis dari setiap karakter instrumen investasi.
2. Menentukan bobot dari setiap instrumen investasi terhadap nilai portofolionya secara keseluruhan.
3. Menentukan horison investasi
4. Menentukan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan dari setiap instrumen investasi sesuai dengan horison investasi
5. Menentukan rata-rata tingkat pengembalian investasi yang diharapkan dari portofolio dalam horison investasi.
6. Menghitung standar deviasi tingkat pengembalian investasi yang diharapkan dari portofolio.

Untuk memperoleh portofolio investasi yang baik harus dilakukan berbagai perbandingan, misalnya dengan memberikan pembobotan yang berbeda guna melihat hasil tingkat pengembalian investasi yang diharapkan adalah optimum. Portofolio yang memberikan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan yang rata-rata tertinggi dan standar deviasi yang terendah atau memiliki tingkat risiko yang lebih rendah akan menjadi pilihan. Di samping itu, diperlukan pembandingan dengan pilihan portofolio investasi yang lainnya juga agar diperoleh tingkat pengembalian investasi yang diharapkan yang optimum (Hartono, 2014).

Dalam membentuk portofolio investasi akan timbul suatu masalah yaitu terdapat banyak sekali kemungkinan portofolio investasi yang dapat dibentuk dari berbagai kombinasi aktiva berisiko yang tersedia di pasar. Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak terbatas.

Padahal kombinasi ini juga memasukkan aktiva bebas risiko di dalam pembentukan portofolio. Jika terdapat kemungkinan portofolio yang tidak terbatas, maka akan timbul pertanyaan portofolio mana yang akan dipilih oleh investor. Jika investor adalah rasional, maka mereka akan memilih portofolio yang optimal (Haugen, 2001).

Investor yang rasional akan melakukan investasi tidak hanya pada satu jenis investasi saja, namun akan melakukan diversifikasi pada berbagai investasi dengan harapan dapat meminimalkan tingkat risikodan memaksimalkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan dari berbagai pilihan instrumen investasi yang ada. Disamping itu, investor yang rasional melakukan keputusan investasi yang didasari dengan menganalisis kondisi saat ini, merancang portofolio yang optimal, mengambil keputusan investasi, menerapkan strategi investasi, dan memonitor kinerja investasinya (Umar, 2000).

Semakin berisiko suatu portofolio investasi, maka semakin tinggi tingkat pengembalian investasi yang diharapkan yang akan diperoleh dalam jangka panjang. Investasi dalam bentuk portofolio investasi saham perlu dilakukan monitoring yang berkelanjutan karena analisis portofolio investasinya bersifat jangka pendek yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar (Hadi, 2013; Haugen, 2001).

Tingkat pengembalian investasi (*return*) merupakan tujuan para investor dalam melakukan investasi dan untuk memaksimalkan *return* dengan tingkat risiko tertentu, pada umumnya para investor cenderung memilih portofolio saham dan salah satu cara ntuk mengurangi risiko investasi saham dengan melakukan diversifikasi kepemilikan saham yaitu dengan mengkombinasikan berbagai saham dalam investasinya. Pada dasarnya investor sangat menyukai investasi yang

menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, namun tidak begitu menyukai akan adanya risiko. *Return* merupakan pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, dimana apabila memperoleh keuntungan disebut *capital gain* namun apabila mengalami kerugian disebut *capital loss* (Mulyati dan Murni, 2018; Hadi, 2013).

Daftar Pustaka

- Abdullaevich, Mirzaev Mirzabek. (2020). The Basic Concepts of Investment and Its Importance. *Novateur Publications*, 6(6), 193-196
- Sharpe, William F., Alexander, Gordon J., Bailey, Jeffery V. (1993). *Fundamentals of Investment*. New York: Prentice Hall
- Suherman, Agus. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Fabozzi, Frank J. (2000). *Manajemen Investasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hadi, N. (2013). *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul. (2015). *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hartono, J. (2014). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasanudin., Nurwulandari, Andini., Safitri, Ronika Kris. (2021). Pagaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Keputusan Investasi yang Dimediasi oleh Minat Investasi (Studi pada Mahasiswa Universitas Mercu Buana). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3), 494-512
- Haugen, Robert Ang. (2001). *Modern Portofolio Theory*. New Jersey: Prentice Hall,
- Hermawati, Nensy., Rizal, Noviansyah., Mudhofar, Muhammad. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang). *Progress Conference*, 1(1), 850-860
- Mike, Levy. (2006). *Introduction to Investment*. New York: Southwestern Publising.

- Mukherjee, K. (2010). A Dual System Model of Preferences Under Risk. *Psychological Review*, 117(1), 243–255
- Mulyana, Mumuh., Hidayat, Lukman., Puspitasari, Ratih. (2019). Mengukur Pengetahuan Investasi Para Mahasiswa Untuk Pengembangan Galeri Investasi Perguruan Tinggi. *JAS-PT: Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*, 3(1), 31 – 52
- Mulyati, Sri., Murni, Ania. (2018). Analisis Invesasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal Dengan Metode Indkes Tunggal (Studi Empiris Pada IDX 30 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2017-Januari 2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 129-138
- Purwohandoko, Ari Wibowo. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat (Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi FE Unesa). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), 1-11
- Sandri, Siti Hanifa., Samsiah, Siti., Bakaruddin, Misral., Rahmayanti, Sri., Ardi, Hendri Ali. (2019). Investasi Saham Bagi Pemula. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 40-45
- Situmorang, M., Andreas., Natariasari, R. (2014). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Dengan Pemahaman Investasi Dan Usia Sebagai Variabel Moderat. *JOM FEKON*, 1(1), 9-13
- Suteja, J., Gunardi, A. (2016). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Bandung: Refika Aditama.
- Tandelilin, Eduardus. (2017). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi pertama. Yogyakarta: Kanisius
- Umar, Fandy. (2000). *Manajemen Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Andi.

Profil Penulis

**Dr. (Cand) Aditya Wardhana, S.E., M.M., M.Si**

Penulis merupakan dosen tetap Universitas Telkom. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi (SE) di prodi Manajemen Universitas Padjadjaran pada tahun 1997. Kemudian, penulis menyelesaikan studi Magister Sains (MSi) di prodi Manajemen Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan Magister Manajemen (MM) di prodi Manajemen Universitas Pasundan tahun 2012. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi Doktor Ilmu Manajemen di prodi Manajemen Universitas Pasundan. Penulis memiliki kepakaran di bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen strategik. Penulis memiliki pengalaman praktisi pemasaran di Citibank dan *Human Resource Development*, ISO Auditor, *General Affairs*, dan *Logistic* di PT Perusahaan Gas Negara Tbk serta sebagai konsultan di beberapa BUMN seperti Surveyor Indonesia, Badan Klasifikasi Kapal Indonesia, Pertamina, BNI 46, PTPN VIII, Biofarma, serta pada Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Kementerian Perhubungan. Sebagai dosen tetap di Universitas Telkom, penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian terindeks Scopus dan Sinta dan menulis lebih dari 50 buku dalam bidang manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, manajemen strategi, model bisnis, metode penelitian, perilaku konsumen, perilaku organisasi, teknologi informasi, sistem informasi manajemen, kependidikan, kewirauhsaan, pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Penulis memiliki Sertifikasi Penulis Buku Non-Fiksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI.

Email Penulis: adityawardhana@telkomuniversity.ac.id

PRINSIP DAN KONSEP INVESTASI

Ratih Pratiwi, S.Pd., M.Si., M.M.

Univeristas Wahid Hasyim

Investasi

Prinsip dasar investasi menurut Sternberg & Lubart (1991) adalah melakukan pengorbanan pada saat ini, menahan keinginan/ konsumsi pada saat ini, serta menanamkan dana (bukan dana utama) pada suatu aset produktif, dengan harapan pencapaian tingkat pengembalian yang lebih besar di masa yang akan datang (pada masa yang dipengaruhi). Banyak motif dan alasan mengapa seorang atau organisasi perlu melakukan investasi, salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan; melindungi asetnya, atau menaikkan nilai kekayaannya, menghemat pajak, serta mengurangi tekanan inflasi (Hirsch, 1976). Pemahaman terkait konsep investasi dan *trading* sering dianggap sebagai hal yang sama, akan tetapi sebenarnya kedua kegiatan tersebut berbeda; investasi diartikan menjadi pembelian aset untuk disewakan, sedangkan *trading* diartikan menjadi membeli aset untuk dijual kembali.

Sementara itu pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), arti investasi yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi

merupakan upaya yang dilakukan perseorangan/perusahaan untuk menempatkan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, meningkatkan, atau memberikan pengembalian yang positif (Ethier, 2019). Investasi merupakan penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah ekonomi (Webster & Jensen, 2006). Menurut Lipsey (2004) investasi merupakan bentuk pengeluaran atau pembelian yang tidak dapat dinikmati secara langsung namun akan dapat dinikmati berdasarkan periode waktunya. Investasi dapat didefinisikan sebagai sebuah komitmen akan jumlah dana dalam suatu periode yang akan memberikan hasil di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit (Niu *et.al* 2019).

Investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang (Lypsey, 1997). Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dipilih tetapi digunakan untuk produksi yang akan dipasangkan (Ethier, 2019). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.

Investasi merupakan bentuk penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan atau nilai perusahaan bertambah ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Coleman, 2017). Investasi dapat dilakukan oleh entitas maupun individu/pribadi (King *et.al* 2019). Beberapa contoh investasi antara lain adalah kepemilikan saham, obligasi, sukuk, deposito, keikutsertaan asuransi, tabungan dan reksa dana. Bentuk contoh investasi lainnya yakni pembelian logam mulia, permata, tanah, emas dan perhiasan, hingga

menjalankan bisnis. Sehingga dalam pengertian sederhana, investasi merupakan upaya mengembangkan modal berupa uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu.

Melakukan investasi memiliki banyak keuntungan (Frank, 2021). Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial atau *financial freedom*, di mana seseorang dianggap sudah memperoleh *passive income* jika dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang. Tujuan berikutnya adalah melindungi aset dari inflasi yang bisa membuat nilai aset berkurang. Aset jika diinvestasikan maka akan menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Manfaat dan tujuan investasi yang utama adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi investor, hasil *return* investasi tentunya menjadi sumber penghasilan. Investasi adalah merupakan cara aman untuk menyimpan dana untuk keadaan darurat. Bagi perseorangan arti investasi adalah menabung, dan hal ini ditujukan untuk persediaan dana yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan mendadak dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi.

Teori Investasi Dari Berbagai Ahli

Teori Keynes dalam Perelman (1989) menyebutkan bahwa masyarakat adalah komponen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa, yang akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu poin utama penerapan teori ini adalah alokasi dana pemerintah untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan tunjangan yang nantinya akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat secara umum. pendapat ini

berlawanan dengan teori ekonomi klasik yang hanya berfokus untuk menumbuhkan bisnis dan laba namun tidak berfokus pada masyarakat sebagai konsumen (Crotty, 1993). Kelemahan dari penerapan teori Keynes secara berlebihan adalah kemungkinan terjadinya peningkatan inflasi. Teori Umum Ketenagakerjaan, Bunga, dan Uang adalah karya keynes yang untuk membantu program kerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Teori investasi Keynes tidak bertahan lama, dan mulai ditinggalkan di akhir tahun 1980-an karena oleh para ekonom yang lebih mementingkan pertumbuhan dan memiliki pemahaman lebih luas mengenai inflasi (Fazzari & Mott, 1986).

Berdasarkan teori klasik, terdapat 3 faktor penentu investasi yaitu biaya, dampak, dan harapan atau peluang (Harris, 2007). Berdasarkan teori investasi menurut Keynes dalam Perelman (1989) keputusan investasi itu diambil dengan membandingkan MEC dengan tingkat bunga riil (r). MEC atau *Marginal Efficiency of Capital* merupakan titik ketika suatu proyek mencapai titik impas (BEP) atau singkatnya, keuntungan yang diharapkan dari investasi. Ketika nilai MEC lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga riil, maka sebuah investasi bisa dilakukan. Tepat ketika nilai MEC sebanding dengan nilai r , maka tidak ada lagi penanaman dana pada aset investasi yang memperoleh penghasilan. Teori investasi Keynes dalam Perelman (1989) menyebutkan bahwa jumlah atau jumlah investasi tidak hanya bergantung pada pertimbangan atau satu faktor saja, namun dipengaruhi juga oleh biaya modal atau tingkat bunga. Investasi akan menguntungkan hingga suatu titik di mana nilai MEC dengan biaya modal ada pada tingkat yang sama.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan berdasarkan teori investasi Keynes dalam Perelman (1989) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat optimisme dari pemimpin. Ketika pemimpin merasa optimis tentang masa depan, maka mereka akan melakukan lebih banyak investasi, sehingga ketika jumlah permintaan meningkat, keuntungan yang mereka peroleh juga akan meningkat.
2. Tingkat pertumbuhan perekonomian. Segala sesuatu yang mempengaruhi suatu barang, maka akan mempengaruhi investasi. Begitu pula dengan laju pertumbuhan ekonomi. Biasanya, ketika laju pertumbuhan ekonomi baik, maka permintaan akan barang dan jasa juga akan baik.
3. Peningkatan Modal Saham Publik. Modal saham publik yang meningkat akan menyebabkan penurunan produk hasil marjinal dan akan turut mengurangi nilai MEC.
4. Perubahan Teknologi. Perubahan teknologi yang terjadi menguntungkan, maka akan meningkatkan jumlah investasi meski tingkat bunga tetap.
5. Perubahan Tingkat Bunga. Ekonom pengikut Keynesian percaya bahwa investasi sangat dipengaruhi oleh kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tingkat bunga. Bahkan meskipun terjadi perubahan besar pada tingkat bunga, hanya akan memberikan sedikit pengaruh pada investasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi investasi berdasarkan teori investasi Keynes, yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi memengaruhi jenis aset investasi, sebagai contohnya adalah aset *cryptocurrency*.

Teori pertumbuhan ekonomi dikembangkan oleh dua orang, yaitu R.F. Harrod dan Evsey Domar (Eltis, 1987).

Keduanya merupakan seorang ahli ekonomi yang membangun teori-teori berdasarkan pengalaman dari perekonomian negara-negara maju. Harrod dan Domar mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi secara terpisah. Harrod (1939) memaparkan teorinya pada *Economic Journal*, sedangkan Domar (1947) dalam jurnal *America Economic Review*. Teori Harrod-Domar berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar perekonomian dapat berkembang secara berkelanjutan (Eltis, 1987). Teori ini berusaha memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya di teori John Maynard Keynes tentang tenaga kerja dan jangka pendek ekonomi pertumbuhan. Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara (Harrod & Domar, 2004).

Dalam teori Harrod-Domar kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian (Adu, 2021). Pertama, peningkatan pendapatan negara dipengaruhi oleh tingkat investasi. Semakin mudah proses investasi, maka akan semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan sehingga berdampak pada semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dengan cara memperbesar modal stok. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan mendorong permintaan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, maka artinya investasi dapat mempengaruhi pola permintaan dan juga mempengaruhi pola penawaran. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif akan tetapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi. Teori Harrod-

Domar menyatakan bahwa peran utama pendapatan negara adalah untuk membiayai dan memperbaiki barang-barang (bahan bangunan, peralatan, dan sebagainya) yang mengalami kerusakan sebagai upaya untuk memajukan perekonomian negara secara berkelanjutan (Boianovsky, M. (2021).

Teori ketiga, adalah Henry Markowitz (1952) yang memberikan nasihat menarik dalam portofolio investasi yaitu *"not to put all egg in one basket"* (janganlah membuat semua telur ke dalam satu keranjang), karena jikalau keranjang itu jatuh, maka semua telur yang ada dalam keranjang tersebut akan pecah (Markowitz, 1999; 2010). Teori portofolio yang diperkenalkan oleh Markowitz (bapak teori portofolio modern) telah mengajarkan konsep portofolio secara kuantitatif. Markowitz merupakan ahli yang pertama mengajarkan bagaimana mengukur portofolio hasil (*return*) dan risiko (*risk*) sehingga memudahkan investor dalam membanding-bandingkan berbagai "keranjang" bukan telur. Teori ini memiliki makna bahwa bagaimana cara kita dalam menawarkan barang dapat menurunkan risiko. Ajaran ini pula yang mengantarkan Markowitz mencapai penghargaan Nobel di bidang ekonomi dan keuangan pada tahun 1990.

Kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dari semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap portofolio, atau diistilahkan dengan kovarians. Kovarians adalah suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana *return* dari dua sekuritas/ aset dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama atau merupakan koefisien korelasi antara satu aset dengan aset yang lain (Gabler, 2019).

Kemudian muncullah teori yang didasari oleh teori portofolio yaitu teori *Capital Asset Pricing Model* (CAPM)

yang mula-mula dikenalkan oleh Sharpe (1964), kemudian disempurnakan oleh Lintner dan Mossin beberapa tahun kemudian (Jensen, 1972). Dalam teori ini diajarkan bahwa *return* yang disyaratkan dari sebuah investasi pada surat berharga ditentukan oleh dua komponen, yaitu *return* investasi bebas risiko (*risk free rate*) dan premi risiko (*risk premium*) (Fama, *et.al.*, 2004). Persamaan CAPM menunjukkan bahwa saham dengan risiko yang besar harus mampu memberikan premi risiko yang besar pula; dan demikian pula sebaliknya (Perold, 2004).

Rasio Investasi Keuangan

Analisis rasio keuangan perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang calon investor untuk menentukan besaran investasi yang akan dilakukan (Barnes, 1987). Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan transaksi dalam akuntansi pada laporan keuangan seperti laporan keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan (Kazemian, 2018). Analisa rasio keuangan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai komponen perencanaan bisnis untuk perusahaan. Tujuan dari analisis rasio keuangan tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas di pasar modal (Dong *et.al*, 2018).

Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua user utama dalam proses investasi, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu merupakan investasi yang baik atau tidak. Dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan, investor dapat menentukan investasi mana yang paling baik. Manajemen menggunakan rasio

keuangan untuk mengambil keputusan terkait pengembangan perusahaan dan menilai perkembangan perusahaan (Barnes, 1987).

Raharjo dalam buku Keuangan Dan Akuntansi (2007) mengelompokkan rasio keuangan perusahaan menjadi lima.

1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:
 - a. Rasio Lancar atau *Current Ratio* arti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk jangka waktu jangka pendeknya. Jika rasio lancar 1:1 atau 100% berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau diatas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar (Harahap, 2002).
 - b. Rasio Cepat atau *Quick Ratio* adalah yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling mampu untuk menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100% tapi

mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat (Harahap, 2002).

- c. Rasio Kas adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar agar dapat segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta negara setara (*near cash*) adalah harta lancar yang mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang menjadi domisili perusahaan yang bersangkutan. Pengertian rasio keuangan ini menunjukkan semakin besar rasionya semakin baik. Sama seperti Quick Ratio, rasio kas tidak harus mencapai 100% (Harahap, 2002).
2. Rasio Aktivitas atau *Activity Ratio*. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah untuk melihat tingkat aktivitas aktiva-aktiva pada beberapa aset pada tingkat kegiatan tertentu. Jika pada tingkat penjualan tertentu memiliki aktivitas yang rendah akan mengakibatkan peningkatan jumlah dana yang tertanam berlebihan pada aktivitas tersebut. Sehingga kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif.
 - a. Perputaran Piutang. Rasio ini mengukur kualitas dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan dan kebijakan kreditnya. Pengertian rasio keuangan ini adalah untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya semakin efektif pengelolaan piutangnya (Sutrisno, 2001).
 - b. Perputaran Persediaan, menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara

mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi perputarannya semakin efektif pengelolaannya (Sutrisno, 2001).

- c. Perputaran Aktiva Tetap, merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini tetap menentukan seberapa efektif perusahaan menggunakan aktivanya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut.
 - d. Perputaran Total Aktiva, merupakan rasio yang menghitung efektifitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen strategi, pertempuran, dan investasi atau modalnya (Hanafi dan Halim, 2000).
3. Rasio Solvabilitas. Tujuan dari analisis rasio solvabilitas keuangan ini adalah menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Rasio keuangan yang digunakan adalah:
- a. Rasio Utang terhadap Aktiva atau *Total Debt to Asset Ratio* adalah mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan semakin kecil rasionya utang terhadap aktiva akan semakin aman (*solvable*).

Sehingga porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil (Harahap, 2002).

- b. Rasio Utang terhadap Ekuitas atau *Total Debt to Equity Ratio* menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin aman.
4. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas. Analisis rasio keuangan profitabilitas ini menunjukkan tingkat ketidakseimbangan atau keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas sebagai berikut:
- a. Margin Laba Kotor atau *Gross Profit Margin* merupakan ukuran dari setiap hasil sisa penjualan sebelum perusahaan membayar harga pokok penjualan.
 - b. Margin Laba Operasi atau *Operating Profit Margin* merupakan ukuran dari setiap hasil sisa penjualan sebelum semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga yang dihasilkan dan pajak, atau laba bersih yang dari setiap rupiah penjualan.
 - c. Margin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* merupakan ukuran dari setiap hasil penjualan sebelum dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak.

- d. Pengembalian Investasi (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT (Sutrisno, 2001).
 - e. Rentabilitas Ekonomis atau *Return On Assets* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan (EBIT) dari aktiva yang digunakan. Semakin besar rasionya semakin baik (Sutrisno, 2001)
5. Rasio Investasi. Pengertian rasio investasi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan ketidakseimbangan atau kembalian kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu.

Prinsip Dasar Investasi

1. Toleransi resiko (*risk*) terhadap *return*

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menetapkan jumlah dana pada saat ini dengan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dengan mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa mendatang. Investasi dapat berkaitan dengan penanaman jumlah dana pada aset riil seperti: kepemilikan logam berharga, aset berupa tanah, bangunan maupun aset riil lainnya; atau pada aset finansial seperti: deposito, obligasi, obligasi, dan surat berharga lainnya.

Harapannya adalah mendapatkan keuntungan di masa datang sebagai kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan.

Harapan keuntungan tersebut dalam konteks akuntansi sering disebut sebagai *return*. Investor pasti mengharapkan *return* yang tinggi dari investasi yang dilakukannya. Namun, *return* berbanding lurus dengan resiko, artinya *return* yang tinggi maka akan memiliki risiko yang dihadapi oleh investor yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi keuntungan yang diharapkan dalam investasi maka akan semakin tinggi risiko investasi.

Fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat adalah penawaran investasi yang menjanjikan *return* yang tinggi dengan proses yang instan dan mudah, dan sayangnya selalu mendapatkan respons yang besar tanpa memperhitungkan risikonya. Dalam berinvestasi, selain ada *return*, investor juga harus memperhatikan *risk*. Investor perlu mencari alternatif investasi yang menawarkan tingkat pengembalian yang paling tinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau investasi yang menawarkan pengembalian tertentu pada tingkat terendah.

Sumber-sumber pengembalian investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu *yield* dan *capital gain* (*loos*). *Return* merupakan pengembalian komponen yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara berkala dari suatu investasi. Jika kita membeli saham, hasil ditunjukkan oleh besarnya dividen yang akan kita peroleh. Sedangkan, *capital gain* yang merupakan kenaikan dari nilai aset (saham atau obligasi) dan biasanya terealisasi ketika aset tersebut dijual merupakan komponen kedua dari pengembalian.

Beberapa sumber risiko yang dapat mempengaruhi besarnya risiko investasi antara lain: risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko tukar dan risiko

negara (*country risk*), serta masih banyak lagi sumber risiko.

2. Diversifikasi. Diversifikasi berarti bahwa investor perlu membentuk portofolio penanaman dana sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan resiko tanpa mengurangi pengembalian yang diharapkan (portofolio yang efisien). Untuk membentuk portofolio yang efisien, salah satu asumsi yang paling penting adalah bahwa semua investor tidak menyukai risiko (*risk averse*).
3. Aset Berisiko dan Aset Bebas Risiko. Investor dihadapkan pada pilihan untuk menempatkan dananya pada berbagai aset, baik aset yang berisiko maupun aset yang bebas risiko, ataupun kombinasi dari kedua aset tersebut. Pengambilan keputusan investasi tersebut akan tergantung dari sejauh mana preferensi investor terhadap risiko. Semakin seorang investor menghindari risiko (*risk averse*), maka keputusan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset-aset yang bebas risiko. Aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat pengembalian aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian seperti contohnya adalah saham atau obligasi. Aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat *return*nya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini, dan ditunjukkan oleh varian *return* yang sama dengan nol misalnya *bond* yang diterbitkan pemerintah (ORI), atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, karena tidak mungkin membayarkan obligasi atau SBI yang diterbitkan pada saat jatuh temponya.

Time Horizon (Horizon Waktu)

Horison waktu dalam investasi adalah panjang total waktu yang diperkirakan akan dipegang oleh investor (Basu & Maciejewski, 2019). Menetapkan horizon waktu untuk investasi memiliki kaitan dengan tujuan dan maksud investor. Tipe horison waktu bervariasi dari jangka pendek hingga jangka panjang. Beberapa trader menetapkan horizon investasi yang lebih panjang karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menjaga portofolio mereka tetap berinvestasi dan menyadari keuntungan atau mengimbangi kerugian yang terjadi (Ebert & Piehl, 1973).

Horizon waktu dibedakan jangka waktu menjadi jangka pendek, menengah dan panjang. Investasi jangka pendek dianggap memiliki horison waktu hingga tiga tahun. Horison waktu yang lebih panjang berarti investor memiliki lebih banyak waktu untuk tumbuh melampaui volatilitas modal atau kekayaan entitas bisnis jangka pendek. Volatilitas disebut “market mood” untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah (kisaran fluktuasi) yang artinya sedang terjadi volatilitas tinggi (Basu& Maciejewski, 2019).

Pertimbangan Market Timing

Equity market timing theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Baker dan Wurgler (2002) yang menyatakan bahwa harga saham yang semakin tinggi mengakibatkan biaya modal saham perusahaan semakin rendah, dan sebaliknya ketika harga saham rendah maka semakin besar biaya modal saham perusahaan. Sehingga dapat dikatakan tujuan perusahaan melakukan *equity market timing* adalah untuk memanfaatkan fluktuasi temporer biaya saham yang relatif lebih murah. Dengan perusahaan menerbitkan *equity* pada biaya saham yang lebih murah tersebut diharapkan akan membantu

meningkatkan nilai perusahaan. *Equity market timing* sering diklasifikasikan sebagai bagian dari keuangan berperilaku korporasi (*behavioral corporate finance*) (Baker & Wurgler, 2002). Ketika pasar tidak efisien, dan investor diasumsikan bertindak tidak rasional, maka manajer melakukan pendanaan dengan ekuitas ketika terjadi *mispricing*, yaitu menerbitkan ekuitas ketika harga saham dinilai tinggi dari yang seharusnya dan membeli kembali ekuitas ketika harga saham dinilai rendah dari yang seharusnya (Baker & Wurgler, 2013).

Dalam praktiknya, *equity market timing* menunjukkan aspek yang penting dalam menentukan kebijakan keuangan perusahaan. Baker & Wurgler (2002) membangun suatu model variabel yaitu *external finance weighted average market to book ratio* (EFWAMB) untuk memperbaiki ukuran *equity market timing*. Variabel ini adalah rata-rata tertimbang *market-to-book ratio* dan *external finance* (ekuitas atau utang) suatu perusahaan di masa lampau. Variabel ini digunakan oleh Baker dan Wurgler untuk melihat usaha dari suatu perusahaan dalam melakukan *equity market timing*.

Pasar Saham dan Bursa Efek

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan (surat berharga) jangka panjang yang dapat diperdagangkan baik dalam bentuk utang maupun saham, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, lembaga publik maupun perusahaan swasta (Hidayat, 2010). Tujuan pasar modal adalah untuk mempercepat proses partisipasi masyarakat dalam penyertaan modal pada perusahaan swasta dalam rangka pemerataan pendapatan masyarakat, dan digunakan secara produktif untuk mendukung pembangunan nasional (Rusdin, 2006). Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi yaitu memfasilitasi pemindahan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang memerlukan dana, sedangkan

fungsi keuangan dari pasar modal yaitu menyediakan sarana bagi pihak yang memerlukan dana dan pihak yang berkelebihan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktual riil yang diperlukan untuk investasi (Rusdin, 2006).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantaranya. Bursa efek mempunyai tugas yang harus dilakukan pada calon investor agar dapat menjadikan bursa efek lebih dikenal oleh publik, yaitu :

1. Sarana perdagangan efek,
2. Memastikan likuiditas instrumen pada efek-efek yang dijual,
3. Penyebarluasan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat,
4. Mempublikasikan pasar modal untuk menarik investor dan perusahaan yang *go public*
5. Menciptakan instrumen dan jasa baru.

Perkembangan sektor finansial mampu memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti telah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi secara teoritis maupun penelitian empiris. Selanjutnya, mengingat sektor finansial di suatu negara dapat terdiri dari beberapa sub-sektor seperti bank umum, lembaga keuangan non-bank, pasar modal dan pasar uang. Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka permintaan akan bentuk-bentuk investasi juga akan semakin meningkat. Sebagai tempat berinvestasi yang menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi, walaupun disertai dengan tingkat resiko yang tinggi pasar

modal seringkali dijadikan ajang untuk melakukan aksi spekulasi untuk memaksimalkan keuntungan bagi investornya. Selain itu, karena pasar modal merupakan pasar sekunder bagi saham yang sebelumnya telah dijual di pasar perdana, seringkali transaksi jual beli saham di pasar modal tidak ada kaitannya lagi dengan kebutuhan dana perusahaan yang mengeluarkan saham bersangkutan (Hidayat, 2010).

Daftar Pustaka

- Adu, B. O. S. (2021). Comparison of Growth of Overall GDP on Three Sectors of the Ghanaian Economy: A Time Series Analysis from 2001-2020. *American Journal of Industrial and Business Management*, 11(9), 1009-1021.
- Baker, M., & Wurger, J. (2002). Market Timing dan Capital Structure. *Journal of Finance*, 57, 1-32.
- Baker, M., & Wurger, J. (2013). Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. *Handbook of The Economics of Finance*. Elsevier B.V.
- Barnes, P. (1987). The analysis and use of financial ratios. *Journal of Business Finance dan Accounting*, 14(4), 449.
- Basu, A., & Maciejewski, M. L. (2019). Choosing a time horizon in cost and cost-effectiveness analyses. *Jama*, 321(11), 1096-1097.
- Boianovsky, M. (2021). Evsey Domar and Russia. *Center for the History of Political Economy at Duke University Working Paper Series*.
- Budi Rahardjo. (2007). *Keuangan Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Coleman, L. (2017). *Applied Investment Theory: How Markets and Investors Behave, and Why*. Springer.
- Crotty, J. R. (1993). Rethinking Marxian investment theory: Keynes-Minsky instability, competitive regime shifts and coerced investment. *Review of Radical Political Economics*, 25(1), 1-26.
- Domar, E. D. (1948). The problem of capital accumulation. *The American Economic Review*, 38(5), 777-794.
- Domar, E. D. (1947). American Economic Association. *The American Economic Review*, 37(1), 34-55.
- Dong, M. C., Tian, S., & Chen, C. W. (2018). Predicting failure risk using financial ratios: Quantile hazard model approach. *The North American Journal of Economics and Finance*, 44, 204-220.

- Ebert, R. J., & Piehl, D. (1973). Time horizon: A concept for management. *California Management Review*, 15(4), 35-41.
- Eltis, W. (1987). Harrod-Domar growth model. *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, 4, 602-604.
- Ethier, W. J. (2019). Conceptual foundations from trade, multinational firms, and foreign direct investment theory. In *Competitiveness in International Food Markets* (pp. 105-128). CRC Press.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The capital asset pricing model: Theory and evidence. *Journal of economic perspectives*, 18(3), 25-46.
- Fazzari, S. M., & Mott, T. L. (1986). The investment theories of Kalecki and Keynes: an empirical study of firm data, 1970–1982. *Journal of Post Keynesian Economics*, 9(2), 171-187.
- Frank Jr, M. L. (2021). *Perceived Advantages and Disadvantages of Investment Management Advice: The Relationship Between Risk Tolerance and Advisor Choice* (Doctoral dissertation, Wilmington University (Delaware)).
- Gabler, A. (2019). An Extension of Markowitz'Modern Portfolio Theory for Long-Term Equity Investors. *Available at SSRN 3449710*.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. “Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan”, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada.
- Harris, D. J. (2007). The classical theory of economic growth. *The new Palgrave dictionary of economics*, 1-10.
- Harnanto, 1991. “Analisis Laporan Keuangan”, Edisi Pertama, cetakan 4, Yogyakarta: YKPN.
- Hidayat, R. (2010). Keputusan Investasi Dan Financial Constraints: Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 12(4), 457-479.

- Harrod, R. F., & Domar, E. E. (2004). Models of Economic Growth.
- Harrod, R. F. "Value and Capital." (1939): 294-300.
- Helfert, Erich. 1996. Teknik Analisis Keuangan. Edisi 8, Jakarta: Erlangga.
- Hirsch, Seev. (1976). An international trade and investment theory of the firm. *Oxford economic papers*, 28(2), 258-270.
- Jensen, M. C., Black, F., & Scholes, M. S. (1972). The capital asset pricing model: Some empirical tests.
- Kazemian, S., Hanif, S. M., Sanusi, Z. M., & Haat, M. H. C. (2018). Financial risk ratios and earnings management: reducing uncertainties in shariah-compliant companies. *Global Journal Al Thaqafah*, 9-24.
- King, R. B., Yeung, S. S. S., & Cai, Y. (2019). Personal investment theory: A multi-faceted framework to understand second and foreign language motivation. *System*, 86, 102123.
- Lipsey, R. E. (2004). Home-and host-country effects of foreign direct investment. In *Challenges to globalization: Analyzing the economics* (pp. 333-382). University of Chicago Press.
- Markowitz, H. M. (1999). The early history of portfolio theory: 1600–1960. *Financial analysts journal*, 55(4), 5-16.
- Markowitz, H. M. (2010). Portfolio theory: as I still see it. *Annu. Rev. Financ. Econ.*, 2(1), 1-23.
- Miswanto. (2013). Market Timing dan Pengaruhnya terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang IPO tahun 2000-2008. *Jurnal Siasat Bisnis*, 17, 1, 69-79.
- Miswanto. (2015). Market Timing Ekuitas dan Pengaruhnya terhadap Struktur Modal Perusahaan di Indonesia. Disertasi Doktor, tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Niu, Y., Yang, J., & Zou, Z. (2019). Dynamic agency and investment theory under model uncertainty. *International Review of Finance*, 19(2), 447-458.
- Perelman, M. (1989). *Keynes, investment theory and the economic slowdown: the role of replacement investment and q-ratios*. Springer.
- Perold, A. F. (2004). The capital asset pricing model. *Journal of economic perspectives*, 18(3), 3-24.
- Shah, P. (2013). Behavior Corporate Finance: A New Paradigm Shift to Understand Corporate Decisions. *Global Research Analysis*, 2, 1.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The journal of finance*, 19(3), 425-442.
- Siegel, S. 1992. Statistik Nonparametrik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. *Human development*, 34(1), 1-31.
- Sutrisno. 2001. Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sulistyowati, C. (2015). Equity Market Timing dan Struktur Modal pada Perusahaan Keluarga di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 2, 2, 186-197.
- Thaler, R. (1999). *Advances in Behavioral Finance*. New York: Russel Sage Foundation.
- Webster, E., & Jensen, P. H. (2006). Investment in intangible capital: An enterprise perspective. *Economic Record*, 82(256), 82-96.

Profil Penulis



Ratih Pratiwi, S.Pd., M.Si., M.M.

Penulis merupakan dosen tetap pada Universitas Wahid Hasyim. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan (SPd) di IKIP Veteran Semarang (Sekarang UniVET). Kemudian, penulis menyelesaikan studi Magister double degree (MSi dan MM) di STIEPARI Semarang. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi Doktor Ilmu Manajemen di prodi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan kewirausahaan. Penulis memiliki pengalaman praktisi kewirausahaan di PT. Nadita Corp Sekarindo, perusahaan baru yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman di Kota Semarang. Sedangkan kepakarannya dalam bidang manajemen SDM diaplikasikan Bersama Lembaga Karakter Semarang. Sebagai Kaprodi Manajemen di Universitas Wahid Hasyim, penulis juga aktif menulis. Karya yang dihasilkannya telah mengantarkan pula sekian banyak mahasiswanya menjadi volunteer dalam berbagai event CFP dimana sebelumnya hal ini belum dilakukan. Sebagai penulis yang terindeks Scopus dan Sinta, penulis berharap dapat memberikan sekian banyak karya ilmiah yang dapat memperkaya dunia Pendidikan.

Email Penulis: rara@unwahas.ac.id

DASAR-DASAR INVESTASI

Musdalifah, S.Pd., M.Pd

STKIP Pembangunan Indonesia

Pengertian Investasi

Kata investasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata invest sebagai kata dasar *investment* memiliki arti menanam. Menurut Donal E. Fischer dan Ronald J. Jordan mendefinisikan *investmet is a commitment of funds made in the expectation of some positive rate of return*. Sementara itu, William F.S menyebutkan bahwa investasi adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa yang akan datang. Selain itu, Kashmir dan Jakfar mengatakan bahwa investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relative panjang dalam berbagai bidang usaha.

Istilah investasi memiliki beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai pengeluaran untuk pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi saat ini namun digunakan untuk kegiatan produksi guna menghasilkan barang atau jasa di masa yang akan datang. Investasi dapat disebut juga sebagai penanaman modal. Berikut ini beberapa pengertian investasi menurut para ahli : Menurut Jogiyanto (2010) pengertian investasi adalah penundaan konsumsi

sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Menurut Martalena dan Malinda (2011) investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Sedangkan menurut Bodie (2005) *At investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits.*

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan yang mengorbankan sumber-sumber daya yang terkait di masa kini untuk mendapat keuntungan atau laba di masa yang akan datang. Tidak hanya berharap keuntungan yang besar tetapi investor harus memperhatikan pula risiko-risiko yang menyertai kegiatan investasi ini. Sebagian besar penghasilan yang kita peroleh akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dalam rangka memenuhi tiga kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adanya kebutuhan tersebut terkadang seseorang melupakan adanya kebutuhan tak terduga dimasa akan datang. Disinilah perlunya seseorang mengalokasikan sebagian penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Ada beberapa alasan mengapa seseorang berinvestasi, diantaranya ada yang menginginkan memperoleh tambahan penghasilan di masa depan atau dimasa pensiunnya. Ada pula yang bertujuan ingin melipatgandakan penghasilannya saat ini, yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Jenis Investasi

Menurut Abdul Halim (2005), pada hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa

mendatang. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Berikut dua jenis investasi yang dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari tiga tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Namun, perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito.

a. Deposito

Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Penalti adalah cara yang dilakukan pihak Bank untuk menghindari risiko jika para nasabahnya tidak sabaran untuk segera mencarikan dana yang diinvestasikan dalam bentuk deposito.

b. Obligasi Negara Ritel

Obligasi Negara Ritel atau ORI merupakan salah satu instrument Surat Berharga Negara (SBN)

yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana

c. Reksadana Pasar Uang

Reksadana pasar uang adalah reksadana yang dana kelolaannya diinvestasikan seluruhnya di instrumen pasar uang, deposito berjangka atau obligasi yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 tahun atau obligasi yang sisa jatuh temponya kurang dari 1 tahun.

d. *Saving Bonds Ritel*

Saving bond ritel adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan negara guna mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana ini nantinya diserap ke APBN untuk pembangunan, pembiayaan sekolah, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, dan sebagainya.

e. *Peer to Peer Lending*

P2P (*peer-to-peer*) *Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman (*borrower*) adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (*Investor*) adalah orang, badan hukum,

dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun untuk mendapatkan keuntungan. Kamu dapat menikmati hasil dari investasi ini dalam lima tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jenis ini sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah

a. Investasi Kekayaan Riil

Investasi yang dilakukan pada asset yang tampak secara nyata seperti tanah, bangunan dan secara permanen melekat pada tanah termasuk apartemen, ruko, rumah pribadi.

b. Investasi Kekayaan Pribadi

Investasi yang dilakukan pada benda-benda seperti emas, berlian, barang antik dan termasuk benda-benda seni seperti lukisan.

c. Investasi Obligasi

Obligasi adalah jenis investasi berupa surat utang sebagai bukti atas transaksi pinjaman yang dilakukan pihak penerbit obligasi dengan pihak pemilik dana. Umumnya, jangka waktu investasi ini berakhir dalam 2 hingga 3 tahun atau lebih.

d. Investasi Reksadana

Investasi reksadana adalah pengumpulan dana oleh masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya, Manajer Investasi akan menempatkan dana tersebut dalam bentuk portofolio efek seperti saham, obligasi dan beragam instrumen lainnya untuk mendapatkan manfaat.

e. Investasi Saham

Saham merupakan instrumen investasi yang membuktikan kepemilikan perorangan atau perusahaan atas aset suatu perusahaan atau perorangan lainnya. Manfaat utama yang akan diterima oleh investor saham adalah pembagian dividen dan selisih harga jual dengan harga beli.

Tipe – Tipe Investasi

Menurut Jogiyanto (2010), terdapat 2 tipe investasi, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

1. Investasi Langsung

Investasi langsung merupakan pembelian secara langsung aktiva keuangan suatu perusahaan. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal atau pasar turunan. Aktiva yang dapat diperjual-belikan di pasar uang berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil, jatuh temponya pendek dengan tingkat cair yang tinggi. Misalnya, *Treasury-bill (T-bill)* dan sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi. Aktiva yang dapat diperjual-belikan di pasar modal berupa aktiva keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed income securities*) dan saham-saham (*equity securities*). Aktiva yang dapat diperjual-belikan di *equity market* adalah

saham preferen dan saham biasa. Opsi dan *futures contract* merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan. Disebut dengan surat-surat berharga turunan (*derivative*) karena nilainya merupakan jabaran dari surat berharga lain yang terkait. Contoh dari opsi misalnya adalah waran. Waran adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan bersangkutan dengan harga yang tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. *Future contract* merupakan persetujuan untuk menyediakan aktiva dimasa mendatang dengan harga pasar yang sudah ditentukan dimuka. Aktiva yang diperdagangkan umumnya adalah komoditi hasil bumi.

2. Investasi Tidak langsung

Investasi tidak langsung adalah jenis investasi yang investornya dapat berinvestasi tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses jual beli maupun pengelolaannya. Dalam investasi tidak langsung, cukup memberikan kepercayaan kepada perusahaan atau badan usaha untuk mengelola aset yang kamu miliki. Dengan melakukan investasi tidak langsung maka investor tidak perlu hadir secara fisik untuk ikut mengelola dan menganalisis sehingga pengambilan keputusan telah dilakukan oleh manajer investasi. Contohnya membeli saham dan obligasi yang dijual di pasar modal dan biasanya dilakukan melalui perusahaan asuransi atau perantara. Dengan begitu kita dapat memahami bahwa perantara tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang dianggap sebagai *fee*.

Tujuan Investasi

Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan, maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang

diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi, kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Dari penjelasan tersebut, ada banyak tujuan investasi yang melatarbelakangi investor melakukan investasi. Berikut tujuan investasi diantaranya:

1. Mendapatkan Penghasilan Tetap

Tujuan investasi untuk mendapat penghasilan tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Contohnya, Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengolahan makanan cepat saji. Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya. Besarnya persentase keuntungan akan berbeda, tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor.

2. Mengembangkan Usaha

Selain mendapat penghasilan tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda.

3. Jaminan Dalam Bisnis

Jika Anda menanam modal pada *supplier* bahan baku usaha yang sedang Anda jalani maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang baik.

Menurut Tandelilin (2010) secara khusus, terdapat beberapa alasan seseorang melakukan investasi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu
4. Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut jika diinvestasikan akan memberikan harapan peningkatan kemampuan konsumsi investor di masa datang, yang diperoleh dari peningkatan kesejahteraan investor tersebut.

Proses Investasi

Proses investasi merupakan merupakan keputusan yang berkesinambungan dengan tahap-tahap sebagai berikut

1. Penentuan Sasaran Investasi

Penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat focus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Sasaran investor antara yang satu dengan yang lain tidak sama, tergantung dari keputusan yang dibuat.

2. Penentuan Kebijakan Investasi

Tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan.

3. Pemilihan Strategi Portofolio

Ada dua strategi yang dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar.

4. Pemilihan asset

Tahap ini merupakan proses pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio.

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tahap revaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini. Tahap ini meliputi kinerja portofolio dan perbandingan hasil pengukuran dengan kinerja.



Gambar 7.1 Proses Investasi

Tipe Investor

Investor adalah setiap orang atau entitas lain (seperti perusahaan atau reksa dana) yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Istilah "investor" ini juga digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian properti, mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara sederhana investor adalah orang yang melakukan investasi untuk memperoleh keuntungan.

1. Tipe Konservatif

Tipe konservatif adalah tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Ciri-cirinya, investor tipe ini menginginkan investasi yang aman, tingkat imbal hasil (*return*) cenderung stabil, dan takut kalau investasi pokok berkurang. Dengan kata lain, investor konservatif cenderung memilih jenis investasi yang stabil, berisiko rendah atau bahkan tidak ada risiko

sama sekali. Biasanya, yang masuk dalam kategori konservatif adalah investor pemula yang baru saja tertarik untuk berinvestasi. Tipe investor yang seperti ini cocok untuk berinvestasi pada reksadana pasar uang.

2. Tipe Moderat

Tipe moderat adalah tipe investor dengan profil risiko sedang. Investor tipe moderat biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah, dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi masih tidak terlalu berani mengambil risiko. Untuk investor bertipe moderat, mereka masih bisa menoleransi risiko dalam berinvestasi. Tetapi tidak untuk risiko yang tergolong besar. Kemudian, mereka masih tetap berhati-hati dalam memilih instrumen investasi yang aman. Adanya fluktuasi pada pasar modal saat berinvestasi pun sudah mulai dipahami pada investor jenis ini. Tipe investor moderat, cocok untuk berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran.

3. Tipe Agresif

Tipe agresif adalah tipe investor dengan profil risiko yang tinggi. Investor tipe ini sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang juga tinggi. Biasanya investor yang seperti ini adalah investor yang sudah berpengalaman.

Tipe investor agresif ini adalah tipe investor yang sudah terbiasa terhadap fluktuasi harga pasar modal, bahkan terhadap fluktuasi yang tergolong ekstrim. Tipe investor agresif ini juga tidak takut untuk menaruh modal di instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, sehingga sangat cocok berinvestasi pada jenis reksadana saham.

Resiko Investasi

Memprediksi risiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*). Menurut Hartono dan Harjito (2002) bahwa resiko-resiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain:

1. Risiko daya beli (*purchasing power risk*) Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil
2. Risiko bisnis (*business risk*) Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan deviden.
3. Risiko tingkat bunga Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun.
4. Risiko pasar (*market risk*) Apabila pasar bergairah (*bullish*) pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu (*bearish*) maka harga cenderung turun.
5. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

Risiko tidak bisa dihindari, dan pada umumnya risiko muncul dari tiga kemungkinan, (Brigham dan Houston, 2004):

1. Besarnya investasi

Suatu investasi yang besar lebih baik dibanding investasi kecil, terutama dari unsur kegagalannya. Apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka kegagalannya bisa mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut, sedang investasi kecil mempunyai risiko yang kecil, artinya tidak terlalu banyak mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan.

2. Penanaman kembali dari *Cashflow*

Apakah perusahaan akan menerima proyek investasi dengan 24% selama 2 tahun atau yang mendatangkan keuntungan 20% selama 4 tahun. Jawabannya adalah seberapa besar kemungkinan hasil dari penanaman kembali investasi dengan hasil 24%. Apabila risiko dari penanaman kembali proyek pertama tersebut besar, maka proyek dengan hasil 20% lebih diutamakan.

3. Penyimpangan dari *Cashflow*

Seperti diuraikan di atas bahwa cashflow perusahaan didapat dari penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Cashflow tersebut untuk masing-masing proyek investasi tidak sama, ada yang variasinya besar dan ada yang variasinya kecil. Bila variasi penerimaan besar maka risikonya juga besar, demikian sebaiknya bila variasinya kecil, risiko yang di hadapi juga kecil.

Risiko dan profit akan terus ‘berdampingan’ dengan investasi, bukan berarti hal tersebut tidak bisa dicegah. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah resiko investasi adalah menentukan **target investasi yang jelas**, mulai dari jangka waktu investasi yang diinginkan, jenis investasi seperti apa dan perusahaan

apa yang ingin Anda investasikan, dan juga jenis risiko yang ingin diambil. Jika menginginkan investasi jangka pendek dengan risiko kecil, maka kita dapat berinvestasi di reksa dana sambil mempelajari pasar dan jenis instrumen investasi lainnya. Selain itu, setelah melakukan riset dan memutuskan ingin berinvestasi di instrumen apa, investor harus selalu memegang penuh kendali atas investasi Anda dengan melakukan pengendalian risiko investasi dan memonitor pergerakan investasi Anda. Hal ini sangat perlu dilakukan secara rutin agar Anda tidak kelewatan kesempatan ketika bisa menarik dan mendapatkan profit tinggi, atau kelewatan peringatan ketika investasi sedang dalam trend turun.

Daftar Pustaka

- Agus D Harjito, M. (2002). *Manajemen Keuangan. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Ardyansah, T. (2021, Juni 17). *Wikipedia*. Retrieved from Wikipedia Ensiklopedia Bebas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Deposito>
- Bodi, e. (2005). *Investment Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fischer, D., & Ronald J, J. (1995). *Security Analysis and Portfolio Management Sixth Edition*. Prentice Hall International.
- Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Jakfar, K. d. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis Cetakan ke Delapan*. Jakarta: Kencana.
- Jogiyanto, H. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: BPFE.
- Malinda, M. (2011). *Pengantar Pasar Modal Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Pakaya, S. I. (2013). *Resiko Investasi di Pasar Modal*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Putri, F. I. (2021, Juni 25). *Qoala*. Retrieved from PT. Anchor Technology Digital: <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/investasi-jangka-pendek/>
- Sari Dewi, G. K., & Vijaya, D. P. (2017). *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sutanto, H., & Umam, K. (2017). *Manajemen Investasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Profil Penulis



Musdalifah, S.Pd., M.Pd

Lahir di Soppeng, 06 Januari 1987. Penulis masuk Universitas Negeri Makassar pada tahun 2005 melalui Jalur IPC dan diterima di Jurusan Pendidikan Ekonomi. Selama kuliah, penulis aktif dalam organisasi himpunan dan organisasi diluar kampus. Selanjutnya, penulis menyelesaikan kuliah pada tahun 2010 dan langsung melanjutkan S2 (Magister) di Universitas Negeri Malang dengan Jurusan Pendidikan Ekonomi. Program Magister ditempuh kurang lebih 2 Tahun dan selesai tahun 2013. Setelah selesai, penulis diterima mengajar di STKIP Pembangunan Indonesia Makassar terhitung sejak September 2013 dan ditetapkan sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Tahun 2014. Selama menjadi Dosen di STKIP Pembangunan Indonesia, penulis terlibat aktif dalam kegiatan kampus untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam perkuliahan, penulis mengajarkan Mata Kuliah Ekonomi Moneter, Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro dan Ekonomi Sumber Daya. Penulis juga menjadi Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa guna menjadi pengarah bagi mahasiswa yang memiliki kendala selama mengikuti proses perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun. Penulis juga pernah menerima Hibah Penelitian dan Pengabdian dari DIKTI.

Email Penulis: musdalifahalmazurra@gmail.com

DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN

Dr. Diyah Santi Hariyani, S.E., M.Si

Universitas PGRI Madiun

Pengertian Manajemen Keuangan

Tujuan sebuah bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau meningkatkan *value of the firm* yang tercermin dari harga sahamnya bagi perusahaan yang sudah *go public*. Memaksimumkan keuntungan merupakan tindakan atau keputusan terkait dengan keuangan bagaimana cara mendapatkan perolehan dana semaksimal mungkin disertai penggunaan dana seminimal mungkin. Aktivitas sebuah organisasi atau perusahaan terkait dengan memperoleh dana, pengalokasian dan penggunaan dana merupakan tugas dari manajer keuangan. Sehingga manajemen keuangan menjadi hal penting bagi pemilik atau manajer keuangan.

Manajemen keuangan terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda dan disatukan menjadi satu kesatuan yaitu kata manajemen dan keuangan. Manajemen menurut Gomes (2000) berasal dari kata *to manage* artinya mengatur atau mengelola. Menurut Hariyani (2021) manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisaan, pengelolaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dari berbagai sumber daya sebuah organisasi. Keuangan merupakan

bidang keuangan yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang penyediaan dan penggunaan uang untuk bisnis.

Berdasarkan dua istilah tersebut maka manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik dan manajer keuangan dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang meliputi proses dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian sampai dengan evaluasi agar tujuan sebuah perusahaan dapat tercapai Fahmi (2015), Horne dan Wachowicz (2013), Husnan and Pudjiastuti (2015). Pengelolaan keuangan sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah bisnis perlu direncanakan dengan baik agar dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Sehingga manajemen keuangan harus memiliki tujuan yang jelas.

Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan menurut Atmaja (2008), Husnan and Pudjiastuti (2015) adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dengan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan manajemen keuangan tersebut dapat diwujudkan diantaranya dengan:

1. **Mengelola dan menjaga arus kas**

Pengelolaan kas merupakan proses dalam mengumpulkan, mengelola dan menjaga arus kas. Bagi sebuah organisasi menjaga *cash flow* agar dapat dikendalikan dengan baik diperlukan pengelolaan agar tidak terjadi pengeluaran kas yang membengkak. Arus kas masuk perusahaan dapat diperoleh dari pendapatan jasa, hasil penjualan, dan pendatan dari keuntungan investasi. Sedangkan arus kas keluar meliputi pembelian bahan baku, biaya proses produksi, biaya administrasi, biaya pemasaran dan

biaya-biaya lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Adanya manajemen keuangan dapat mengawasi dan mengendalikan jika terjadi pengeluaran kas yang membengkak sehingga dapat segera mengambil keputusan untuk mendapatkan solusi yang tepat.

2. Mengoptimalkan laba dan memaksimalkan kekayaan
 Laba perusahaan dikatakan maksimal ketika pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga peran manajer keuangan adalah mengelola aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan perusahaan. tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dengan cara meningkatkan harga saham. Ketika harga saham meningkat menunjukkan nilai perusahaan juga meningkat.
3. Mempersiapkan struktur modal
 Struktur modal terdiri dari modal yang dimiliki sendiri berupa laba ditahan serta kepemilikan perusahaan dan modal asing yang berasal dari utang jangka pendek dan jangka panjang. Peran manajer keuangan harus dapat mempersiapkan dan merencanakan struktur modal dengan mengalokasikan antara dana yang dimiliki dan dana yang diperoleh dari luar perusahaan.
4. Meningkatkan efisiensi
 Mencapai tujuan perusahaan salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi ditunjukkan dari kemampuan pengelolaan dalam menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan pendapatan.

5. Meminimalkan risiko operasional

Risiko dalam sebuah bisnis yang tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi kapan saja. Diperlukan sebuah analisis dan keputusan yang tepat dalam meminimalkan terjadinya risiko bisnis yang terjadi sewaktu-waktu dengan harapan perusahaan tidak sampai mengalami kerugian yang besar.

6. Mengurangi biaya modal

Biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Pembiayaan atau modal dalam jumlah yang besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Sehingga perusahaan harus dapat meminimalkan biaya modal yang dikeluarkan untuk memperoleh dana yang diperlukan agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

7. Memastikan kelangsungan bisnis masa depan

Keberlangsungan usaha (*going concern*) dimasa depan merupakan keberlanjutan atau kontinuitas sebuah bisnis dalam jangka panjang dengan harapan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Kondisi keuangan menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan sehingga diperlukan pengelolaan yang baik.

Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan diperlukan dalam membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh manajer keuangan perusahaan Horne and Machowicz (2013) yaitu:

1. Keputusan Investasi (*Investment Decision*)

Merupakan fungsi penggunaan dana atau pengalokasian dana, manajer keuangan diharapkan dapat mengambil keputusan terkait mengenai alokasi dana kedalam berbagai bentuk investasi yang memberikan tingkat pengembalian atau keuntungan bagi perusahaan. Besarnya *return on investment* akan mempengaruhi penerimaan pendanaan yang akan digunakan sebagai operasional dan juga penerimaan bagi para pemegang saham. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek seperti persediaan, piutang, surat-surat berharga. Sedangkan investasi jangka panjang berupa aktiva tetap seperti tanah, peralatan, kendaraan, mesin dan aktiva tetap lainnya. Keputusan investasi ini akan terlihat pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan pada sisi aktiva.

2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Merupakan fungsi manajemen terkait pengambilan keputusan mengenai alternatif pemilihan pendanaan. Keputusan pendanaan ini disebut juga dengan kebijakan struktur modal, bagaimana mempertimbangkan sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan untuk investasi, operasional serta kegiatan usahanya yang efisien. Kebijakan tersebut mengenai komposisi sumber dana optimal yang dipertahankan dengan memilih penggunaan pembiayaan dari modal sendiri atau modal asing.

3. Keputusan Dividen (*Dividend Decision*)

Merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan proporsi atau prosentase laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam

bentuk dividen kas atau ditahan untuk menambah modal investasi masa mendatang. Dividen merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham (Sulindawati et.al, 2017; Wiyono and Kusuma, 2017). Sehingga jika dividen yang dibagikan tinggi maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan dalam kondisi baik.

Prinsip Mengelola Keuangan

Prinsip-prinsip manajemen keuangan yang digunakan dalam mengelola keuangan yang perlu diterapkan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan manajer keuangan dalam melakukan pengelolaan dana. Dana yang diperoleh dan dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui penerimaan dan penggunaannya.

2. Konsistensi

Kebijakan, sistem, metode yang digunakan untuk keuangan perusahaan harus konsisten dari waktu ke waktu tidak berubah-ubah. Sehingga akan memudahkan dalam mengetahui atau menganalisis jika terjadi perubahan dan dapat dibandingkan pada periode sebelumnya.

3. Kelangsungan hidup

Menjaga kinerja perusahaan agar tetap sehat dan tidak mengalami kebangkrutan diperlukan penentuan strategi dan perencanaan untuk kebutuhan dan kelangsungan keuangan demi keberlanjutan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Tranparansi

Transparan dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu dan mudah diakses oleh setiap pihak yang berkepentingan. Transparansi menunjukkan bahwa tidak ada data keuangan yang disembunyikan sehingga tidak ada yang disembunyikan atau diselewengkan.

5. Standar akuntansi

Penyusunan laporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku dinegara tersebut. Sehingga memudahkan dalam memahami dalam membaca laporan keuangan yang telah disusun.

6. Integritas

Laporan keuangan yang disusun dapat dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatannya.

7. Pengelolaan

Pengelolaan keuangan yang tepat menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengimplementasikan anggaran sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah disusun sebelumnya.

Perencanaan dan Pengendalian Keuangan

Perencanaan keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memaksimalkan efektifitas untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan (Hakimah, 2021). Tujuan perencanaan keuangan yaitu untuk mengarahkan dan mengendalikan keuangan suatu perusahaan. Perencanaan keuangan memiliki manfaat yaitu sebagai:

1. Pertimbangan mengenai keuangan sebelum pembuatan keputusan
2. Mengurangi ketidakpastian perubahan pada waktu yang akan datang
3. Dasar penilaian rencana yang akan dijalankan memiliki proses yang baik atau tidak
4. Sarana untuk melakukan pengawasan
5. Standar mengenai penyusunan kinerja keuangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Pengendalian keuangan merupakan tahap dimana suatu perencanaan diimplementasikan. Perencanaan dan pengendalian keuangan memiliki hubungan yang erat sebagai umpan balik. Pengendalian keuangan tidak akan terjadi apabila tidak ada perencanaan begitu juga dengan perencanaan tidak akan tercapai jika tidak ada pengendalian. Tanggungjawab manajer adalah menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian agar tujuan sebuah perusahaan dapat tercapai. Maka untuk memudahkan dalam melakukan pengendalian diperlukan penyusunan sebuah anggaran.

Teori-Teori Manajemen Keuangan

Perkembangan teori tentang manajemen keuangan digunakan untuk mendukung aktifitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Teori tentang manajemen keuangan akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu ekonomi dan manajemen. Beberapa teori manajemen keuangan yang mendukung dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajer keuangan dan juga digunakan bagi akademisi dalam mendukung penelitiannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Pasar Modal Efisien (*efficient capital market theory*)

Teori pasar modal efisien, sering digunakan bagi para investor dalam mempelajari kondisi pasar modal agar bisa melakukan investasi dengan baik. Bahwa pasar modal yang efisien merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa harga saham saat ini mencerminkan seluruh informasi yang ada Fama (1970), Statman (1998). Menurut Fama (1970) terdapat tiga bentuk hipotesis pasar efisien yaitu:

- a. Hipotesis pasar efisiensi bentuk lemah, teori ini mengimplementasikan bahwa tidak ada informasi apapun yang menunjukkan tentang pergerakan pasar dan harga saham.
- b. Hipotesis pasar efisiensi bentuk semi kuat, teori ini menunjukkan bahwa nilai saham merupakan gambaran dari seluruh informasi yang dapat diketahui oleh publik secara relevan.
- c. Hipotesis pasar efisiensi bentuk kuat, teori ini menyatakan bahwa semua informasi tentang harga saham dapat diakses semua pihak

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen and Meckling (1976) teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul dari pihak *principals* yang mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa atas nama *principal* dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent tersebut dan masalah keagenan muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pemisahan pengelolaan antara pihak *principals* dan pihak *agent*. Pada teori keagenan yang disebut *agent* adalah manajemen dan *principal* adalah pemegang saham atau investor. Teori ini memiliki

asumsi bahwa masing-masing individu memiliki kepentingan diri sendiri sehingga munculah konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

3. Teori Struktur Modal

Teori ini berkaitan dengan keseimbangan antara modal dan utang jangka panjang suatu perusahaan. Beberapa teori tentang struktur modal diantaranya adalah:

- a. Teori Pendekatan Tradisional, mengasumsikan bahwa struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang rendah dan memberikan harga saham yang tinggi. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal dapat berubah-ubah untuk mendapatkan nilai perusahaan yang optimal.
- b. Teori Pendekatan MM (Modigliani and Miller)

Teori ini dikembangkan oleh Modigliani and Miller (1958) dan terbagi menjadi dua pendekatan yaitu:

- 1) Teori Modigliani dan Miller tanpa pajak,

Teori ini menyatakan bahwa struktur modal sama sekali tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan memiliki nilai yang sama antara yang menggunakan utang dan tidak menggunakan utang dalam struktur modalnya. Dampaknya struktur modal menjadi tidak relevan dan teori ini mendapatkan banyak kritikan karena telah mengabaikan perhitungan pajaknya.

- 2) Teori Modigliani dan Miller dengan pajak

Teori yang sebelumnya mendapatkan kritik karena tidak memasukkan pajak dalam perhitungannya dan dianggap tidak realistis,

kemudian Modigliani dan Miller pada tahun 1963 melakukan revisi dan memasukkan pajak dalam teorinya. Teori ini menyatakan bahwa utang mempengaruhi harga saham dikarenakan penggunaan utang yang menghasilkan beban bunga dianggap sebagai pengurang pajak, dimana beban bunga utang akan mengurangi EBIT dan berimplikasi pada penghematan pajak. Sehingga dikatakan dalam teori ini bahwa semakin banyak utang maka semakin tinggi nilai perusahaan dan mengasumsikan bahwa dengan utang sangat menguntungkan. Kesimpulannya bahwa struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah seratus persen bersumber dari utang.

c. *Packing Order Theory*

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Danalson pada tahun 1961, dan penamaan menurut *Packing Order Theory* dilakukan oleh Myers (1984). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyukai pendanaan yang berasal dari internal berupa laba ditahan, jika pendanaan dari eksternal akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu yaitu dengan penerbitan obligasi kemudian sekuritas dengan berkarakteristik opsi, yang terakhir jika belum mencukupi baru diterbitkanlah saham. Pertimbangannya bahwa biaya emisi obligasi lebih murah dibandingkan biaya emisi saham baru, karena dengan penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama.

d. *Trade-off Theory*

Menurut Myers (2001), teori ini menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan dan penggunaan utang yang disebabkan pengambilan keputusan tentang struktur modal. Teori ini merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan utang. Sehingga dengan penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan hanya pada titik tertentu, tetapi setelah sampai pada titik tersebut, maka penggunaan utang justru akan menurunkan nilai perusahaan.

4. Teori Kebijakan Dividen

Beberapa teori mengenai kebijakan dividen (Brigham and Houston, 2015), diantaranya:

- a. *Dividend Irrelevant Theory*, Miller dan Modigliani mengemukakan teori bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan karena rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak memengaruhi kesejahteraan pemegang saham. Nilai suatu perusahaan hanya bergantung pada laba yang dihasilkan oleh asetnya, bukan pada tentang laba itu dipisahkan antara dividen dan laba ditahan.
- b. *Bird in The Hand Theory*, menurut teori *bird in the hand*, pemegang saham lebih menyukai dividen tinggi dibandingkan dengan dividen yang akan dibagikan di masa yang akan datang dan *capital gains*. Teori ini mengasumsikan bahwa dividen lebih pasti dari pada pendapatan modal.
- c. *Information Content of Dividend Theory*, menurut teori *information content of dividend*, investor akan

melihat kenaikan dividen sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan di masa depan. Karena pembayaran dividen ini dapat mengurangi ketidakpastian dan mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.

- d. *Clientele Effect Theory*, adalah kecenderungan perusahaan untuk menarik jenis investor yang menyukai kebijakan dividennya, sehingga suatu perusahaan akan menetapkan kebijakan pembagian dividen khusus, yang diharapkan dapat menarik sekumpulan peminat atau *clientele* yang terdiri dari para investor yang menyukai kebijakan dividen khusus tersebut.
- e. *Expectation Theory*, teori menyatakan bahwa para pemegang saham memiliki harapan masing-masing terhadap besarnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal meliputi kebijakan dividen perusahaan dan eksternal meliputi kondisi perekonomian dan politik negara.

5. Teori Portofolio

Menurut Markowitz (1952) teori ini risiko investasi dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikan dari berbagai jenis investasi atau diversifikasi investasi. Hal ini didasarkan pada tujuan agar para investor menghindari risiko dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Teori ini menyarankan bahwa portofolio efisien sangat perlu untuk diterapkan. Portofolio efisien ini ditunjukkan dari tingkat *return* paling tinggi yang mampu untuk dikembalikan sebagai imbal hasil yang diharapkan atau *expected return*.

6. Teori Opsi

Menurut Black and Scholes (1973), teori ini menyatakan bahwa opsi dalam dunia pasar modal adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk menjual atau membeli sebuah komoditi, surat berharga keuangan atau sekuritas pada harga yang sudah ditentukan pada periode yang juga telah ditentukan. Opsi memiliki peranan untuk menjamin adanya hak yang bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Opsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu opsi beli dan opsi jual. Opsi beli merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Investor yang membeli *call option* berharap harga saham akan naik agar dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Opsi jual merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Investor yang membeli *put option* berharap harga saham turun atau berada di bawah harga harga yang telah disepakati di kontrak opsi (Tandelilin, 2010)

7. Stakeholder Theory

Menurut Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai *“any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective”*, bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori ini menekankan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk

kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. *Stakeholders* merupakan para pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lainnya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

8. *Signaling Theory*

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Menurut Ross (1977) menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan yang memiliki informasi baik mengenai perusahaannya akan dengan cepat menyampaikan informasi tersebut ke publik. *Signaling theory* bertujuan untuk memberikan sinyal *good news* maupun *bad news* kepada investor dan dapat mempermudah investor dalam pengambilan keputusan (Hariyani et al., 2021). Jika informasi tersebut memberikan sinyal *good news* akan direspon oleh investor sehingga akan berdampak pada kenaikan harga saham dan nilai perusahaan akan meningkat. Namun jika sinyal *bad news* mengindikasikan bahwa keinginan investor untuk berinvestasi semakin menurun sehingga akan mempengaruhi pada penurunan nilai perusahaan.

9. *Asymmetry Information Theory*

Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu memiliki informasi lebih banyak atau lebih dibandingkan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi. Terdapat dua macam asimetri informasi menurut Scott (2000) yaitu:

- a. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer lebih mengetahui informasi lebih banyak tentang prospek perusahaan dibandingkan investor dari luar sehingga akan mempengaruhi terhadap keputusan yang diambil.
- b. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham dan *stakeholder* sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

10. *Cashflow Discounted Theory*

Menurut Parker (1968) teori ini muncul didasari atas konsep nilai waktu uang (*time value of money*). Teori diskonto aliran kas ini ingin menunjukkan apakah sebuah investasi menguntungkan atau tidak bila dikaitkan dengan nilai waktu uang. Aliran kas perusahaan yang akan diperoleh di masa mendatang bisa dinilai sekarang dengan menggunakan faktor diskonto. Salah satu faktor diskonto adalah tingkat bunga. Proses menilai aliran kas di masa mendatang terdiri dari :

- a. Estimasi aliran kas di masa depan.
- b. Penilaian risiko aliran kas di masa depan.
- c. Menganalisa penilaian risiko dikaitkan dengan aliran kas.
- d. Penentuan nilai sekarang dari aliran kas.

Metode diskonto aliran arus kas juga memperhatikan tingkat risiko aliran kas, *return* investasi dan jangka waktu investasi. Kelemahan dari teori ini adalah didasarkan pada prediksi. Sehingga apabila prediksi tidak tepat maka langkah investasi yang diambilpun juga menjadi tidak tepat.

Daftar Pustaka

- Jensen, M.C & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Jensen, M.C & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Jensen, M.C & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Jensen, M.C & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Atmaja, Lukas Setia. 2008. *Teori & Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Option and Corporate Liabilities. *The Journal of Political Economy*, 81, 637-654.
- Brigham, Eugene F. dan Joel Houston. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11 buku 1. Jakarta, Salemba Empat
- Cardoso Gomes, Faustino. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Andy
- Donaldson, G. 1961. *Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of corporate debt capacity*. Boston: Graduate School of Business Administration, Harvard University
- E. Fama. (1970). Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work. *Journal Finance*, 383-417
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston, Pitman.
- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2007. *Teori Akuntansi*, Edisi 3, Universitas Diponegoro, Semarang

- Gomes, Faustino Cardoso. (2000) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Hakimah. (2021). Analisis Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada CV. Anugerah Jaya Surabaya. *Jurnal Sustainable*, 01(1), 84–103.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/stb.v1i1>
- Hariyani, D. S. (2021). *Manajemen Keuangan 1*. UNIPMA Press. Universitas PGRI Madiun.
- Hariyani, D. S., Ratnawati, T., & Rahmiyati, N. (2021). The Relationship Between Company Value and Good Financial Governance: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(7), 447–456.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no7.0447>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Markowitz, H. (1952). Portofolio Selection, *The Journal of Finance* 45, No. 1, 31-42.
- Miller, M., Modigliani, F., (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. *American Economic Review*, pp. 261 – 297.
[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00864-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00864-3)
- Modigliani, F. dan Miller. M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *American Economic Review*, 53 (3) June, 433-443
- Myers, S.C., (1984). The Capital Structure Puzzle. *Journal of Finance*, pp. 581-582.
- Myers, S.C. (2001). “Capital Structure.” *Journal of Economic Perspectives* 15:81-102
- Parker, R. H. (1968). Discounted Cash Flow in Historical Perspective. *Journal of Accounting Research*, 6(1), 58–71.
<https://doi.org/10.2307/2490123>
-

- Ross, S., 1977. The Determinant of Financial Structure: The Incentive Signaling Approach. *Bell Journal of Economics*. Spring: 23-40
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.
- Shefrin, H. dan M. Statman. 1998. The Disposition To Sell Winners Too Early And Ride Losers Too Long: Theory And Evidence. *The Journal of Finance*, 40(3), 777-790
- Spence, Michael. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3. (Aug., 1973), pp. 355-374
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Keenam Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YPKN
- Sulindawati, E., dan Yuniarta, A., dan Purnamawati, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis*. Depok: Rajawali Pers
- Tandelilin, Eduardus. (2010), *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama. Kanisius, Yogyakarta
- Wiyono, G., dan Kusuma, H. (2017). *Manajemen Keuangan Lanjutan Berbasis Corporate Value Creation*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Van Horne dan Wachowicz, Jr. (2013). *Fundamental of financial management*. 9th ed. USA: Prentice Hall. Wang

Profil Penulis**Dr. Diyah Santi Hariyani, S.E., M.Si**

Penulis merupakan dosen tetap Universitas PGRI Madiun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi (SE) dan Magister Sains (MSi) di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian, penulis menyelesaikan studi Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan, Akuntansi Manajemen, dan Pasar Modal. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah internasional dan nasional terakreditasi. Karya buku yang sudah diterbitkan berjudul Pengantar Akuntansi 1 (Teori & Praktik), Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi, Manaj. Keuangan 1.

Email Penulis: diyah.santi@unipma.ac.id

MANAJEMEN KEUANGAN

Madya Ahdiyat, S.E., M.M.

Universitas Halim Sanusi PUI Bandung/
BKPSDM Kabupaten Bandung Barat

Overview Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi-fungsi keuangan sebuah perusahaan (organisasi). Seorang manajer keuangan (SDM yang bertanggung jawab dalam melaksanakan manajemen fungsi-fungsi keuangan) bertugas mengelola fungsi-fungsi keuangan tersebut. Dalam hal semakin meningkatnya tugas dan fungsi manajemen keuangan ditambah lebih spesifik peran dan tujuannya maka tugas manajer keuangan mengalami transformasi dari sekedar fokus mencari sumber pendanaan (*financing*) menjadi tugas yang lebih kompleks yang mencakup perencanaan dan alokasi sumber daya dalam perusahaan (organisasi).

Menurut (Emery et al, 2010) *“manajemen keuangan merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumberdaya yang tepat.”* Sedangkan menurut (Suad Husnan dan Enny pudjiastuti, 1998) *“manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan.”* Ada pun menurut

(Hanafi, 2008), “*manajemen keuangan didefinisikan sebagai manajemen fungsi-fungsi keuangan perusahaan.*”

Dengan demikian pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang meliputi pemasaran, keuangan, produksi dan personalia sebuah perusahaan (organisasi). Manajemen keuangan perlu dikelola secara profesional oleh sumber daya manusia yang ahli dan spesialis di bidangnya agar perusahaan dapat bertahan dan mampu meningkatkan produktivitas dan keunggulannya.

Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen keuangan sebuah perusahaan (organisasi) dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pemasaran.
2. Fungsi Keuangan.
3. Fungsi Produksi.
4. Fungsi Personalia.

Dalam kegiatan manajemen keuangan, banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankannya. Oleh sebab itu, menjadi penting ketika seorang manajer harus melakukan suatu keputusan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen. Menurut (Martono dan Harjito, 2010) terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu:

1. Keputusan Investasi (*Investasi Decision*)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh

secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Rentabilitas investasi (*return on investment*) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu aktivitas investasi atau bisnis.

2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Keputusan pendanaan menitikberatkan pada dua hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum. Karena itu perlu ditetapkan apakah perusahaan akan menggunakan sumber dana eksternal yang berasal dari utang dengan menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang ditanggung perusahaan akan lebih minimal.

3. Keputusan Modal Kerja atau Pengelolaan Aset (*Asset Management Decision*)

Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar dari pada aktiva tetap.

Fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan fungsi-fungsi pokok (fungsi-fungsi utama) dari manajemen keuangan suatu perusahaan (organisasi). Ada pun berdasarkan

fungsi-fungsi manajemen, manajemen keuangan dapat dibagi juga ke dalam beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Perencanaan Keuangan (*Finance Planning*).
2. Pengorganisasian Keuangan (*Finance Organizing*).
3. Pelaksanaan Keuangan (*Finance Actuating*).
4. Pengendalian Keuangan (*Finance Controlling*).

Tugas Manajer Keuangan

Menurut (Hanafi, 2008), salah satu tugas manajer keuangan adalah mengambil keputusan, pendanaan, dan likuiditas dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (nilai saham). Sedangkan menurut (Brigham & Houston, 2001) tugas manajer keuangan adalah membuat keputusan tentang aktiva mana yang diperoleh, bagaimana aktiva tersebut dibiayai dan bagaimana mengelola sumber daya yang ada. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan, dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

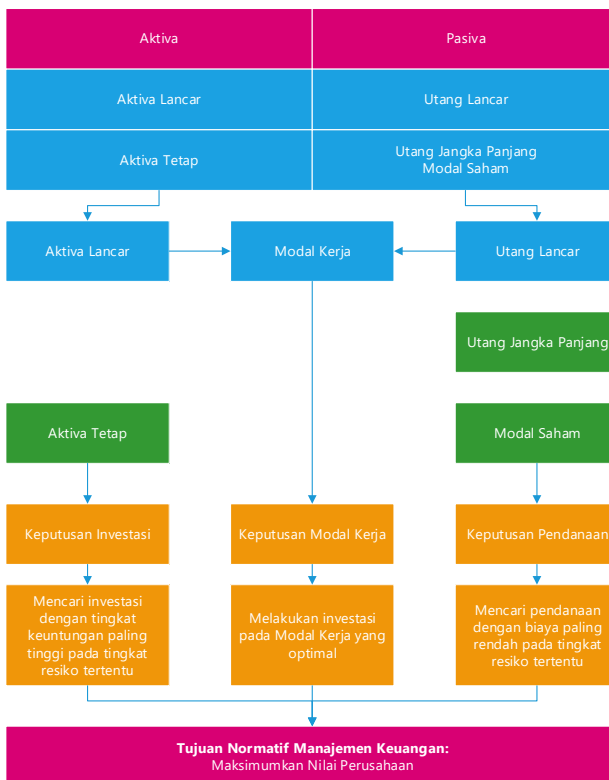
Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan menurut (Brigham & Houston, 2001) menyangkut lima aspek, yaitu:

1. Dalam peramalan dan perencanaan, dimana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan.
2. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya.
3. Manajer keuangan harus berkoordinasi dan melakukan pengendalian dengan para manajer lain di

perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin.

4. Menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan.
5. Manajer keuangan bertanggung jawab atas manajemen resiko.

Dari ke lima aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaan. Berikut adalah gambar tentang model neraca keuangan untuk memahami tugas manajer keuangan sebagaimana gambar 12.1 di bawah ini:



Gambar 9.1: Model Neraca Keuangan (Hanafi, 2008)

Fokus Manajemen Keuangan

Fokus manajemen keuangan adalah aliran kas (*cash flow*). Aliran kas mempunyai tiga dimensi yaitu besarnya aliran kas (*magnitude*), nilai waktu uang, dan resiko keuangan. Semakin besar aliran kas yang diterima dalam manajemen keuangan, maka semakin cepat (semakin dini) uang diterima dan semakin kecil resiko keuangannya. Dan aliran kas seperti tersebut merupakan aliran kas yang diinginkan oleh para manajer keuangan.

Selanjutnya akan dipaparkan fokus dari manajemen keuangan yaitu yang berkaitan dengan 3 (tiga) aktivitas, antara lain :

1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana berbentuk:
 - a. *Financial assets* (aktiva finansial) yaitu selembaar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan, misalnya: saham, sertifikat deposito, atau obligasi.
 - b. *Real assets* (aktiva riil) yaitu aktiva nyata: tanah, bangunan, peralatan.
2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.

Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin

tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan deviden.

Menurut (Martono dan Harjito, 2010) tujuan manajemen keuangan perusahaan ada tiga macam, yaitu :

1. Mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan.
2. Menjaga kelangsungan hidup.
3. Mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan

1. Fungsi Keputusan Investasi

Investasi adalah penempatan aktiva lancar dan aktiva tetap untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang paling tinggi pada tingkat resiko tertentu. Investasi merupakan upaya untuk menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan (*return*) di masa yang akan datang. Sementara itu pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan definisi keputusan investasi adalah sebuah keputusan terhadap aktiva yang dilakukan oleh manajer keuangan untuk memperoleh keuntungan.

Fungsi yang paling utama dalam manajemen keuangan adalah keputusan investasi yang merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang.

Rentabilitas investasi (*return on investment*) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu aktivitas investasi atau bisnis.

Menurut (Geoffrey, 2003) Ada lima unsur dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi

- a. Kebijakan Investasi, penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan.
- b. Melakukan Analisis sekuritas, Filosofinya; ada sekuritas yang *misprice*, analisis tidak dapat mendeteksinya, perlu fundamental analisis.
- c. Membentuk portofolio, melibatkan identifikasi aset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi, juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap investasi tersebut. Di sini masalah selektifitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor.
- d. Merevisi portofolio, berkenaan dengan pengulangan periodik dari tiga langkah sebelumnya yaitu dari waktu ke waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimilikinya
- e. Mengevaluasi kinerja portofolio, meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan *return* yang dihasilkan tetapi juga resiko yang dihadapi investor.

2. Fungsi Keputusan Pendanaan

Pendanaan adalah pembiayaan kegiatan operasional perusahaan baik yang bersifat *fixed cost* mau pun *variable cost*. Ada pun sumber pendanaan berasal dari internal melalui keuntungan dari kegiatan operasional mau pun dari eksternal dengan penawaran kepada publik dalam bentuk kepemilikan saham dan dalam bentuk utang pinjaman. Dengan demikian fungsi keputusan pendanaan artinya tugas manajer keuangan untuk mencari sumber pendanaan baik dari internal mau pun eksternal dan dari sumber pendanaan jangka panjang atau pun jangka pendek untuk membiayai berbagai operasionalisasi perusahaan.

Keputusan pendanaan menitikberatkan pada dua hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum. Karena itu perlu ditetapkan apakah perusahaan akan menggunakan sumber dana eksternal yang berasal dari utang dengan menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang ditanggung perusahaan akan lebih minimal.

3. Fungsi Keputusan Modal Kerja

Dibandingkan fungsi keputusan investasi dan fungsi keputusan pendanaan, fungsi keputusan modal kerja tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap penambahan nilai, akan tetapi fungsi keputusan modal kerja ini sama pentingnya dibandingkan dengan keputusan investasi dan keputusan

pendanaan. Biasanya fokus manajemen keuangan lebih dari separuh perhatiannya akan dihabiskan untuk mengelola kebijakan modal kerja.

Yang dimaksud modal kerja biasanya mengacu kepada aktiva. Modal kerja kotor merupakan aktiva lancar yang meliputi kas, piutang dagang dan persediaan. Sedangkan modal kerja bersih merupakan aktiva lancar dikurangi utang lancar. Kebijakan modal kerja berkaitan dengan rasio-rasio lancar khususnya rasio likuiditas. Modal kerja terdiri dari:

- a. Kas.
- b. Piutang Dagang.
- c. Persediaan.
- d. Pendanaan Jangka Pendek.

Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar dari pada aktiva tetap.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Cakupan kajian manajemen keuangan sangat luas dan mendalam. Selain berkaitan dengan perencanaan keuangan dan berbagai jenis laporan keuangan, manajemen keuangan juga membahas tentang pasar keuangan dan manajemen keuangan internasional serta berbagai kajian lainnya yang perlu dipahami oleh para praktisi dan akademisi di bidang manajemen keuangan.

Paling tidak terdapat beberapa ruang lingkup pembahasan manajemen keuangan yang meliputi berbagai topik seperti di bawah ini:

1. Laporan Keuangan
2. Pasar Keuangan
3. Nilai Waktu Uang
4. Penilaian Surat Berharga
5. Analisis Penganggaran Modal
6. Return dan Resiko
7. Model Keseimbangan Resiko
8. Model Empiris dan Arbitrage Pricing Theory
9. Biaya Modal
10. Teori Struktur Modal
11. Keputusan dan Analisis Struktur Modal
12. Analisis Investasi
13. Kebijakan Dividen
14. Efisiensi Pasar Keuangan
15. Sumber Pendanaan Jangka Panjang
16. Perencanaan Keuangan
17. Kebijakan Modal Kerja
18. Manajemen Kas
19. Manajemen Piutang
20. Pendanaan Jangka Pendek
21. Manajemen Keuangan Internasional
22. Restrukturisasi dan Kebangkrutan

23. Merger dan Akusisi

24. Instrumen Keuangan Derivatif

Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah sebuah tahapan manajerial berupa perencanaan yang berkaitan dengan aliran kas suatu perusahaan (organisasi) dan upaya untuk mengarahkan dan mengendalikan keuangan. Perencanaan keuangan mencakup tujuan yang ingin dicapai, menganalisis berbagai perbedaan tujuan yang ingin dicapai tersebut dengan kondisi aktual perusahaan (organisasi) dan menyiapkan alternatif rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan situasi terakhir (terbaru).

Perencanaan keuangan terdiri dari anggaran kas dan metode persentase penjualan. Anggaran kas melakukan perencanaan aliran kas masuk dan keluar di masa yang akan datang, sehingga perencanaan kas dan sinkronisasi kas dapat dilakukan dengan lebih baik. Sedangkan metode persentase penjualan dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan proforma (perkiraan) dan dapat juga digunakan untuk menghitung kebutuhan dana eksternal.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ikhtisar hasil dan proses kegiatan perusahaan (organisasi) dalam kurun periode tertentu. Biasanya terdapat 3 (tiga) laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan, yaitu:

1. Neraca;
2. Laporan Laba-Rugi; dan
3. Laporan Arus Kas.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kekayaan dan sumber dana untuk

membeli kekayaan tersebut. Sedangkan Laporan Laba-Rugi merupakan ringkasan aktivitas perusahaan dalam periode tertentu. Ada pun Laporan Arus Kas menyampaikan kegiatan aliran kas masuk dan kas keluar dalam periode waktu tertentu.

Biasanya laporan keuangan hanya menampilkan data dan informasi yang masih mentah dan harus dianalisis lebih lanjut. Agar bisa diolah menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk perusahaan, angka-angka dalam laporan keuangan harus diteliti lebih lanjut dengan berbagai metode dan pendekatan. Beberapa metode dan pendekatan untuk menganalisis laporan keuangan diantaranya: 1) analisis rasio keuangan; 2) analisis common size; 3) analisis Du Pont System; dan 4) Economic Value Added.

Dalam analisis rasio keuangan, ada 5 (lima) kategori rasio keuangan yang sering digunakan, yaitu:

1. Rasio Likuiditas;
2. Rasio Aktivitas;
3. Rasio Solvabilitas/Leverage;
4. Rasio Profitabilitas; dan
5. Rasio Pasar.

Kebijakan Modal Kerja

Kebijakan modal kerja akan terbaca pada rasio-rasio lancar, khususnya rasio likuiditas. Kebijakan modal kerja akan melihat *trade-off* antara resiko dengan *return* (tingkat keuntungan). Secara spesifik, modal kerja pada umumnya mempunyai tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada aktiva tetap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja, adalah:

1. Aktiva Lancar.
 - a. Karakteristik Bisnis;
 - b. Ukuran Perusahaan;
 - c. Aktivitas Perusahaan;
 - d. Stabilitas Penjualan Perusahaan.
2. Pasiva (Utang) Lancar.
 - a. Faktor Eksternal;
 - b. Faktor Internal Kebijakan Manajemen.

Besar kecilnya modal kerja akan tergantung kepada beberapa faktor. Strategi aktiva lancar agresif menggunakan aktiva lancar yang lebih sedikit relatif dibandingkan dengan aktiva tetap. Strategi pendanaan jangka pendek matching akan menggunakan sumber dana jangka pendek untuk mendanai aktiva lancar dan menggunakan sumber daya jangka panjang untuk mendanai aktiva tetap. Sementara itu strategi pendanaan konservatif cenderung agresif dan akan menggunakan sumber daya jangka pendek yang lebih banyak dibandingkan dengan sumber dana jangka panjang. Biasanya sumber dana jangka pendek mempunyai tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sumber dana jangka panjang, sehingga sumber dana jangka pendek akan lebih menguntungkan dibandingkan sumber dana jangka panjang.

Manajemen Kas

Dalam modal kerja, kas merupakan aset yang paling likuid. Sehingga secara praktek, likuiditas suatu aset akan diukur sejauhmana hubungan dan pengaruhnya terhadap kas. Selanjutnya aset akan disusun berdasarkan

likuiditas tersebut. Posisi modal kerja yang likuid berikutnya adalah piutang, karena hanya dengan pembayaran piutang, maka piutang tersebut akan berubah menjadi kas. Sementara persediaan berada pada posisi berikutnya secara likuid, karena untuk berubah menjadi kas, persediaan harus melewati minimal dua tahap, yaitu dengan menjual persediaan tersebut dalam bentuk kredit (sehingga berubah menjadi piutang), kemudian piutang tersebut dibayarkan dalam bentuk kas.

Kas sendiri biasanya berbentuk uang kertas, uang logam, mau pun rekening koran. Ada pun yang dimaksud dengan manajemen kas adalah proses pengelolaan kas agar mempercepat aliran kas masuk dan memperlambat aliran kas keluar dan memelihara saldo kas yang optimal.

Untuk mempercepat aliran kas masuk dilakukan dengan cara penjualan kas, potongan kas, dan desentralisasi penerimaan kas. Sedangkan upaya memperlambat aliran kas keluar dapat dilakukan dengan sentralisasi pembayaran, memanfaatkan float, dan cek dibayar pada waktu tertentu. Ada beberapa model untuk memelihara dan menentukan agar mendapatkan saldo kas yang optimal yaitu dengan model kas Baumol dan model kas Miller-Orr. Sinkronisasi pengeluaran arus kas dan penerimaan aliran kas dengan melakukan tiga hal di atas melalui anggaran kas dapat dilakukan untuk memperkecil saldo kas.

Manajemen Piutang Dagang dan Persediaan

Salah satu komponen dalam aktiva lancar adalah piutang dagang dan persediaan. Piutang dagang diletakkan setelah kas di sisi kiri neraca keuangan. Setelah itu diletakkan dan diteruskan dengan persediaan. Investasi dalam piutang dagang dan persediaan berkontribusi dalam meningkatkan manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*), sehingga bisa dilihat sebagai *trade-off* antara manfaat

dengan biaya. Piutang dagang diperlukan terutama untuk menjaga daya saing perusahaan, sehingga diharapkan dapat mendatangkan kas masuk (penjualan) yang lebih banyak.

Fokus pembahasan manajemen piutang dagang adalah manajemen piutang dagang yang mencakup beberapa isu, antara lain:

1. Faktor yang mempengaruhi besarnya piutang;
2. Kebijakan pemberian piutang; dan
3. Monitoring posisi piutang dagang.

Sedangkan fokus pembahasan manajemen persediaan adalah manajemen persediaan yang mencakup berbagai kajian yang dibicarakan, diantaranya:

1. Tipe-tipe persediaan;
2. Penentuan tingkat persediaan yang optimal; dan
3. Sistem pengendalian persediaan.

Sumber Pendanaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari internal melalui keuntungan dari kegiatan operasional mau pun dari eksternal dengan penawaran kepada publik dalam bentuk kepemilikan saham dan dalam bentuk utang pinjaman.

Sumber pendanaan perusahaan bisa bersifat jangka panjang atau pun bersifat jangka pendek. Sumber pendanaan jangka panjang biasanya berbentuk pendanaan saham, modal ventura, obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan. Saham dan obligasi diperjual-belikan di pasar modal (bursa saham) sedangkan modal ventura merupakan bentuk penyertaan yang tidak diperdagangkan sebagai-mana saham di bursa

efek/keuangan. Sementara tipe pendanaan jangka pendek dapat dibagi menjadi dua tipe berdasarkan kategori spontanitas terhadap tingkat kegiatan perusahaan, yaitu:

1. Pendanaan spontan (*spontaneous financing*).
 - a. Utang Dagang.
 - b. Rekening-rekening Akrua
2. Pendanaan tidak spontan (*non-spontaneous financing*).
 - a. Commercial Paper.
 - b. Pinjaman Kredit.
 - c. Factoring atau Penjualan Piutang Dagang.
 - d. Jaminan Piutang.
 - e. Jaminan Persediaan.
 - f. Akseptansi Bank.
 - g. Repo.

Pasar Keuangan

Yang dimaksud dengan pasar keuangan adalah bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus dana) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit dana). Di pasar keuangan ini, manajer keuangan akan terlibat secara ekstensif dengan berusaha memperoleh dana dari pasar keuangan dan berusaha menginformasikan hasil yang sudah dicapai kepada investor atau ke pasar keuangan agar harga saham mengalami kenaikan atau peningkatan.

Jenis-jenis pasar keuangan terdiri dari:

1. Pasar Modal versus Pasar Uang;
2. Pasar Spot dan Pasar Forward;

3. Pasar Primer dan Pasar Sekunder;
4. Pasar OTC dan Pasar OTM; dan
5. Pasar Valuta Asing (Valas).

Berbagai instrumen keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

1. Instrumen Pasar Uang (*Money Market Instruments*).
 - a. Sertifikat Bank Indonesia.
 - b. Commercial Paper.
 - c. Akseptansi Bank.
 - d. Certificates of Deposits.
 - e. Repurchase Agreement.
2. Instrumen Pasar Modal (*Capital Market Instruments*).
 - a. Obligasi.
 - b. Saham preferen.
 - c. Saham biasa.
 - d. Waran.
 - e. Konvertibel.

Manajemen Keuangan Internasional

Berbagai perusahaan baik secara langsung mau pun tidak langsung akan melakukan bisnis dengan pihak luar negeri (non domestik). Kegiatan bisnis tersebut bisa berupa ekspor atau impor suatu produk atau memiliki anak perusahaan atau cabang di negara lain. Tentunya lingkungan dan tata kelola perusahaan tersebut akan berbeda dengan lingkungan dan tata kelola perusahaan domestik dan praktis secara langsung atau pun tidak langsung akan terdampak oleh aktivitas negara luar (negara lain).

Manajemen keuangan internasional atau multinasional merupakan manajemen keuangan dalam ruang lingkup perusahaan internasional atau multinasional. Sehingga kata kunci pada sub bab ini adalah manajemen keuangan dan perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasional secara internasional yang berarti perusahaan tersebut eksis di beberapa negara lain. Perusahaan tersebut otomatis terpengaruh dan bertransaksi secara transnasional yaitu transaksi yang dilakukan melewati batas-batas geografis sebuah negara atau kawasan.

Ada berbagai motif yang mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan *go-international* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencari bahan mentah;
2. Mencari pasar;
3. Meminimalkan biaya; dan
4. Motif lain seperti untuk mendapatkan akses perkembangan teknologi dunia.

Daftar Pustaka

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Daft, R. L. (2002). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Dally, D. (2010). *Balance Score Card*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. (2004). *Organisasi*. Tangerang: Binarupa Aksara Publisher.
- Griffin, R. W. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hanafi, M. M. (2008). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Kadarisman. (2020). *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Retnowati, N., & Erma Widia, M. (2012). *Manajemen Kompensasi*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Shim, J. K., & Siegel, J. G. (2001). *Budgeting*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, G. R. (2006). *Asas Asas Menejemen*. Bandung: PT. Alumni.
- Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Profil Penulis



Madya Ahdiyat, S.E., M.M.

Penulis lahir di Bandung, 41 tahun yang lalu dan diberi nama Madya Ahdiyat. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen di Kota Bandung dan sekarang adalah kandidat Doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung.

Diangkat menjadi PNS pada tahun 2006 di Pemerintah Kabupaten Bandung dari Formasi Umum dan sekarang sedang meniti karir dalam Jabatan Fungsional (JF) Widyaiswara Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2018. Penulis juga mengabdikan sebagai Dosen dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung.

Hobi penulis adalah membaca buku dan traveling. Buku yang sering dibaca adalah novel dan buku manajemen. Telah melaksanakan Umroh (2016) dan pernah berkunjung ke Singapura, Malaysia, Thailand, China (2017), Mesir, Jordan dan Palestina (2018). Malang-Bromo, Lombok dan Bali adalah destinasi favorit di dalam negeri.

Penulis telah menulis sejumlah buku, diantaranya: Suplemen Ketahanan Keluarga (2019), Ekonomi Makro (2020), Platform Asesmen Pembelajaran (2020), Merdeka Menulis (2020), Pengembangan SDM Perguruan Tinggi (2020), Ekonomi Politik (2020), Manajemen Operasional (2020), Arsitektur Pengembangan Kompetensi Perbankan Syariah (2021), The Great Leader & The Ultimate Manager (2021), The Next Development Competencies & Corporate University (2021), Dosen Merdeka (2021), Mengelola SDM Produktif dan Unggul (2021) dan Pemasaran Kontemporer (2021).

Penulis dapat dihubungi melalui email: madyaabufathi@gmail.com

PELAPORAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Refni Sukmadewi, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut, (Pura, 2013). Perusahaan harus bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan pada akhir periode. Wujud tanggungjawab tersebut dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam suatu perusahaan karena laporan keuangan memberikan informasi yang berhubungan dengan keadaan suatu perusahaan sehingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut akan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan tersebut.

Pelaporan keuangan adalah penyajian semua informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan bisnis suatu perusahaan. Pelaporan keuangan mengacu pada pemberitahuan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Pelaporan keuangan menyediakan informasi keuangan penting dalam membuat suatu keputusan ekonomi. Dengan hasil tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan bisa membuat keputusan mengenai ketersediaan sumber daya perusahaan termasuk keputusan memberikan pinjaman, membeli saham dan obligasi dan menjualnya.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan mempunyai tujuan tertentu. Laporan keuangan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi.

Berikut ini tujuan penyusunan laporan keuangan, (Kasmir, 2010):

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan

8. Informasi keuangan lainnya.

Dengan memahami laporan keuangan perusahaan, akan dapat diketahui keadaan perusahaan secara keseluruhan yang menyangkut kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Pengguna Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang merupakan pengguna dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Investor

Untuk memastikan mau membeli atau menjual perusahaan, investor memerlukan informasi laporan keuangan yang menyangkut perolehan laba bersih dan pertumbuhan aset perusahaan.

2. Kreditor

Untuk memastikan jumlah kredit yang akan dibayar perusahaan ketika jatuh tempo, investor memerlukan informasi laporan keuangan yang menyangkut besarnya aset perusahaan, kesanggupan memperoleh laba bersih, rasio utang dengan set perusahaan.

3. Pemasok

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran kredit, pemasok memerlukan informasi laporan keuangan yang menyangkut jumlah aset perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, perbandingan utang dengan terhadap kekayaan perusahaan.

4. Pemerintah

Untuk menentukan besarnya pajak yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan, pemerintah memerlukan informasi laporan keuangan.

5. Karyawan

Karyawan memerlukan informasi laporan keuangan supaya bisa menilai kemampuan perusahaan memberikan peluang kerja, balas jasa, dana pensiun.

6. Masyarakat

Masyarakat memerlukan informasi laporan keuangan untuk mengetahui perkembangan kemajuan perusahaan dan kegiatan perusahaan.

Konsep-Konsep Penyusunan Laporan Keuangan

1. Konsep Kesatuan Usaha (*Business Entity Principle*)

Umumnya aktivitas bisnis dilakukan oleh perusahaan yang merupakan satu kesatuan ekonomi tersendiri. Kesatuan ini meliputi mulai dari yang berukuran kecil sampai dengan yang berukuran besar. Keuangan berurusan dengan penyajian kegiatan ekonomi tanpa memandang ukurannya. Penyajian kegiatan ekonomi dikonsolidasikan untuk pelaporan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Konsep ini menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik usaha. Untuk perusahaan yang dimiliki perorangan dan perusahaan dengan kepemilikan secara bersama harus dibuat suatu pos yang menunjukkan hubungan antara pemilik usaha dengan perusahaan seperti prive.

2. Konsep Kelangsungan Usaha (*Continuity Principle*)

Konsep ini menyatakan bahwa adanya pemikiran suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang lama. Perusahaan akan selalu beroperasi di waktu mendatang, kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan pertentangan dengan konsep tersebut. Konsep ini dibutuhkan oleh akuntansi karena jika konsep ini tidak valid maka ada metode akuntansi yang tidak akan dipakai lagi.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, perusahaan berupaya melaksanakan kegiatan nya dengan terus-menerus. Dalam usaha ini, akan dibuat laporan keuangan perusahaan berkala sehingga bisa membandingkan kemajuan atau kemunduran yang dialami oleh perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan disusun atas dasar kelangsungan usaha. Diasumsikan entitas tidak memiliki niat untuk melikuidasi atau mengurangi operasinya di masa yang akan datang, minimal dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Tetapi, bila ada ketidakpastian yang signifikan menyangkut kemampuan perusahaan melanjutkan usaha maka asumsi tersebut tidak terpenuhi, laporan keuangan mungkin disusun dengan dasar yang berbeda. Dasar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Konsep ini mewajibkan pihak manajemen menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya di masa yang akan datang pada saat menyusun laporan keuangan.

3. Konsep satuan moneter (*Monetary Principle*)

Pengukuran dengan satuan moneter artinya semua informasi utama dalam laporan keuangan diukur dengan satuan uang, karena uang sudah umum

digunakan untuk mengukur harta dan kewajiban perusahaan beserta perubahannya.

Konsep ini menginginkan supaya dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan sehingga ada nya pemahaman dari pembaca laporan keuangan.

Satuan moneter digunakan untuk satuan transaksi dalam laporan keuangan. Satuan moneter ini mengikuti satuan moneter nasional tempat perusahaan beroperasi. Konsep yang mendasari satuan moneter ini adalah nilai yang stabil. Naik turunnya satuan moneter tidak menjadi gangguan serius terhadap laporan keuangan. Saat ini, nilai uang praktis tidak lagi stabil sehingga asumsi stabilnya satuan moneter bukan merupakan suatu asumsi yang harus valid.

4. Konsep menandingkan antara penghasilan dan biaya (*Matching Principle*)

Konsep ini mengacu kepada adanya ketetapan atas penandingan antara pendapatan pada satu periode dengan biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Pendapatan yang melebihi satu periode tidak bisa untuk dibandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. Konsep ini merupakan pertemuan antara pendapatan dan biaya yang terjadi pada periode terjadinya. Tujuannya adalah untuk mempertemukan pengorbanan dengan manfaat dalam periode akuntansi yang berkaitan.

5. Konsep kehati-hatian (*Conservatism Principle*)

Konsep kehati-hatian inii menyatakan bahwa bila ada beberapa pilihan akuntansi maka pilihan yang diambil adalah pilihan yang kecil kemungkinannya untuk melaporkan pendapatan lebih besar dari yang

seharusnya. Konsep ini muncul karena ada kehendak pihak manajemen perusahaan dalam menaikkan pendapatan suatu perusahaan. Konsep ini merupakan reaksi yang berhati-hati atas suatu ketidakpastian, sedemikian rupa sehingga ketidakpastian dan risiko yang berhubungan dengan situasi bisnis bisa dipertimbangkan secara memadai. Ketidakpastian tersebut harus tergambar dalam laporan keuangan agar nilai produksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Laporan yang didasari prinsip kehati-hatian akan berguna untuk semua pemakai laporan keuangan.

6. Konsep periode waktu

Penyajian informasi keuangan yang dibuat secara berkala baik yang sifatnya tahunan, semester, triwulan maupun bulanan akan sangat membantu pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Untuk menentukan kinerja perusahaan secara akurat, diperlukan adanya batasan waktu sehingga penghasilan dan beban kesatuan ekonomi diukur selama waktu tertentu. Laporan keuangan disiapkan pada akhir tahun. Pilihan lain adalah dengan mengikuti alur bisnis suatu perusahaan. Akhir alur bisnis tidak selalu pada akhir tahun. Misalnya akhir alur bisnis pada pertengahan. Harga perolehan biasanya dipakai sebagai dasar pengukuran laporan keuangan. Harga perolehan merupakan harga pertukaran saat terjadi transaksi awal. Harga ini akan dipertahankan sebagai suatu ukuran hingga suatu sumber telah habis, dijual serta dihapus dari pencatatan keuangan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**1. Dapat dipahami**

Hal yang perlu di perhatikan dalam laporan keuangan yaitu para pengguna laporan keuangan harus memahami informasi yang ada di dalam laporan keuangan, yang bermanfaat dalam mengambil keputusan, dengan menguasai ilmu bisnis, ekonomi, keuangan. Bisa dipahami mengarah kepada pengguna laporan keuangan umum dan bukan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Informasi keuangan yang kompleks yang harus dimasukkan kedalam laporan keuangan tidak dapat disisihkan dengan didasarkan pada kesulitan pemahaman oleh pengguna laporan keuangan tertentu.

2. Relevan

Relevan nya suatu informasi bila informasi dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan ekonomi pemakainya serta mengevaluasi peristiwa yang telah lalu dan peristiwa mendatang.

Informasi dan kinerja perusahaan di masa lalu dapat dimanfaatkan untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dimasa mendatang serta faktor lain yang menarik perhatian pemakai seperti pembagian deviden dan gaji, dan kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Kemampuan laporan keuangan dalam memprediksi yaitu dengan menyuguhkan informasi tentang transaksi pada masa lalu. Contohnya, nilai prediktif laporan laba rugi bisa ditingkatkan kalau pos-pos pendapatan atau beban yang tidak biasa dan jarang terjadi diungkapkan secara tersendiri.

3. Keandalan

Keandalan bisa diartikan bahwa Informasi keuangan suatu perusahaan perlu di buktikan kebenarannya. Pembuktian tersebut dilakukan oleh orang yang independen yang menggunakan metode yang tetap

Syarat kualitas keandalan suatu informasi bila suatu informasi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan penggunaannya dapat diandalkan sebagai penyajian informasi yang jujur. Tingkat keandalan berbeda-beda yang bergantung pada kondisi yang dihadapi. Penggunaan informasi menyesatkan bila penyajiannya tidak dapat diandalkan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode dan membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain untuk menganalisis kinerja perusahaan. untuk tujuan perbandingan tersebut, pengukuran dari peristiwa lain yang sama dilakukan dengan konsisten baik antar periode dan dengan perusahaan lain. Hal ini menyebabkan bahwa pemakai harus mengetahui informasi kebijakan akuntansi beserta perubahan kebijakan tersebut dan melihat pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut.

Para pemakai harus bisa mengenali perbedaan kebijakan akuntansi antara periode dan perbedaan kebijakan akuntansi dengan perusahaan lain. Kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, akan membantu pencapaian daya banding.

5. Netralitas

Laporan keuangan yang disajikan tidak boleh memihak kepada pada salah satu pengguna nya saja atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi laporan keuangan harus ditujukan untuk kebutuhan umum pemakai laporan keuangan. Penyajiannya tidak boleh merugikan pihak-pihak lain. Informasi keuangan bersifat netral bila terbebas dari bias tertentu yang akan berpengaruh terhadap hasil ke arah yang tertentu.

6. Tepat waktu

Penyajian laporan keuangan harus dilakukan tepat waktu sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Jika laporan keuangan tidak tersedia pada saat dibutuhkan maka laporan keuangan tersebut tidak akan bermanfaat dalam suatu pengambilan keputusan perusahaan. Pihak manajemen perusahaan menyelaraskan pelaporan keuangan tepat waktu dan informasi yang andal. Penyediaan informasi tepat waktu seringkali harus melaporkan sebelum semua aspek transaksi lain diketahui sehingga berurangnya keandalan suatu informasi.

7. Lengkap

informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan harus lengkap dan benar. Ketidaksengajaan dalam pengungkapannya menjadikan suatu informasi menyesatkan sehingga menjadi tidak sempurna ditinjau dari relevansinya.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan

1. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi mencakup nilai pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan laba rugi memperlihatkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu misalnya bulanan, semester dan tahunan.

Dalam waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun, perusahaan menghitung laba atau rugi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk laporan laba rugi. Laba atau rugi diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan dan biaya selama waktu tertentu. Perusahaan akan mendapatkan laba jika pendapatan perusahaan lebih besar dari biaya-biaya perusahaan. sebaliknya Perusahaan akan mengalami kerugian jika pendapatan perusahaan lebih kecil dari biaya-biaya perusahaan.

Komponen laporan laba rugi komprehensif terdiri dari:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan atas harta perusahaan karena terjadinya penjualan produk atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perusahaan selama satu periode pelaporan keuangan.

Pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas usaha utama perusahaan. Contohnya pendapatan jasa, pendapatan usaha. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas usaha bukan utama perusahaan.

Contohnya pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan dividen.

b. Biaya

Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode pelaporan keuangan untuk mendapatkan barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan memiliki kegunaan nya di suatu periode pelaporan keuangan.

Komponen biaya-biaya dalam dalam laporan keuangan terdiri dari biaya usaha dan biaya diluar usaha. Biaya usaha adalah beban yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.

Biaya usaha dikelompokkan menjadi biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya yang berkaitan dengan penjualan atau pengiriman barang. Contohnya biaya gaji bagian penjualan, biaya iklan, biaya pengiriman, biaya pengapalan, biaya transportasi penjualan. Biaya administrasi adalah biaya yang berkaitan dengan biaya umum dan biaya administrasi kantor. Contohnya biaya gaji bagian administrasi, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan. Biaya diluar usaha adalah beban yang berasal dari luar aktivitas utama perusahaan. contohnya beban bunga, beban sewa.

c. Laba sebelum pajak

Laba yang diperoleh dari pengurangan pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha dengan biaya usaha dan biaya luar usaha.

d. Pajak penghasilan

Jumlah pajak yang dikenakan terhadap perusahaan yang berasal dari penghasilan karyawan.

e. Laba bersih

Laba yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laba yang diperoleh perusahaan dari pengurangan semua pendapatan perusahaan dengan semua biaya-biaya perusahaan

2. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan ekuitas yang dialami perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam laporan perubahan ekuitas menunjukkan modal awal perusahaan, laba bersih, dan dividen perusahaan. laporan perubahan ekuitas akan berbeda untuk setiap perusahaan bila dilihat dari segi kepemilikan.

3. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan berupa aset, liabilitas dan ekuitas pada periode waktu tertentu. Perusahaan harus membuat laporan posisi keuangan secara sistematis karena laporan tersebut menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya dan bagian dari laporan keuangan yang penting bagi perusahaan.

Komponen laporan posisi keuangan:

1. Aset

Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan pada periode waktu tertentu yang memiliki kemampuan menghasilkan manfaat ekonomis terhadap perusahaan dimasa yang akan datang.

Aset terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lainnya.

a. Aset lancar

Aset lancar merupakan harta yang bisa diuangkan secara ketika dengan umur satu tahun. Aset ini sifatnya paling likuid daripada aset yang lain. Saat perusahaan memerlukan uang untuk pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo, uang tersebut bisa didapatkan dari aset lancar.

Komponen aset lancar antara lain kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, sewa dibayar dimuka, dan aset lancar lain-lainnya.

b. Aset tetap

Aset tetap harta yang dimiliki perusahaan yang berwujud fisik yang dipakai dalam aktivitas normal perusahaan dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Contoh tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mesin.

c. Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan penggolongan aset yang tidak masuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap perusahaan. contohnya bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian, uang jaminan, uang muka investasi.

2. Liabilitas

Liabilitas menurut Giri (2014) adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumberdaya suatu entitas pada masa yang akan datang. Liabilitas terdiri dari liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang.

a. Liabilitas lancar

Merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Liabilitas lancar sama dengan liabilitas jangka pendek. Contoh utang dagang, utang gaji, utang pajak, pendapatan diterima dimuka.

b. Liabilitas jangka panjang

Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun. Liabilitas jangka panjang dimanfaatkan untuk investasi perusahaan. Contoh utang obligasi, hutang bank jangka panjang, hipotek, utang wesel, kewajiban sewa guna usaha, hak kewajiban pensiun dan lainnya.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan aset yang ditanamkan pemilik perusahaan kedalam suatu perusahaan. komponen ekuitas terdiri dari modal disetor, laba ditahan, dan cadangan laba.

Modal disetor merupakan modal yang disetor kedalam perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham. Laba ditahan merupakan laba atau rugi perusahaan yang belum didistribusikan kepada para pemegang saham perusahaan dikarenakan alasan tertentu. Cadangan laba merupakan laba perusahaan yang tidak didistribusikan ke para pemegang saham dan sengaja untuk dicadangkan oleh perusahaan untuk laba tahun berikutnya

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran kas) dalam satu

periode tertentu, (Pura, 2013). Aliran kas digunakan untuk melihat mampu atau tidaknya perusahaan dalam memenuhi hutang-hutang nya. Dengan laporan arus kas, pemakai laporan keuangan bisa melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan penggunaan kas.

Laporan arus kas diklasifikasi sebagai berikut:

a. Aktivitas operasi

Adalah aktivitas yang berhubungan dengan usaha perusahaan dalam menghasilkan dan menjual produk. Laba bersih perusahaan akan mengalami perubahan dimasa yang akan datang bila terjadi perubahan dalam arus kas operasi. Arus kas masuk terdiri dari penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, pendapatan bunga dividen. Arus kas keluar terdiri dari pembayaran kepada pegawai, pemasok, pajak, dan bunga pinjaman.

b. Aktivitas investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian harta perusahaan yang merupakan sumber penghasilan perusahaan. Arus kas masuk terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan saham. Arus kas keluar terdiri dari pembelian aset tetap,, pembelian investasi saham

c. Aktivitas pendanaan

Aktivitas yang berhubungan dengan usaha menyiapkan kebutuhan dana dari bermacam sumber untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan.

Aktivitas ini menjadikan adanya perubahan dalam komposisi kontribusi modal. Arus kas nya menunjukkan ada nya pergerakan kas sebagai

akibat adanya pendanaan dari dan atau kepada pemegang saham perusahaan maupun dari kreditur. Arus kas masuk terdiri dari hasil penjualan saham obligasi atau pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar terdiri dari pembayaran angsuran hutang, pembayaran beban bunga, pembelian saham kembali perusahaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Laporan yang menyediakan informasi mengenai keterangan yang membutuhkan penjelasan atas laporan keuangan yang sudah disajikan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, neraca dan arus kas. Tujuannya supaya pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan memahami dengan jelas atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Giri, E. F. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Hanafi, M., & Halim, A. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martani, D., Veronica NPS, S., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pura, R. (2013). *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Erlangga.
- Sjahrial, D. (2012). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: PT Indeks.
- Sunyoto, D. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Profil Penulis**Refni Sukmadewi, S.E., M.M.**

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan Magister bidang Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan di Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2007. Memulai karir di bidang akademik sejak tahun 2012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda Pekanbaru. Sejak tahun 2015 diangkat sebagai Dosen Tetap Program S1 Progam Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda Pekanbaru. Jabatan akademik telah diperoleh sejak tahun 2017 sebagai asisten ahli dan pada tahun 2021 sebagai Lektor. Penulis memiliki kepakaran di bidang keuangan, yaitu manajemen keuangan, Anggaran Perusahaan, Analisis Laporan Keuangan dan Akuntansi. Penulis pun aktif meneliti di bidang keuangan

Email Penulis: refni.dhewi@gmail.com

SISTEM DAN LEMBAGA KEUANGAN

Muhammad Ulin Nuha, S.E., M.M.

Universitas Wahid Hasyim

Pendahuluan

1. Sejarah Perkembangan Perbankan

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan adalah satu dari sekian agen pembangunan didalam suatu negara yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus) kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit) untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut (Budisantoso & Nuritomo, 2018) praktik perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi, praktik – praktik perbankan saat itu sangat membantu lalu lintas perdagangan berupa media tukar menukar uang. Lama kelamaan praktik tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menipikan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Pada zaman babilonia 2000 tahun sebelum masehi, praktik perbankan didominasi oleh transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan tingkat bunga 20%

perbulan. pada saat itu praktiknya antara lain bank menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada kalangan pedagang, dan bank mendapatkan penghasilan dengan mengenakan biaya dari jasa penyimpanan uang masyarakat.

Perbankan modern dimulai pada abad 16 di daratan Eropa, pada saat itu para tukang emas menerima emas menerima logam dan perak untuk disimpan, kemudian tukang emas memberikan surat bukti penyimpanan emas yang ditunjukkan dengan surat deposito atau disebut juga dengan *Goldsmith's Note*, yang selanjutnya *Goldsmith's Note* digunakan untuk alat pembayaran. Dan untuk transaksi penyimpanan serta penyerahan *Goldsmith's Note* dilakukan di atas meja, yang selanjutnya dinamakan *Banca* yang berarti meja, dan sampai sekarang lembaga tersebut dinamai sebagai Bank.

2. Perkembangan perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia dimulai sejak abad ke 16 tepatnya pada tahun 1600 mulai kedatangan bangsa eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah – rempah, selain itu di Nusantara sendiri telah berdiri kerajaan – kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Pada tahun 1602, pembentukan maskapai dagang *Vereenigde Oost-indische Compagnie* yang dikenal dengan nama VOC (persekutuan Dagang Hindia Timur) dan mata uangan Real Spanyol mulai masuk ke Nusantara. Pada tahun 1603 VOC mulai membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis meskipun ahirnya gagal. Pada tahun 1746, di Nusantara berdiri bank yang pertama untuk menunjang kegiatan perdagangan yaitu Bank van

Courant yang mempunyai tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lainnya, pada tahun 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening yang bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutar uang mereka dilembaga ini dengan iming-iming imbalan bunga.

Pada tahun 1818 Bank Courant en Bank van Leening resmi mengalami penutupan karena krisis keuangan. Pada tahun 1828 pendirian De Javasche Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia, pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan octrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank (DJB) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi dan memiliki kewenangan untuk mencetak uang Gulden di wilayah Hindia Belanda, dan De Javasche Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat.

Rentang tahun 1870-1942, De Javasche Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu: Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjungbalai (1908), Tanjungpura (1908), Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Kutaraja (1918), Kediri (1923), Pematang Siantar (1923), Madiun (1928).

Pada tahun 1942, De Javasche Bank dilikuidasi, Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG). Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,

Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan UUD 45 pasal 23 yaitu “Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan Undang-undang”, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang (currency war). Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan “uang merah” dan ORI dikenal sebagai “uang putih”.

3. Sejarah Uang

Menurut (Alrosyid, 2019) Perkembangan uang berbanding lurus dengan perkembangan pola piker manusia, pada tahap awal sebelum barter, manusia pada zaman sebelum barter masih memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara mengumpulkan bahan pangan sandang untuk dirinya sendiri dan disimpan didalam persembunyian. Pada zaman barter manusia sudah menyadari sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan barter merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan cara tukar menukar barang sesuai kesepakatan antara satu dengan yang lain.

Periode uang pada zaman setelah barter, sistem barter merupakan sistem yang menyulitkan manusia saat

itu, karena kedua orang atau kelompok harus sama – sama menemui kecocokan dalam setiap transaksi, oleh karena itu manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar, seperti kulit kerang, kopi, garam, dan lain – lain. Pada saat itu masyarakat Romawi menggunakan garam sebagai upah pekerja, orang Inggris juga menggunakan garam sebagai upah, dan mereka menyebut upah dengan sebutan *salary* yang berarti garam.

Ciri – ciri uang barang :

- a. Barang cepat rusak dan tidak tahan lama,
- b. Tidak memiliki nilai
- c. Tidak memiliki pecahan
- d. Sulit untuk menyimpan dan membawanya
- e. Hanya berlaku di daerah tertentu

Periode uang barang kemudian dinilai tidak efektif oleh masyarakat karena mudah rusak dan tidak tahan lama, oleh karena itu masyarakat mencari barang lain yang memiliki ketahanan yang lebih lama, uang yang digunakan pada zaman ini memiliki beberapa ciri seperti tidak memiliki mata uang, memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, terbuat dari bahan besi dan timah, hanya berlaku di daerah itu saja. Uang ini tidak dipergunakan lagi setelah pedagang china datang membawa koin kepeng sebagai alat pembayaran.

Periode uang setelah uang barang adalah uang logam, uang logam yang pertama dibuat pada tahun 500-600 sebelum masehi dengan gambar hewan dengan komposisi emas dan perak. Dan uang logam dimulai pada zaman raja Lydia Alyattes Di beberapa negara di Eropa pada abad ke 6 sebelum masehi juga mulai membuat desain untuk mata uang mereka.

Perkembangan perekonomian terus memaksa untuk memakai logam mulia dalam jumlah yang sangat banyak sebagai bahan untuk membuat uang, sementara jumlah logam mulia sangat terbatas. Oleh karena itu terciptalah uang kertas. Bangsa yang menggunakan uang kertas pertama adalah bangsa china ketika di pimpin oleh dinasti T'ang. Konon ceritanya uang kertas di buat dari kulit kayu pohon murbei, dan untuk daun digunakan untuk memberi makan ternak ulat sutera.

Stabilitas Sistem Keuangan

1. Definisi Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan adalah upaya yang dilakukan saat suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil, sistem keuangan dikatakan tidak stabil ketika sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan perekonomian. Ketidakstabilan sistem keuangan disebabkan oleh berbagai macam hal dan pada umumnya kombinasi kegagalan pasar yang bersumber dari domestik maupun internasional.

Sistem keuangan memiliki peranan yang sangat penting didalam perekonomian berupa mengalokasikan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (defisit), ketika sistem keuangan tidak berjalan dengan sempurna akan berakibat perekonomian akan mengalami pelambatan. Pada dasarnya sistem keuangan berkaitan dengan 2 elemen antara lain stabilitas harga dan stabilitas sector keuangan yang mencakup lembaga keuangan secara keseluruhan mendukung jalannya sistem keuangan, ketika salah satu terganggu, maka akan berdampak kepada sektor yang lain, sebagai contoh, ketika inflasi

mengalami kenaikan, maka akan berdampak kepada kebijakan uang ketat, suku bunga akan mengalami kenaikan, dan risiko kredit juga akan tinggi. Menurut (Perbankan, n.d.) untuk memiliki kondisi sector keuangan yang stabil, maka diperlukan beberapa prasyarat antara lain, lembaga keuangan yang sehat, pasar keuangan yang stabil, serta lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten.

2. Peran bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan

Bank Indonesia merupakan otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang ada di Indonesia dan berfungsi menjaga sistem moneter dan sistem pembayaran, dan keduanya tidak bisa berjalan sendiri, karena kebijakan moneter mempunyai dampak bagi sistem pembayaran, dan juga sistem pembayaran memiliki dampak bagi kebijakan moneter.

Bank Indonesia memiliki peran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui :

- a. Mengatur instrumen suku bunga, dan operasi pasar terbuka.
- b. Menciptakan regulasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan perbankan.
- c. Menciptakan regulasi yang terkait dengan kelancaran sistem pembayaran untuk meminimalisir risiko yang timbul dari ketidaklancaran sistem pembayaran.
- d. Melakukan pemantauan kerentanan sector keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak kepada stabilitas sistem keuangan.
- e. Menjadi *lender the last resort* yang berarti pengaman terakhir ketika sistem keuangan tidak stabil.

3. Strategi Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan

Strategi untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan adalah dengan inklusi keuangan, menurut (Dienillah & Anggraeni, 2016) Inklusi keuangan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif di negara-negara Asia. Namun, itu dapat menyebabkan stabilitas atau ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Peningkatan dalam inklusi keuangan, aset lancar perbankan, PDB per kapita, dan investasi portofolio dapat menjadi strategi untuk meningkatkan stabilitas keuangan pada tahun yang telah ditentukan dan yang akan datang.

Menurut (Hannig & Jansen 2010) Inklusi keuangan adalah upaya untuk membuat masyarakat yang tidak *bankable* untuk menggunakan jasa – jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, transfer, dan jasa keuangan yang lain.

4. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan merupakan keadaan sistem keuangan yang bekerja efektif dan efisien sehingga mampu untuk bertahan dari gejolak yang datang dari dalam dan luar negeri. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga akan memperkuat sistem keuangan dan dapat bertahan dan kuat menghadapi gangguan yang dapat mengancam berlangsungnya fungsi intermediasi pada perbankan. Stabilitas sistem keuangan dapat terlaksana dibutuhkan identifikasi terhadap sumber yang menjadikan ketidakstabilan sebuah sistem keuangan yang berguna untuk mitigasi risiko yang mungkin timbul dan bisa memberikan dampak kepada sistem keuangan di masa yang akan datang (Bank Indonesia, 2018) (Indonesia, 2014) pengawasan dibidang makroprudensial meliputi monitoring,

identifikasi atas risiko sistemik yang terdapat pada sistem keuangan, dalam proses pengawasan, Bank Indonesia memantau potensi risiko baik yang berasal dari lembaga keuangan bank dan non bank, pasar keuangan, koperasi, dan rumah tangga. Pengawasan tersebut bertujuan untuk melihat tingkat risiko sistematis yang akan terjadi, bukan untuk menilai tingkat kesehatan lembaga keuangan.

Dalam pelaksanaan menjaga stabilitas sistem keuangan, bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum seperti :

- a. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Bank Sentral dan Bank Umum

1. Fungsi dan peran bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai fungsi utama yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter, menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sistem keuangan. Untuk menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter, bank Indonesia menjaga stabilnya harga barang dan jasa yang dicerminkan kedalam perkembangan laju inflasi, dan juga menjaga kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Untuk menjaga kestabilan sistem keuangan,

Bank Indonesia memastikan sistem keuangan nasional berfungsi dengan efektif dan efisien dan mampu bertahan kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, selain itu bank Indonesia juga memiliki fungsi sebagai *lender of the last resort* yaitu bank Indonesia menjadi otoritas yang memiliki wewenang untuk menyediakan likuiditas pada saat krisis terjadi. Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui mitigasi risiko sistematis dapat melalui kebijakan makroprudensial, dan melakukan pengawasan terhadap makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan.

2. Kesehatan dan kerahasiaan bank

a. Kesehatan bank

Menurut (Perbankan, n.d.) Lembaga-Lembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan / bantuan pihak luar (*eksternal*). Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain:

- 1) Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank.

- 2) Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui *contagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan system problem.
- 3) Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, persentase biaya terhadap PDB di negara-negara yang mengalami krisis sektor perbankan.
- 4) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*).
- 5) Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

b. Kerahasiaan bank

Penyalahgunaan data keuangan nasabah merupakan risiko yang harus dihindari oleh semua bank, dan perbankan tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi terkait dengan data keuangan nasabah, seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan produk perbankan yang lainnya. Tetapi ketika ada hal yang diatur oleh undang – undang yang perbankan untuk mencegah tindak pidana dan pencucian uang, maka diperbolehkan untuk memberikan informasi kepada lembaga tertentu.

Seperti yang dikatakan (Zaini, 2018) dalam rangka menghidari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuat aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun yang berkaitan dengan

keuangan nasabah, simpanan, dan penyimpanannya, kecuali dalam hal tertentu disebutkan secara tegas didalam undang – undang perbankan.

Menurut (Rani, 2014) kegiatan perbankan berdasarkan kepada asas fidusia antara bank dengan nasabah, nasabah menyimpan uang mereka di bank dan untuk menambah kepercayaan nasabah, bank memberikan jaminan bahwa uang yang simpan didalam bank akan aman dan informasi mengenai nasabah juga akan dirahasiakan oleh bank. menjaga kepercayaan nasabah kepada bank dalam menjalankan kegiatannya usaha juga harus menggunakan prinsip kerahasiaan yang merupakan suatu bentuk komitmen dan perlindungan bank dalam menjaga data pribadi nasabah.

3. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, dan penyalur dana akan dilakukan setelah dana dari masyarakat terhimpun. Kemudian bank menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara yang efisien dan keberhasilan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dapat dilihat dari: 1). tingkat kepercayaan nasabah kepada bank, dan itu bisa dilihat dari pelayanan perbankan, isu – isu ekonomi, dll. 2). Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diterima nasabah dan dibandingkan dengan insvestasi lain.

Sumber dana yang dimiliki bank ada 3 : 1). Dari dana sendiri, yaitu dana yang berasal dari investor yang digunakan untuk operasional bank, 2). Dana dari masyarakat, yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro. 3). Dana dari sumber yang lain.

Kegiatan selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat ingin meminjam dana ke bank tentu memperhatikan tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank. salah satu komponen perhitungan bunga adalah penyesuaian risiko. Risiko tersebut adalah : 1) risiko likuiditas, risiko kredit, risiko investasi, risiko operasi, risiko kecurangan, dan risiko fidusia.

Lembaga Keuangan

1. Pengertian, Peran, dan Fungsi Lembaga Keuangan

Pengertian lembaga keuangan

Ada beberapa definisi mengenai lembaga keuangan:

- a. Menurut (Siamat, 2007) badan usaha yang kekayaannya berupa asset keuangan atau tagihan, dan asset non finansial atau asset riil.
- b. Lembaga keuangan adalah badan yang mempunyai kegiatan usaha yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.
- c. Menurut (Syarif, 2000) lembaga keuangan adalah badan yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.

2. Peran lembaga keuangan

Lembaga keuangan mempunyai peran yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus) dan lembaga penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan (deficit) berupa kredit.

Menurut (Fauziah et al., 2019) Fungsi lembaga keuangan dapat dilihat dari : 1) lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan, 2) lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang giral dan deposito. 3) lembaga keuangan berfungsi untuk menciptakan uang guna menstabilkan mata uang yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang diinginkan.

3. Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara untuk penghimpunan dana yang lengkap, namun kegiatannya tidak jauh berbeda dengan bank. lembaga keuangan tidak secara langsung menghimpun dana melalui tabungan, giro, dan deposito, tetapi melalui kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan juga menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit dan penyertaan.

Bentuk lembaga keuangan bukan bank:

a. Asuransi

1) Pengertian

Asuransi adalah sebuah perlindungan terhadap risiko tidak pasti yang akan terjadi dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain apabila risiko itu terjadi dimasa yang akan datang. Ketika risiko terjadi,

tertanggung mendapatkan ganti rugi sejumlah nilai pertanggungan yang di pertanggungkan. Menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian menyebutkan Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan..

2) Ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian

Ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian adalah: a). Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi; b). Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi keschatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; c). Perusahaan Reasuransi hanya dapat

menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

3) Manfaat Asuransi

Asuransi memiliki beberapa manfaat yaitu :

a). Memberikan rasa aman dan perlindungan bagi tertanggung, b). Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, c). Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk mengambil kredit perbankan, d). Asuransi dapat menjadi tabungan atau investasi dimasa depan, e). Alat penyebaran risiko, f). Mampu menjadikan jaminan risiko bagi perusahaan.

4) Prinsip Asuransi

Asuransi memiliki prinsip dasar yang harus dijalankan, berikut prinsip asuransi: a). saling kerjasama, b). saling melindungi, c), rela, d). jujur.

5) Pemegang polis

Menurut undang – undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian mengatakan Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

6) Premi asuransi

Menurut undang – undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian mengatakan Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan

reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

b. Leasing

1) Pengertian

Pengertian leasing dikemukakan oleh beberapa sumber sebagai berikut :

Menurut FASB 13 (*Financial Accounting Standard Board*) Leasing adalah penyediaan barang –barang modal yang digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut IAS 17 (*The International Accounting Standart*) Leasing adalah perjanjian antara pemilik (lessor) menyediakan barang atau asset dengan hak penggunaan kepada penyewa (lessee) dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Menurut keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor: 1169/kmk.01/1991 tentang Kegiatan sewa guna usaha, Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

2) Pihak yang berhubungan dengan leasing

Ada beberapa pihak yang terlibat didalam kegiatan leasing antara lain

- a) Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha.
- b) Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor
- c) Pemasok
Pemasok merupakan perusahaan yang menyediakan barang yang kemudian dijual kepada lessee dengan pembayaran tunai oleh lessor.
- d) Kreditur
Merupakan bank yang terlibat langsung dalam kegiatan kontrak leasing, dan kemudian menjadi penyedia dana kepada lessor

3) Teknik pembiayaan leasing

1) Finance Lease

Menurut (Budisantoso & Nuritomo, 2018) lessor merupakan pihak yang memberikan pembiayaan terhadap penyedia barang, dan lessee memilih barang yang dibutuhkan, kemudian lessor selaku pemilik barang modal, melakukan pemesanan, dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna

usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran secara berkala dengan jumlah seluruhnya ditambah pembayaran nilai sisa.

2) Operating lease

Lessor membeli barang modal dan selanjutnya disewa digunakan kepada lessee. Jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut dengan bunganya.

c. Manfaat leasing

Adapun manfaat dari leasing antara lain :

- 1) Menghemat modal, perusahaan tidak perlu untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli barang, dan uang yang lain bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain
- 2) Persyaratan yang tidak terlalu ketat seperti di bank, dan lebih fleksibel, dokumen persyaratan yang di bebaskan kepada lessee tidak seketat di perbankan.
- 3) Biaya lebih murah dikarenakan didasarkan pada nilai sekarang
- 4) Proteksi dari inflasi, karena untuk kontrak yang dikenakan berdasarkan pada suku bunga tetap.
- 5) Risiko keuangan, dapat mengatasi kemungkinan yang akan terjadi, dengan cara mempertimbangkan risiko sedini mungkin.

Kesimpulan

Stabilitas sistem keuangan merupakan hal yang penting karena dapat membantu untuk memperlancar perekonomian, dengan sistem keuangan yang stabil, maka akan dapat memproteksi dari ancaman dari dalam dan luar negeri yang mengancam berlangsungnya intermediasi lembaga keuangan. Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui mitigasi risiko sistematis dapat melalui kebijakan makroprudensial, dan melakukan pengawasan terhadap makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Surveilans dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis dan penilaian risiko. Bank umum dan lembaga keuangan menjaga sistem pembayaran dengan cara menjaga perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan baik dan menjalankan prinsip kerahasiaan.

Daftar Pustaka

<https://www.bi.go.id>

Alrosyid, S. (2019). *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia*.

Bank Indonesia. (2018). *Penguatan SSK Dalam Upaya Menjaga Momentum Pertumbuhan*. 30.

Budisantoso, T., & Nuritomo. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan lain* (3rd ed.). Salemba Empat.

Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(4), 409–430. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i4.574>

Fauziah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. S. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Indonesia, B. (2014). Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/Pbi/2014 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Makroprudensial. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Perbankan, K. D. A. N. (n.d.). *MASALAH-MASALAH SISTEM*.

Rani, M. (2014). Perlindungan otoritas jasa keuangan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank. *Jurnal Selat*, 2(1), 168–181.

Siamat, D. (2007). *Manajemen Lembaga Keuangan*.

Syarif, W. (2000). *Lembaga - Lembaga Keuangan dan Bank*.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peasuransian

Zaini, Z. D. (2018). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia. *Recital Review*, 1(1), 32–49. <https://doi.org/10.22437/rr.v1i1.6066>

Profil Penulis



Muhammad Ulin Nuha, S.E., M.M.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Qudsiyyah Kudus dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang pada tahun 2014. Satu tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang dengan mengambil konsentrasi ilmu manajemen keuangan dan menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2017.

Stabilitas sistem keuangan merupakan hal yang penting karena dapat membantu untuk memperlancar perekonomian, dengan sistem keuangan yang stabil, maka akan dapat memproteksi dari ancaman dari dalam dan luar negeri yang mengancam berlangsungnya intermediasi lembaga keuangan. Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui mitigasi risiko sistematis dapat melalui kebijakan makroprudensial, dan melakukan pengawasan terhadap makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Surveilans dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis dan penilaian risiko. Bank umum dan lembaga keuangan menjaga sistem pembayaran dengan cara menjaga perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan baik dan menjalankan prinsip kerahasiaan

Email Penulis: m.ulinnuha@unwahas.ac.id

KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH

Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si

Universitas Muhammadiyah Luwuk

Pengertian Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

1. Keuangan Negara

Menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara yaitu keuangan negara dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Keuangan dari sisi obyek merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kuangan dari sisi subjek adalah keuangan negara yang meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Kuangan dari sisi proses menyatakan bahwa keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Kuangan dari sisi tujuan meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Anggaran daerah berperan penting dalam mendukung siklus perencanaan strategik daerah, Mardiasmo (2002). Sedangkan pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (2007) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penegasan Penatausahaan keuangan daerah merupakan suatu penegasan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi asas akuntabilitas yang dapat dijadikan motivasi dalam erwujudnya tata kelola keuangan yang baik.

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan negara/daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBN :

Tahap - Tahap dalam perencanaan :

- a. Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
- b. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran
- c. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisis pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi

Tahap penganggaran dimulai dari:

- a. Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
- b. Penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
- d. Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN;
- e. Penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan

4. Pertanggungjawaban

Pengawasan

Di era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan regulasi tersebut merupakan serangkaian proses dari Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peranan aspek pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tata kelola manajemen keuangan daerah yang baik. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana termantub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara, yakni ;

1. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
2. Menjaga stabilitas ekonomi
3. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
4. Mendorong Redistribusi Pendapatan

Tujuan utama dari Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, memberi penjelasan tentang distribusi kewenangan (*distribution of authority*) dan penjelasan tentang derajat pertanggungjawaban (*clarity of responsibility*) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang good governance, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara professional, terbuka, serta bertanggung jawab yang sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara.

Asas-asas Pengelolaan keuangan negara yang telah lama dikenal adalah :

1. Asas tahunan yang memberi persyaratan bahwa anggaran negara disusun setiap tahun harus

mendapat persetujuan dari badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).

2. Asas universalitas (kelengkapan) merupakan asas yang tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara.
3. Asas Kesatuan merupakan asas untuk mempertahankan hak budget Dewan Perwakilan Rakyat secara lengkap, yang artinya semua pengeluaran harus dicantumkan dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran yang dicantumkan adalah anggaran bruto yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
4. Asas Spesialitas merupakan asas yang mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
5. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Asas Profesionalitas merupakan asas keharusan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh tenaga profesional.
7. Asas Proporsionalitas; merupakan alokasi anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi

kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

8. Asas Keterbukaan yang, mewajibkan keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga audit independen.
9. Asas Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

Asas-asas umum tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang tentang Keuangan Negara, sebagai acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

4. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
5. Kekuasaan Keuangan daerah dilaksanakan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku penjabat pengelola APBD dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang daerah.

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisikan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi:

1. Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis, yaitu :

- a. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.

- b. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
 - 1) Dana Bagi Hasil
 - 2) Dana Alokasi Umum
 - 3) Dana Alokasi Khusus
 - 4) Dana Otonomi Khusus
- 2. Pembiayaan
Pembiayaan meliputi:
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
 - b. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, yang terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Adapun terdapat Fungsi dari APBN itu sendiri yaitu:

- 1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Anggaran publik yang dijadikan pedoman pemerintah dalam mengelola keuangan negara atau daerah satu periode pada masa yang akan datang, dimana sebelum dilaksanakan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran publik tersebut dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif dan ditetapkan dengan undang-undang.
- 2. Fungsi perencanaan merupakan anggaran daerah sebagai pedoman bagi manajemen keuangan Negara

dalam merencanakan kegiatan tahunan. Perencanaan dijadikan acuan dalam penyusunan APBN diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1, yang menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga disusun dengan menggunakan pendekatan: 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; 2) Penganggaran Terpadu; 3) Penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Ini penting dilakukan agar APBN terhindar dari kondisi insolvabilitas (krisis anggaran). Karena itu pula dalam usulan anggaran tersebut disertai dengan prakiraan maju. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

3. Fungsi pengawasan menyatakan bahwa anggaran daerah sebagai pedoman dalam penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK dan menyampaikan hasil pengawasan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh inspektorat jenderal/inspektorat utama pada masing-masing departemen/lembaga dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan pada semua departemen/lembaga (termasuk BUMN). Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal bersifat post audit. Pengawasan ini dilakukan sebagai efek gelombang demokratisasi yang menuntut good governance pemerintahan yang bersih. Salah satu prinsip dari good governance adanya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik maupun ekonomi untuk menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi alokasi tidak hanya ditujukan untuk masalah pengangguran tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur perlu mendapat prioritas utama. Fungsi alokasi mengarahkan pengeluaran anggaran pemerintah pada orientasi peran yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui investasi pendidikan dalam pengembangan SDM terutama akumulasi modal fisik.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan

infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Atau, pembukaan daerah terisolasi akan cenderung menguatkan *terms of trade* kelompok masyarakat terpencil. Manfaat marjinal tindakan ini yang terbesar biasanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan mereka yang berpenghasilan tinggi, dimana yang terakhir ini sebelumnya telah memiliki akses (meskipun terbatas). Peran distribusi APBN berkaitan juga terhadap usaha untuk memperbaiki kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) dalam mengangkat kelompok masyarakat yang berpendapatan bawah dan memperbaiki distribusi pendapatan. Fungsi ini berjalan secara paralel dengan aspek penerimaan dimana dengan sistem pajak yang progresif akan memberikan beban pajak yang "*fair*" sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan dan kemudian disalurkan melalui pengeluaran pemerintah. Distribusi juga dilakukan untuk pembangunan daerah tertinggal. Saat ini Indonesia menghadapi pembangunan yang tidak merata sehingga masih banyak daerah yang tertinggal. Fungsi distribusi juga akan menunjukkan bahwa APBN merupakan produk kebijakan pemerintah yang bersifat politis.

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Fungsi stabilisasi dalam APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian sehingga berjalan dalam kapasitasnya. Jika kondisi perekonomian lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan

menambah pengeluaran, atau sebaliknya. Jika perekonomian dalam kondisi permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada kondisi stabilisasi tersebut, yaitu pertama, sebagai alat pengendali inflasi dan stabilisator pertumbuhan ekonomi. Kedua, APBN dapat mengurangi dampak inflasioner dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri. Dengan demikian dalam penetapan APBN yang mengacu pada UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN.

Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

1. Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN diatur lebih lanjut menggunakan peraturan presiden (alokasi anggaran kantor pusat dan kantor daerah, pembayaran tunggakan, alokasi dana perimbangan, alokasi subsidi) sebagai pedoman kementerian dan lembaga. Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN

untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

2. Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

4. Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

- a. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
- c. Penajaman prioritas pembangunan
- d. Menitik beratkan pad azas-azas dan undang-undang Negara

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2. Pendapatan Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - Dana Bagi Hasil

- Dana Alokasi Umum
- b) Dana Transfer Khusus
 - DAK Fisik
 - DAK Non Fisik
- 2) Dana Insentif Daerah;
- 3) Dana Otonomi Khusus;
- 4) Dana Keistimewaan;
- 5) Dana Desa.
- b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan Daerah

Adapun sumber pembiayaan yaitu sebagai berikut.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyusunan APBD Berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan Perkada (Peraturan Keuangan Daerah) dengan menjabar melalui : (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) APBD, cash, budget, standar harga.

2. Pertanggung jawaban, Akuntansi dan Pelaporan Uang Negara/Daerah

Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota/kepala kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara Umum Negara/Daerah, kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang Negara/Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Negara/Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan pengelolaan Uang Negara dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat dilakukan secara periodik dan berjenjang. Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

3. Pengawasan Keuangan Negara/Daerah

Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Negara/Daerah dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor/satuan kerja. Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Negara/Daerah dilakukan

oleh aparat pengawasan fungsional pusat/daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Jika dikaji secara mendalam pengertian antara keuangan negara dengan keuangan daerah hampir bias dikatakan tidak ada perbedaan. Yang menjadi pembeda membedakan hanya pada frasa negara dan daerah, Negara menunjuk pemerintah pusat, daerah menunjuk pada pemerintah daerah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan desentralisasi keuangan sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dimana Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah dalam satu kerangka sistem pengelolaan keuangan yang tertib berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

Hubungan antara keuangan pusat dan daerah telah diamanatkan dalam UUD 1945 dimana pemerintah daerah diberi otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk karena itu, perlu adanya pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara adil dan selaras tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang sejalan dengan prinsip perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Pendanaan tersebut mengandung prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian

keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33/ Tahun 2004 Pasal 4, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana yang disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/atau tugas pembantuan yang diberikan.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Ahmad Yani. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kedua, April, 2004.*
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta*
- UU No 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- PP No 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022*
- <https://jagoakuntansi.com/2019/04/10/pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah/>. (Diakses 5 November 2021)
- <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-5.pdf> (Diakses 10November 2021)

Profil Penulis**Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si**

Lahir di Luwuk, 17 Desember 1976 Dosen Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. Tamat SD Muhammadiyah 1 Luwuk Tahun 1988, MTs Negeri Luwuk Tahun 1991, SMU Negeri 2 Luwuk tahun 1994, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu Tahun 1999, Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Tahun 2019. Aktif diberbagai organisasi dan mengikuti Seminar nasional dan internasional serta menulis beberapa Buku.

Email : annaladjin@yahoo.com

- 1 PENGANTAR ILMU PEREKONOMIAN
Dr. Hamdan Firmansyah, M.M.Pd, M.H.
- 2 SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Aswanto, S.E., M.E.
- 3 DASAR-DASAR EKONOMI
Enny Kartini, M.Pd.
- 4 ILMU EKONOMI MIKRO DAN MAKRO
Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.
- 5 PENGANTAR ILMU INVESTASI
Dr. (Cand) Aditya Wardhana, S.E., M.M., M.Si
- 6 PRINSIP DAN KONSEP INVESTASI
Ratih Pratiwi, S.Pd., M.Si., M.M.
- 7 DASAR-DASAR INVESTASI
Musdalifah, S.Pd., M.Pd
- 8 DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN
Dr. Diyah Santi Hariyani, S.E., M.Si
- 9 MANAJEMEN KEUANGAN
Madya Ahdiyat, S.E., M.M.
- 10 PELAPORAN DAN LAPORAN KEUANGAN
Refni Sukmadewi, S.E., M.M.
- 11 SISTEM DAN LEMBAGA KEUANGAN
Muhammad Ulin Nuha, S.E., M.M.
- 12 KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH
Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si

Editor :

Arif Munandar

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B 40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-362-442-8 (PDF)



9 786233 624428